



Universitas Indonesia



**KINERJA UNIT PENGOLAHAN SAMPAH KOTA DEPOK
(STUDI KASUS: UNIT PENGOLAHAN SAMPAH DI
KECAMATAN SUKMAJAYA)**

SKRIPSI

**SILADIA GRAHANIDA
0806317590**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
MEI 2012**



Universitas Indonesia

**KINERJA UNIT PENGOLAHAN SAMPAH KOTA DEPOK
(STUDI KASUS: UNIT PENGOLAHAN SAMPAH DI
KECAMATAN SUKMAJAYA)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

**SILADIA GRAHANIDA
0806317590**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
KONSENTRASI REGIONAL
DEPOK
MEI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan
benar.**

Nama : Siladia Grahanida

NPM : 0806317590

Tanda Tangan : 

Tanggal : 29 Mei 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

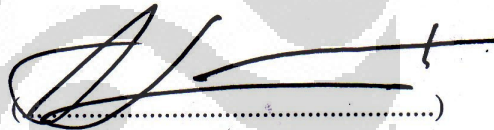
Nama : Siladia Grahanida
 NPM : 0806317590
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : **Kinerja Unit Pengolahan Sampah Kota Depok (Studi Kasus: Unit Pengolahan Sampah di Kecamatan Sukmajaya)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratannya yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

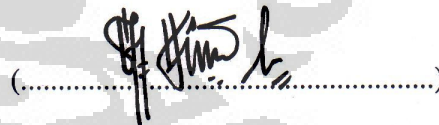
Ketua Sidang :

Achmad Lutfi, S.Sos, M.Si



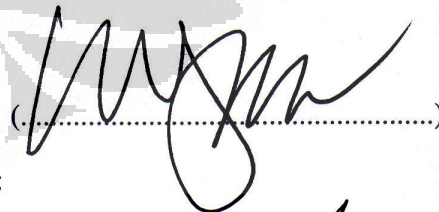
Sekretaris Sidang :

Desy Hariyati, S.Sos



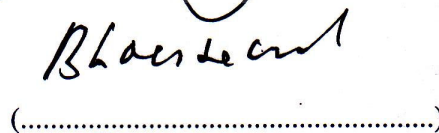
Pembimbing :

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si



Penguji :

Prof. Dr. Bhenyamin Hoessin



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Mei 2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Berkat petunjuk-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Penulisan skripsi dengan judul “Kinerja Unit Pengolahan Sampah Kota Depok (Studi Kasus: Unit Pengolahan Sampah di Kecamatan Sukmajaya)” ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler/Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan pembimbing skripsi. Terima kasih atas keluangannya waktu, pikiran dan tenaga ditengah-tengah kesibukannya untuk membantu dan memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Achmad Lutfi, S.Sos., M. Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
3. Dra. Rainingsih Hardjo, M. A, selaku Pembimbing Akademis.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok
5. Komisi C DPRD Kota Depok
6. Jurnalis Media Jurnal Depok
7. Masyarakat Kecamatan Sukmajaya
8. Desy Hariyati, S.Sos dan Defny Holidin, MPM yang telah banyak memberikan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini, serta teman-teman Logowa: Dede, Intan, Dinar, dan Sela yang telah memberikan pengalaman yang begitu luar biasa.
9. Drs. Edy Budiono dan Dina Andayani, selaku orang tua yang telah memberikan dukungan dan doa terbaik. Semoga kebanggaan selalu bisa Penulis berikan untuk Ibu dan Bapak.
10. Adik-adikku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan.

11. Vuty yang pendiam tapi rajin, Fitri si nyonya rempong, Disa si nyonya super super rempong, Uta yang selalu bisa dindalkan, Ochiel yang selalu tidak bisa hidup tanpa pacar, Juan si abang Batak tapi lemah lembut, dan Srim yang selalu setia berbagi kegalaun di MBRC dan selalu menyediakan stok reality show Korea, dan teman-teman Administrasi Negara 2008 yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
12. Teman-teman K2N UI Pulau Ende yang selalu menjalani kegilaan di Pulau, terutama Nisa Syahidah dan Nurul Hasanah yang melanjutkan kegilaannya bersama Penulis hingga sekarang (dan semoga selamanya), terima kasih juga atas kemurahan waktunya untuk berbagi bersama Penulis.
13. Terima kasih kepada anak-anak kosan “Wisma An-nisa”: Mbak Yani, Maria, Amie, Ira (atas), Ira (bawah), Mitun, Yunda, dan Agni atas kebersamaan dan kebahagiaan selama kurang lebih 3 tahun ini.
14. Ardana Reswari, Dwi Hayuningtyas, dan Nur Fitri Feni, yang telah memberikan pertemanan yang indah sejak SMP. Sukses untuk kita semua ya.
15. Muhammad Hafidh, terima kasih yang teramat dalam atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga mimpi-mimpi yang telah kita bangun dapat terwujud satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam memperbaiki pelayanan persampahan di Kota Depok.

Depok, 2012

Siladia Grahanida

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

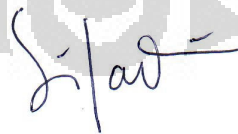
Nama : Siladia Grahanida
NPM : 0806317590
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Kinerja Unit Pengolahan Sampah Kota Depok (Studi Kasus: Unit Pengolahan Sampah di Kecamatan Sukmajaya),” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 29 Mei 2012

Yang menyatakan,



(Siladia Grahanida)

ABSTRAK

Nama : Siladia Grahanida
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Kinerja Unit Pengolahan Sampah Kota Depok (Studi Kasus: Unit Pengolahan Sampah di Kecamatan Sukmajaya)

Volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Depok sudah tidak sebanding lagi dengan kapasitas TPA Cipayung. diperkirakan TPA tersebut hanya dapat berfungsi hingga tahun 2012. Oleh karenanya, untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka dibentuklah Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang bertugas untuk mengolah sampah dari sumbernya. Namun, pembentukan UPS ini mengalami permasalahan, yaitu penolakan dari masyarakat, masalah sosialisasi dari Pemerintah Kota Depok, serta dugaan penyelewengan dana pembangunan UPS. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui gambaran serta menganalisis kinerja UPS tersebut, khususnya UPS di Kecamatan Sukmajaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja UPS di Kecamatan Sukmajaya belum baik karena proses inovasi, proses operasional, dan proses pelayanan yang dilakukan oleh UPS belum maksimal. Selain itu, dari segi finansial an hasil dari UPS pun belum menunjukkan hasil yang baik, terutama dalam hal pengurangan volume sampah di TPA. Namun, dari segi kepemimpinan, mereka mampu menjalankan dengan baik karena pemimpin berasal langsung dari masyarakat.

Kata kunci: kinerja, sampah, unit pengolahan sampah.

ABSTRACT

Name : Siladia Grahanida
Major : Public Administration
Title : Waste Processing Unit Performance of Depok Municipality
(Case Study: Waste Processing Unit in Sukmajaya Sub-District)

The volume of waste produced by people in Depok Municipality has exceeded the capacity of Cipayung Landfill. It is projected that Cipayung Landfill will only last up to 2012. Therefore, to prevent this from happening, Waste Processing Unit is established to process the waste from its source. However, the creation of Waste Processing Unit poses challenges, namely public resentment, lack of socialization from the local government of Depok Municipality, and alleged corruption of development budget of the unit. This thesis aims to analyze the performance of Waste Processing Unit in Sukmajaya Sub-District. This research uses quantitative approach with qualitative and quantitative data collecting method. The findings indicated that Waste Processing Unit in Sukmajaya Sub-District does not function well since the innovation process, the operational process, and the service process in the unit has not been maximized. In addition, the budgeting and the result of the unit have not reach the targeted result, which is the reduction of the waste in the landfill. However, the findings show an excellent leadership performance in the unit since the leader is the representative of local people.

Keywords: performance, waste, waste processing unit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Pokok Permasalahan	9
I.3 Tujuan Penelitian	9
I.4 Signifikansi Penelitian	9
I.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II KERANGKA TEORI	
II.1 Tinjauan Pustaka	12
II.2 Kerangka Teori	18
II.2.1 Pelayanan Publik	18
II.2.2 Kinerja	22
II.2.3 Pengukuran Kinerja	25
II.3 Model Penelitian	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
III.1 Pendekatan Penelitian	41
III.2 Jenis Penelitian	42
III.3 Teknik Pengumpulan Data	43
III.4 Batasan Penelitian	45
III.5 Populasi dan Sampel	46
III.6 Analisis Data Deskriptif	46
III.7 Keterbatasan Penelitian	47
BAB IV GAMBARAN UMUM	
IV.1 Program Pelayanan Kebersihan Kota Depok	48
IV.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok	50
IV.3 Unit Pengolahan Sampah	52
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
V.1 Manajemen Proses	57
V.1.1 Proses Inovasi	57

V.1.1.1	Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat	57
V.1.1.2	Ketepatan Solusi Pelayanan Persampahan	63
V.1.2	Proses Operasional	66
V.1.2.1	Kesesuaian Tugas	66
V.1.2.2	Proses Pengolahan Sampah yang Efektif dan Efisien	68
V.1.3	Proses Pelayanan	74
V.1.3.1	Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan	74
V.1.3.2	Kemampuan Menanggapi Komplain	76
V.2	Kepemimpinan	79
V.2.1	Kepemimpinan di UPS Sadewa	80
V.2.1.1	Task Oriented	81
V.2.1.2	Relationship Oriented	84
V.2.2	Kepemimpinan di UPS Merdeka II	85
V.2.2.1	Task Oriented	88
V.2.2.2	Relationship Oriented	90
V.3	Finansial	92
V.3.1	Anggaran Pembangunan Unit Pengolahan Sampah	92
V.3.2	Anggaran Pengelolaan Unit Pengolahan Sampah	94
V.4	Hasil	98
V.4.1	Product Outcomes	98
V.4.1.1	Terbangunnya Tempat Pengolahan Sampah	98
V.4.1.2	Kapasitas Mesin Pengolahan Sampah	100
V.4.1.3	Kualitas Hasil Produk Unit Pengolahan Sampah	103
V.4.1.4	Penurunan Volume Sampah di Tempat Pembuangan Akhir	107
V.4.1.5	Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru	113
V.4.2	Customer-focused Outcomes	114
V.4.2.1	Penilaian Masyarakat	114
BAB VI	PENUTUP	
VI.1	Simpulan	123
VI.2	Rekomendasi	124
DAFTAR PUSTAKA		125
LAMPIRAN		131

DAFTAR TABEL

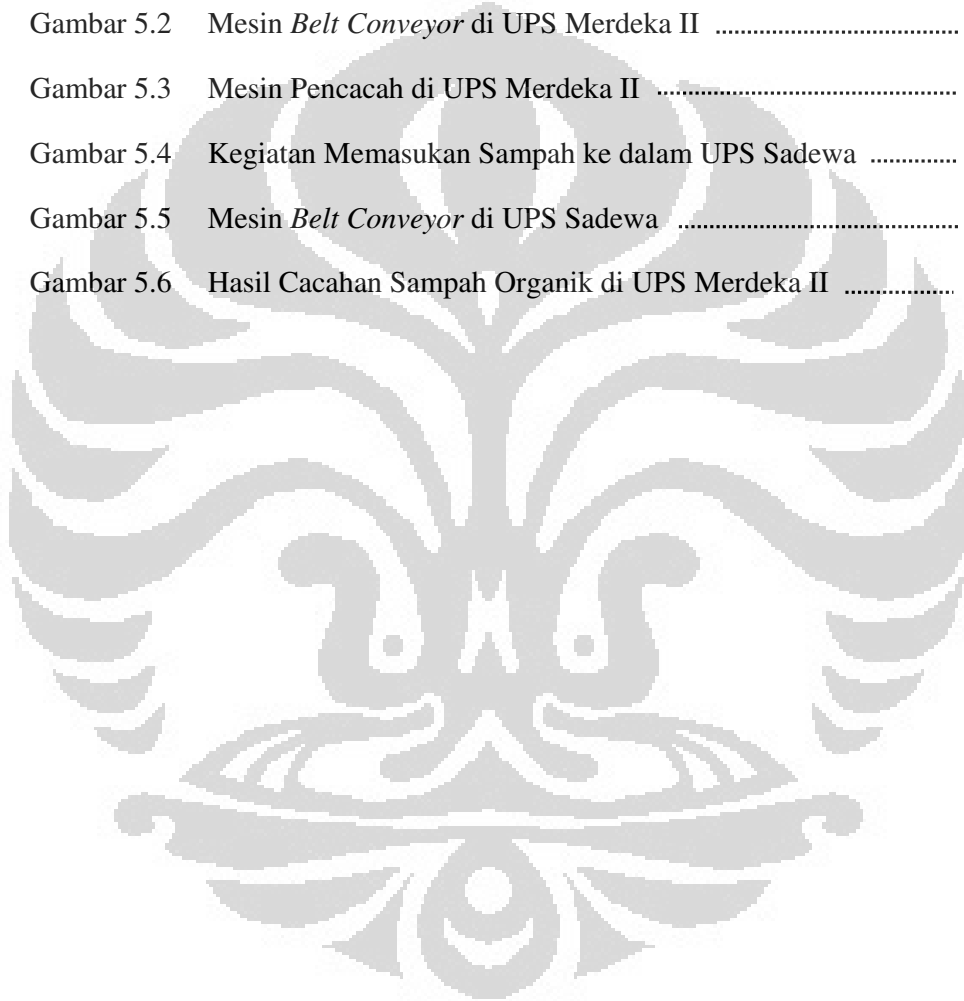
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2010	3
Tabel 1.2	Jumlah Sampah di Kota Depok Tahun 2010	4
Tabel 1.3	Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kota Depok	5
Tabel 2.1	Penelitian yang Menjadi Rujukan Peneliti dalam Penelitian	17
Tabel 2.2	Perbedaan Utama Manajemen Pelayanan Publik Dan Sektor Privat	20
Tabel 2.3	Perbandingan 2 Model Pengukuran Kinerja	32
Tabel 2.4	Dimensi Kinerja Organisasi Menurut Teori dan Konsep	34
Tabel 2.5	Matriks Pengembangan Instrumen	38
Tabel 4.1	Lokasi Komposting dan 3 R	49
Tabel 5.1	Jadwal Pembuangan Sampah di UPS Sadewa	76
Tabel 5.2	Anggaran Operasional Bulanan Unit Pengolahan Sampah (UPS)	95
Tabel 5.3	Anggaran Tahunan Untuk Satu Unit Pengolahan Sampah (UPS)	96
Tabel 5.4	Rekapan Laporan Unit Pengolahan Sampah (UPS) Sadewa Tahun 2009-2011	108
Tabel 5.5	Rekapan Laporan Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka II Tahun 2009-2011	109
Tabel 5.6	Ringkasan Hasil Temuan	117

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1	Proyeksi Jumlah Penduduk dan Volume Sampah di KotaDepok	58
Grafik 5.2	Persentase Usia Responden	80
Grafik 5.3	Persentase Pendidikan Responden	81
Grafik 5.4	Persentase Kemampuan Pemimpin dalam Menciptakan Budaya Organisasi yang Mempertahankan Nilai-nilai sebagai Organisasi yang Terus Tumbuh dan Berkembang	82
Grafik 5.5	Persentase Usia Responden	86
Grafik 5.6	Persentase Pendidikan Responden	87
Grafik 5.7	Persentase Kemampuan Pemimpin dalam Mengalokasikan Sumber Daya untuk Kegiatan	89
Grafik 5.8	Persentase Terjalin Kerja Sama	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Dimensi Kinerja	24
Gambar 2.2	Dimensi-dimensi dalam Pengukuran Kinerja	34
Gambar 5.1	Tumpukan Sampah di UPS Sadewa (kiri), Kegiatan Petugas UPS Sadewa (kanan)	67
Gambar 5.2	Mesin <i>Belt Conveyor</i> di UPS Merdeka II	68
Gambar 5.3	Mesin Pencacah di UPS Merdeka II	69
Gambar 5.4	Kegiatan Memasukan Sampah ke dalam UPS Sadewa	70
Gambar 5.5	Mesin <i>Belt Conveyor</i> di UPS Sadewa	72
Gambar 5.6	Hasil Cacahan Sampah Organik di UPS Merdeka II	107



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Kepemimpinan	132
Lampiran 2	Pedoman Wawancara Mendalam	136
Lampiran 3	Transkrip Wawancara dengan Kasie Pengolahan Sampah DKP Kota Depok	138
Lampiran 4	Transkrip Wawancara dengan Kasie Pengadaan Sarana Prasarana DKP Kota Depok	141
Lampiran 5	Transkrip Wawancara dengan Koordinator UPS Merdeka II	144
Lampiran 6	Transkrip Wawancara dengan Koordinator UPS Sadewa	147
Lampiran 7	Transkrip Wawancara dengan Sekertaris RW 18 Kelurahan Abadijaya	154
Lampiran 8	Transkrip Wawancara dengan Masyarakat RT 03/RW 21 Kelurahan Abadijaya	157
Lampiran 9	Transkrip Wawancara dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Depok	160
Lampiran 10	Transkrip Wawancara dengan Wartawan Harian Jurnal Depok	163
Lampiran 11	Dokumentasi Studi Lapangan	167

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan mengangkat judul dan tema penelitian, pokok permasalahan yang menguraikan masalah-masalah pada objek penelitian, tujuan penelitian yang menguraikan tujuan dilakukannya penelitian, signifikansi penelitian menguraikan tentang manfaat dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan yang menguraikan tentang tata urutan atau tata alur penyusunan penulisan yang dilakukan secara sistematis.

I. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan kewajiban setiap negara. Kebutuhan tersebut dipenuhi melalui pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik antara daerah pedesaan dan perkotaan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan. Dalam peraturan tersebut, standar pelayanan perkotaan untuk kota pemukiman ini meliputi perumahan; air minum; drainase; prasarana jalan lingkungan; persampahan; air limbah; energi; komunikasi dan informasi; dan ruang terbuka hijau. Akan tetapi, pelayanan perkotaan ini tidak sepenuhnya dapat dipenuhi dengan baik oleh pemerintah kota setempat, seperti pelayanan persampahan. Hal ini terjadi karena sampah seringkali di anggap sesuatu yang tidak berguna, padahal sampah bisa menimbulkan masalah yang cukup serius terhadap lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan makin bertambah pula. Peningkatan jumlah sampah tersebut seringkali

tidak diimbangi oleh sistem pengelolaan sampah yang baik. Jumlah sampah yang makin meningkat ini tidak akan bisa dikelola dengan baik apabila penanganannya masih memakai paradigma lama, yaitu kumpul-angkut-buang (E. Kurniawan S.Si, 2010). Permasalahan ini terjadi di sebagian besar kota, terutama untuk kota-kota besar yang jumlah penduduknya banyak. Seperti yang terjadi pada Kota Depok. Tanggung jawab dalam pelayanan persampahan ini dipegang oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok. Pelayanan persampahan di Kota Depok masih menggunakan prinsip lama, yaitu kumpul-angkut-buang (bataviase.co.id, 2010). Hal ini menitikberatkan hanya pada pengangkutan dan pembuangan akhir.

Pembuangan akhir sampah yang ada di Depok adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Luas TPA ini mencapai 11,2 hektare (Rajagukguk, 2011) dan beroperasi sejak tahun 2001, atau sepuluh tahun yang lalu (Viridhani, 2011). Hingga saat ini, TPA Cipayung sudah tidak mampu lagi menampung sampah di Kota Depok, diperkirakan TPA ini hanya dapat berfungsi hingga tahun 2012 karena dari 11,2 hektare luas lahan TPA, kini hanya tersisa 0,64 hektare (Rajagukguk, 2011).

Penimbunan sampah yang terjadi di Kota Depok ini terjadi karena pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Pada tahun 2005, jumlah penduduk mencapai 1.374.522 jiwa, terdiri atas laki-laki 696.329 jiwa (50,66%) dan perempuan 678.193 jiwa (49,34%). Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 447.993 jiwa sejak tahun 2000. Pada tahun 1999 jumlah penduduk masih dibawah 1 juta jiwa dan pada tahun 2005 telah mencapai 1.374.522 jiwa, sehingga perkembangan rata-rata 4,23 % per tahun (depok.go.id) dan pertumbuhan jumlah ini semakin meningkat setiap tahunnya. Penduduk Kota Depok ini pada tahun 2010 tersebar di sebelas kecamatan, yaitu Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Beji, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Tapos, Kecamatan Cinere dan Kecamatan Limo.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2010

No.	Kecamatan	2010
1.	Sawangan	123.356
2.	Pancoran Mas	210.204
3.	Sukmajaya	232.895
4.	Cimanggis	242.214
5.	Beji	164.682
6.	Limo	87.615
7.	Bojongsari	99.768
8.	Cipayung	127.707
9.	Cilodong	123.713
10.	Tapos	216.581
11.	Cinere	107.830
Jumlah		1.736.565

Sumber: DDA 2010

Dari tabel diatas, dapat terlihat pertumbuhan penduduk Kota Depok setiap tahun selalu meningkat. Hal ini berarti pula bahwa jumlah sampahnya ikut meningkat. Padahal, lahan TPA Cipayung tidak ikut bertambah. Menurut kepala seksi pengolahan sampah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Abdul Rahman, untuk mengukur jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat, Kota Depok masih memakai asumsi karena belum memiliki alat ukur yang pasti. Asumsi tersebut memperkirakan bahwa satu orang penduduk menghasilkan 2,5 liter sampah setiap harinya. Maka, jika memakai asumsi tersebut dapat diperkirakan jumlah sampah di Kota Depok pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Sampah di Kota Depok Tahun 2010

No.	Kecamatan	Tahun	
		2010	Jumlah Sampah (liter)
1.	Sawangan	123.356	308.390
2.	Pancoran Mas	210.204	525.510
3.	Sukmajaya	232.895	582.237,5
4.	Cimanggis	242.214	605.535
5.	Beji	164.682	411.705
6.	Limo	87.615	219.037,5
7.	Bojongsari	99.768	249.420
8.	Cipayung	127.707	319.267,5
9.	Cilodong	123.713	309.282,5
10.	Tapos	216.581	541.452,5
11.	Cinere	107.830	269.575
Jumlah		1.736.565	4.341.412,5

Sumber: Di olah oleh peneliti

Terlihat pada tabel 1.2 diatas, jumlah sampah yang paling banyak berada di Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Sukmajaya, sedangkan jumlah sampah yang paling sedikit berada di Kecamatan Limo. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk di Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Sukmajaya lebih banyak daripada di kecamatan yang lain. Namun, jika dilihat dengan keadaan lingkungan, Kecamatan Sukmajaya lebih rawan mengalami peningkatan jumlah sampah karena sebagian besar pemukiman terdapat di Kecamatan ini. Hal ini diungkapkan pula oleh DKP Kota Depok bahwa sebagian besar sampah di Kota Depok berasal dari sampah rumah tangga, yaitu mencapai 63%, sedangkan sampah dari sampah pasar dan industri hanya 17% (www.depok.go.id, 2011).

Berdasarkan data Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, perangkat pengelolaan sampah dari mulai pengangkutan sampai pemrosesan belum mampu menangani seluruh jumlah sampah tersebut. Dengan jumlah 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), 162 unit Tempat Pembuangan Sementara (TPS), 41 unit kontainer dan 48 unit truk sampah, sampah yang terangkut dan terproses berkisar 34% dari keseluruhan jumlah sampah (depoklik.com, 2011).

Sampah-sampah yang tidak terangkut ini kembali menimbulkan masalah, yaitu kesehatan dan lingkungan. Sampah-sampah yang tercecer ini menimbulkan aroma yang tidak sedap sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat

(metrotvnews.com, 2011). Selain itu, lalat dan berbagai sumber penyakit lainnya juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan sampah ini, Pemerintah Kota Depok, melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, menyusun rencana pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di beberapa titik Kota Depok. Rencana pembangunan UPS ini dimulai pada tahun 2007 hingga tahun 2011 dengan target 60 UPS (republika.co.id, 2009). UPS ini merupakan tempat untuk mengolah sampah dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Pada tahun 2009, UPS ini telah dibangun sebanyak 20 unit di 6 Kecamatan dan menghabiskan dana Rp 11,2 miliar (republika.co.id, 2009).

Tabel 1.3
Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kota Depok

No	Lokasi	Jenis	Luas Lahan (M persegi)	Luas Bangunan (M persegi)	Alamat Lengkap	Keterangan
1	Cipayung	TPA	540.00	540.00	Kelurahan Cipayung Kecamatan Pancoranmas Kota Depok	TPA Cipayung (Hanggar 2)
2	Pancoran Mas	TPA	540.00	540.00	Kelurahan Cipayung Kecamatan Pancoranmas Kota Depok	TPA Cipayung (Hanggar 1)
3	Pancoran Mas	TPA	540.00	540.00	Kelurahan Cipayung Kecamatan Pancoranmas Kota Depok	TPA Cipayung (Hanggar 3)
4	Pancoran Mas	TPA	540.00	540.00	Kelurahan Cipayung Kecamatan Pancoranmas Kota Depok	TPA Cipayung (Hanggar 4)
5	Limo	Hak Milik	560.00	540.00	Jl. Pulo Mangga RT. 02/RW. 05 Kelurahan Grogol Kecamatan Limo Kota Depok	Lahan milik : Naim bin Mindong
6	Pancoran Mas	Hak Milik	700.00	300.00	Bojong Pondok Terong Kp. Lio RT. 02/RW.07 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Pancoranmas Kota Depok	Lahan Milik : Suwarna
7	Cimanggis	Hak Milik	540.00	540.00	Cimpaeun Jl Pintu Air 3 RT 04/03 Kelurahan Cimpauen Kecamatan Cimanggis Kota Depok	Lahan Milik : Suji Rahayu
8	Pancoran Mas	Hak Milik	600.00	540.00	Bulak Timur Jl. Bulak Timur Cipayung Induk RT.01/06 Kelurahan Cipayung Kecamatan Pancoranmas Kota Depok	Lahan Milik : Otong
9	Limo	Hak Milik	500.00	360.00	Jl. Cilobak Raya V RT. 02/01 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Limo Kota Depok	Lahan Milik : Widodo SH
10	Limo	Hak Milik	1000.00	540.00	Al-Hidayah Pangkalanjati Baru Jl. Al Hidayah RT. 04/RW. 02 Kelurahan Pangkalan Jati Baru Kecamatan Limo Kota	Lahan Milik : H Basit

					Depok	
11	Limo	Hak Milik	700.00	540.00	Kp. Sasak RT. 03/RW. 06 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok	Lahan Milik : H Syair
12	Sawangan	Hak Milik	1000.00	540.00	Jl. Ali Andong RT. 03/09 Kelurahan Bojong Sari Kecamatan Sawangan Kota Depok	Lahan Milik : Anam Koteng
13	Beji	Fasos-Fasum	540.00	540.00	Jl. Jawa Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji Kota Depok	-
14	Pancoran Mas	Fasos-Fasum	540.00	540.00	Jl. Raya Citayam Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pancoranmas Kota Depok	Perumahan Permata Regency
15	Sukmajaya	Fasos-Fasum	320.00	300.00	Jl. Sadewa Raya Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Depok Utara	-
16	Sukmajaya	Fasos-Fasum	1000.00	540.00	Jl. Merdeka I Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok	(Samping Laka/Hanggar I)
17	Sukmajaya	Fasos-Fasum	540.00	540.00	Jl. Merdeka II Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok	(Samping Laka/Hanggar II)
18	Sawangan	Fasos-Fasum	500.00	350.00	Taman Puri Bali Kelurahan Curug Kecamatan Sawangan Kota Depok	Komp Wika Realty Unit II
19	Cimanggis	Fasos-Fasum	540.00	540.00	Cilangkap RT. 001/RW. 011 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Cimanggis Kota Depok	-
20	Sawangan	Fasos-Fasum	1000.00	540.00	RW. 014 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok	Perumahan Bukit Rivaria

Sumber: bappeda.depok.go.id

Akan tetapi, UPS ini tidak serta merta berjalan dengan lancar. Hal ini terjadi karena jumlah UPS yang telah dibangun tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Depok. Selain itu, terdapat pula masalah lain, seperti penolakan dari masyarakat, masalah sosialisasi dari Pemerintah Kota Depok, serta dugaan penyelewengan dana pembangunan UPS.

Pembangunan UPS ini sebagian besar mengalami penolakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh titik UPS yang berada ditengah pemukiman warga. Sedikitnya lima kelurahan di Depok telah mengajukan surat penolakan kepada DPRD Depok untuk menghentikan rencana pembangunan UPS ini (Viridhani, <http://news.okezone.com>, 2008). Selain itu, pembangunan ini tidak memiliki izin lingkungan ke warga setempat (Viridhani, <http://news.okezone.com>, 2008).

Penolakan pembangunan UPS ini terkait pula dengan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Kota mengenai pembangunan tersebut kepada

masyarakat (Viridhani, <http://news.okezone.com>, 2008). Masyarakat sama sekali tidak dilibatkan oleh Pemerintah dalam rencana pembangunan ini. Selain itu, pembangunan UPS ini terkesan sembunyi-sembunyi karena selalu dilakukan pada dini hari (matanews.com, 2008). Letak UPS yang dekat dengan pemukiman warga ini berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, aroma tidak sedap tercium sepanjang hari serta banyaknya lalat pembawa penyakit.

Sebenarnya, masyarakat mendukung rencana pembangunan UPS di daerah mereka. Namun, mereka tidak bersepakat mengenai cara Pemerintah Kota Depok dalam menentukan titik pembangunan. Selain itu, mereka merasa khawatir apabila UPS ini tidak dapat menyelesaikan masalah sampah yang selama ini mengganggu. Hal ini terkait dengan buruknya keadaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang sebelumnya telah dibangun (republika.co.id, 2008).

Permasalahan lain yang timbul adalah kondisi UPS yang telah dibangun oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok hingga tahun 2009 yang lalu tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Proyek UPS ini dianggap menyimpang dari pekerjaan yang semestinya. Kondisi UPS ini sangat jauh dari yang diharapkan, mesin yang digunakan untuk mengolah sampah sebagian besar rusak. Selain itu, keadaan UPS semakin semrawut dan sampah semakin banyak bertumpuk. Hal ini disebabkan banyaknya sampah pasar dan rumah tangga yang sudah tidak dapat diolah lagi (mediaindonesia.com, 2011).

Buruknya kondisi UPS tersebut menyebabkan timbulnya dugaan korupsi atas pembangunan UPS. Pengadaan mesin UPS merupakan hal yang cukup banyak menjadi sorotan. Demi mengoptimalkan fungsi UPS, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Tahun 2007-2010 lalu telah mengeluarkan dana APBD mencapai puluhan miliar rupiah untuk membeli 33 buah mesin. Pengadaan mesin UPS tersebut diperlukan untuk mendukung program pemerintah mengatasi permasalahan persampahan khususnya di Kota Depok. Harga mesin UPS ini dibeli dengan harga Rp 400 juta per unit. Akan tetapi, timbul dugaan tidak sesuai harga tersebut karena mesin sering sekali rusak. Hal ini memperlihatkan bahwa kualitas mesin UPS sangat rendah, dan diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Barisan Indonesia (Barindo) Dewan Pengurus Cabang (DPC)

Kota Depok, Bejo Sumantoro, bahwa bentuk fisik mesin UPS yang dibeli Pemerintah Kota Depok banyak terlihat kejanggalan, pertama mulai dari pisau cacahnya tidak asli, terutama mesin itu bukan hasil buatan pabrikan. Selain itu, diketahui pula ketika proses lelang pengadaan paket mesin UPS selama tiga tahun ke belakang banyak peserta lelang yang kecewa. Sehingga tiap tahun beberapa peserta lelang selalu melakukan hak sanggah mereka karena mengalami ketidakwajaran harga, juga proses lelang nyata dan kasatmata (Anggi, 2011).

Berbagai permasalahan yang timbul terkait dengan pembangunan maupun pelaksanaan UPS ini mengganggu kinerja UPS itu sendiri dalam pelayanan persampahan di Kota Depok. Pada akhirnya, banyak UPS yang tidak optimal dalam melakukan pengolahan sampah. Hingga, tahun 2011 ini, belum terdapat penambahan jumlah UPS di kecamatan-kecamatan di Kota Depok. Padahal, sejak akhir tahun 2009, telah terjadi pemekaran kecamatan yang semula hanya enam kecamatan, menjadi sebelas kecamatan. Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pihak pemerintah Kota Depok untuk mengadakan penyesuaian fungsi UPS di setiap kecamatan yang mekar. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sukmajaya, sebagai daerah pemukiman yang memiliki kepadatan tertinggi di Kota Depok (Bappeda Kota Depok, 2010) ini, kecamatan tersebut berpotensi menghasilkan sampah rumah tangga lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Setelah dimekarkan menjadi Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cilodong, potensi sampah yang dihasilkan tidak berkurang secara signifikan karena jumlah penduduk di kawasan pemukiman ini tetap banyak.

Tingkat kepadatan di Kecamatan Sukmajaya ini setiap tahunnya semakin meningkat, pada tahun 2005 kepadatan di kecamatan ini mencapai 9.017,8 jiwa/km², bahkan setelah pemekaranpun kecamatan ini tetap memiliki kepadatan tertinggi di Kota Depok yaitu mencapai 12.495 jiwa/km² pada tahun 2010. Kepadatan penduduk yang berada di Sukmajaya ini memiliki dampak pada jumlah lahan kosong di kecamatan tersebut. Sehingga lahan kosong untuk UPS pun cenderung sedikit. Selain itu, lahan-lahan kosong tersebut bukan tidak mungkin berada di wilayah yang dekat dengan penduduk. Keadaan yang seperti ini menjadi salah satu penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat atas pembangunan UPS oleh pemerintah. Padahal, tujuan dari pembangunan UPS ini sudah baik.

II. Pokok Permasalahan

Pelayanan persampahan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok melalui Unit Pengolahan Sampah (UPS) mengalami permasalahan yang cukup rumit. Keberadaan UPS di setiap kecamatan memiliki masalahnya masing-masing. Namun, dalam penelitian ini, Kecamatan Sukmajaya dipilih karena dua alasan. Pertama, Kecamatan Sukmajaya merupakan daerah pemukiman yang berpotensi menghasilkan sampah rumah tangga lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya. Kedua, lahan kosong untuk pembangunan UPS jumlahnya tidak terlalu banyak dan relatif dekat dengan perumahan penduduk karena wilayah kecamatan ini memiliki kepadatan tertinggi di Kota Depok. Melihat kedua permasalahan tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah **“bagaimana kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya?”**

III. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya.

IV. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian untuk mengetahui bagaimana kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kota Depok (Studi Kasus: Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya). Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara akademis maupun secara praktis. Berikut adalah signifikansi dari penelitian ini :

1. Signifikansi Akademis

Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wacana pengetahuan dan menggambarkan kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Penelitian ini juga diharapkan dapat merangsang penelitian lebih lanjut dan dapat memberikan informasi serta alternatif literatur yang menyajikan analisis mengenai kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya pada khususnya dan Unit Pengolahan

Sampah (UPS) di Kota Depok pada umumnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu sosial.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani masalah yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, terutama persampahan.

V. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi disusun dalam lima bab, dibagi menjadi sub bab, dimana antar bab dan atau sub bab lainnya merupakan satu kesatuan dan saling terkait. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian ini dilakukan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Kerangka Pemikiran

Bab ini berisi mengenai kerangka teori yang menjadi landasan teori penulisan skripsi, untuk menyusun kerangka pikir penelitian, metode penelitian, dan pembahasan.

Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, adapun metode penelitian yang dipakai relevan dan sesuai tema yang diangkat. Metode penelitian dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai alur pikir penelitian, data yang dipakai, sumber data hingga teknik pengolahan data yang dilakukan.

Bab 4 : Gambaran Umum tentang Objek Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan riwayat mengenai pembuatan hingga pelaksanaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) tersebut. Serta mendeskripsikan pula mengenai lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

Bab 5 : Analisis dan Pembahasan

Bab ini memaparkan dan menganalisis hasil penelitian mengenai kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Bab 6 : Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan sejumlah simpulan dan saran. Simpulan berupa rumusan ulang dan jawaban singkat atas pokok permasalahan sedangkan saran merupakan masukan bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KERANGKA TEORI

Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, kerangka teori, model penelitian, dan operasionalisasi konsep. Tinjauan pustaka, menguraikan perbandingan dan referensi penelitian serupa yang pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Sementara kerangka teori, menguraikan konsep pelayanan publik, kinerja, dan pengukuran kinerja. Kemudian, model penelitian menjelaskan dimensi-dimensi serta indikator-indikator yang dipakai dalam penelitian ini. Penjabaran dimensi dan indikator tersebut kemudian disajikan dalam operasionalisasi konsep.

II.1 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian dan kajian ilmiah terdahulu serta konsep yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan pustaka pertama adalah disertasi dengan judul Kinerja Birokrasi Daerah dalam Pelayanan Masyarakat (Pendekatan Dinamika Sistem dalam Kasus Transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor) oleh Rahmat Salam pada tahun 2003. Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk membahas, mengkaji, dan menganalisis dinamika sistem kebijakan dan kinerja birokrasi daerah (Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kota Bogor) dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, serta menemukan solusi alternatif untuk meningkatkan kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi di lingkungan Pemda Kabupaten dan Kota Bogor.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan analisis sistem dinamik yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Desain penelitian sistem dinamik secara substantif mengukur kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda melalui metode sistem dinamik dan permodelan. Untuk itu diperlukan pendekatan dan mekanisme penelitian dengan mempertimbangkan sifat dinamik yang berubah mengikuti perkembangan waktu. Model sistem dinamik ini melihat

pola kecenderungan sistem berdasarkan analisis sistem dinamik yang nyata dan sangat penting

Hasil penelitian tersebut menunjukkan kinerja birokrasi daerah masih bergerak positif, walaupun dengan kinerja yang lemah. Lemahnya kinerja birokrasi daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor internal birokrasi daerah itu sendiri, seperti lemahnya kemampuan SDM, lemahnya koordinasi antar dan antara birokrasi daerah dengan berbagai jajaran terkait di Kabupaten dan Kota Bogor; melainkan juga oleh faktor eksternal, yaitu populasi penduduk yang semakin besar, jumlah lahan yang terbatas untuk pembangunan jalan, serta faktor sosial dalam pelayanan transportasi seperti disiplin para sopir dan pengelola angkutan umum, budaya pedagang kaki lima dan pengelolaan pasar dan sebagainya. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian yang pertama bahwa sistem dinamik hubungan faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk kinerja birokrasi daerah saling terkait, saling berinteraksi, saling mempengaruhi secara positif atau negative sedangkan jawaban pertanyaan penelitian kedua adalah bahwa kebijakan birokrasi daerah terbaik dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, antara lain dengan mencegah urbanisasi, pemerataan pembangunan, termasuk mengubah desa menjadi kota, sehingga penduduk tidak lagi harus datang ke kota.

Untuk tinjauan pustaka kedua adalah disertasi dengan judul Kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pendekatan System Thinking dan System Dynamic oleh Azhari Aziz S. pada tahun 2008. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah dan mengkaji kinerja organisasi serta mengidentifikasi dan menganalisis model dan mekanisme pengukuran kinerja yang digunakan selama ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, untuk mengetahui alternatif pengukuran kinerja organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, sehingga dapat diketahui dimensi yang paling mempengaruhi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta pada saat ini, serta untuk mengembangkan dan menghasilkan alternatif model kinerja organisasi untuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan *system thinking* melalui simulasi dinamis serta untuk mengetahui leverage tertinggi berdasarkan simulasi sampai tahun 2020.

Metode yang digunakan pada simulasi penelitian tersebut adalah *system dynamics*. *System dynamics* dikembangkan dari *system thinking*. Metode ini dipilih untuk membangun model yang akan digunakan berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan kerangka pemikiran karena persoalan kinerja organisasi Dinas Pendapatan Daerah Jakarta yang diobservasi mempunyai sifat yang dinamis dan di dalam struktur fenomenanya mengandung lebih dari satu struktur umpan balik.

Penelitian tersebut menghasilkan tiga temuan penting. Pertama, pengukuran kinerja yang dipakai selama ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta ialah menggunakan model LAKIP. Kedua, kajian terhadap alternatif pengukuran kinerja organisasi dengan menganalisis enam dimensi nonfinansial yaitu dimensi kepemimpinan, perencanaan strategik, wajib pajak sebagai pelanggan, pengelolaan pengetahuan, manajemen sumberdaya manusia dan manajemen proses. Dengan menggunakan teknik statistik *stepwise* (SPSS), diperoleh dua dimensi yaitu perencanaan strategis dan sumberdaya manusia yang mempengaruhi secara dominan kinerja organisasi. Ketiga, kajian terhadap kinerja organisasi yang menghasilkan *leverage* hingga tahun 2020. Secara umum *leverage* terletak pada kebijakan.

Tinjauan pustaka ketiga adalah tesis dengan judul Strategi Intervensi Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Membangun Partisipasi Masyarakat: Studi Tentang Pengelolaan Persampahan Pada Dinas Kebersihan Kota Kupang oleh Noce Nus Loa pada tahun 2002. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai upaya-upaya Dinas Kebersihan Kota dalam membangun partisipasi masyarakat, sehingga terwujud kerjasama yang mendukung program Kebersihan Kota.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih dimaksudkan untuk memperoleh keterangan yang mendalam tentang usaha Dinas Kebersihan Kota dalam melakukan upaya-upaya membangun partisipasi masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan lapangan (observasi).

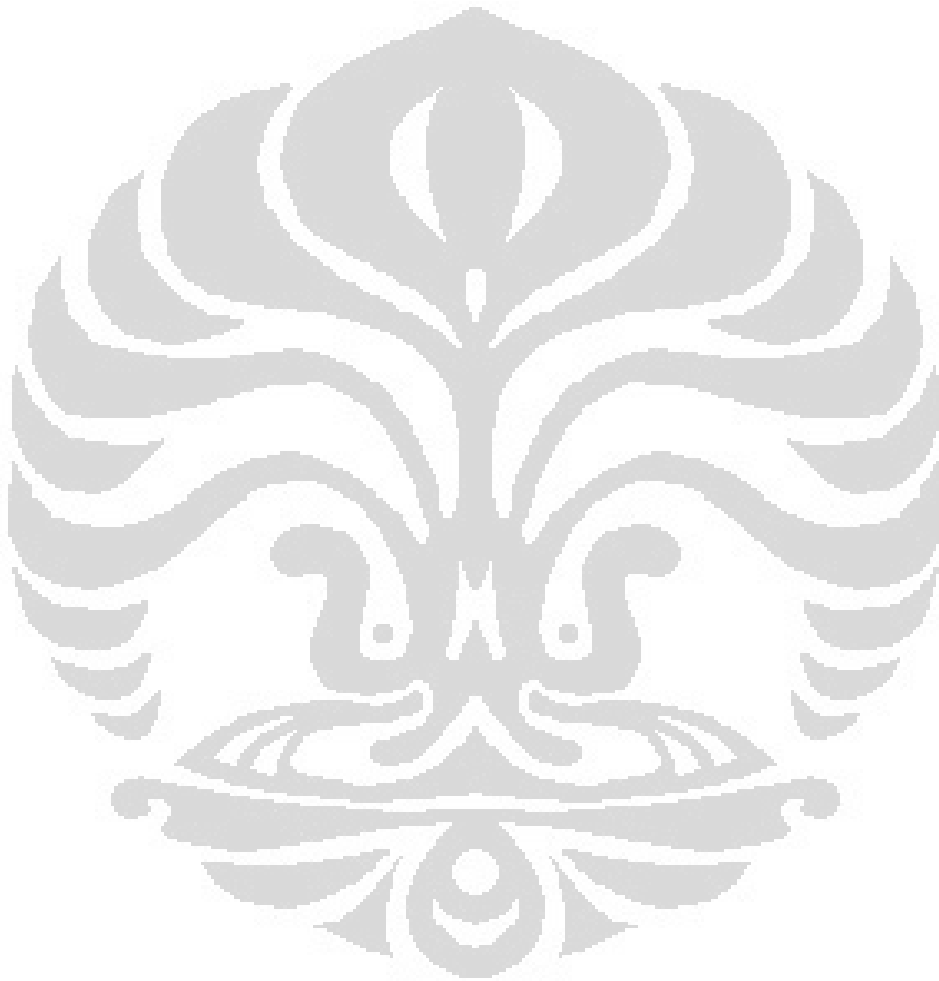
Hasil penelitian dari penelitian tersebut, didapati gambaran bahwa upaya-upaya intervensi yang bermaksud melakukan perubahan secara terencana pada

tingkat masyarakat telah dapat mendorong keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan kota. Akan tetapi, sebagai suatu strategi penyadaran, belum bisa membudaya. Oleh karena itu, tahapan-tahapan intervensi dalam strategi intervensi komunitas belum diterapkan secara menyeluruh; melalui tahapan penilaian, tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pelaksanaan (implementasi), dan tahapan evaluasi.

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah ditinjau membantu memberikan gambaran kepada peneliti setidaknya untuk dua hal: *pertama*, mengenai konsep-konsep yang dapat digunakan untuk penelitian ini dan *kedua*, mengenai posisi penelitian ini dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Terkait dengan hal pertama, penelitian ini menggabungkan beberapa konsep yang telah digunakan penelitian terdahulu, seperti konsep Niven dan Brown tentang model pengukuran kinerja, yaitu *balanced scorecard* dan kriteria *baldrige*. Seperti yang dijelaskan dalam disertasi Azhari Aziz. Namun, tidak semua dimensi dari kedua model pengukuran tersebut peneliti ambil karena disesuaikan pula dengan objek penelitian, yaitu Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian pertama berfokus pada membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang dinamika sistem kebijakan dan kinerja birokrasi daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kota Bogor. Penelitian kedua membicarakan mengenai Kinerja Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lalu, penelitian ketiga membahas tentang strategi intervensi sebagai upaya pemerintah daerah membangun partisipasi masyarakat: studi tentang pengelolaan persampahan pada Dinas Kebersihan Kota Kupang.

Penelitian ini mengombinasikan alat dan obyek dari penelitian-penelitian tersebut diatas sehingga yang dilihat adalah kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Sukmajaya. UPS ini merupakan organisasi yang menyediakan pelayanan persampahan bagi masyarakat Kota Depok, khususnya Kecamatan Sukmajaya. Selain itu, penelitian ini dibuat pada waktu yang lebih kini sehingga lebih tepat untuk dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya melakukan perbaikan. Pengukuran kinerja pada

penelitian ini adalah alat untuk menggambarkan bagaimana kinerja UPS tersebut dalam menyediakan pelayanan persampahan untuk masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjadi bahan pertimbangan yang penting bagi Pemerintah Kota Depok untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada organisasi tersebut.



Tabel 2.1
Penelitian yang Menjadi Rujukan Peneliti dalam Penelitian

	Rahmat Salam	Azhari Aziz S.	Noce Nus Loa	Siladia Grahanida
Tujuan Penelitian	<p>1. untuk membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang dinamika sistem kebijakan dan kinerja birokrasi daerah (Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kota Bogor) dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat</p> <p>2. menemukan solusi alternatif untuk meningkatkan kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi di lingkungan Pemda Kabupaten dan Kota Bogor</p>	<p>1. menelaah dan mengkaji kinerja organisasi serta mengidentifikasi dan menganalisis model dan mekanisme pengukuran kinerja yang digunakan selama ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Untuk mengetahui alternatif pengukuran kinerja organisasi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, sehingga dapat diketahui dimensi yang paling mempengaruhi kinerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta pada saat ini</p> <p>3. Untuk mengembangkan dan menghasilkan alternatif model kinerja organisasi untuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan <i>system thinking</i> melalui simulasi dinamis serta untuk mengetahui leverage tertinggi berdasarkan simulasi sampai tahun 2020.</p>	<p>untuk mengetahui secara jelas mengenai upaya-upaya Dinas Kebersihan Kota dalam membangun partisipasi masyarakat, sehingga terwujud kerjasama yang mendukung program Kebersihan Kota</p>	<p>untuk mengetahui gambaran serta menganalisis kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya</p>
Pendekatan Penelitian	Kuantitatif dan Kualitatif	Kuantitatif dan Kualitatif	Kualitatif	Kuantitatif
Jenis Penelitian	Eksplanasi	Eksplanasi	Deskriptif	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Observasi, Penyebaran Angket/Kuesioner, Wawancara, serta Pengumpulan dan Pemilihan Data Sekunder	Studi Dokumentasi, Kuesioner, Pedoman Wawancara, Sumber Informasi, Populasi dan Sampel, Pengukuran dan Pengamatan Variabel, Dimensi dan Variabel, Teknik Analisis Data, Pemodelan <i>System Dynamics</i>	Studi Kepustakaan, Wawancara, Dan Pengamatan Lapangan (observasi)	Wawancara, Survei, Observasi, Survei, dan Studi Kepustakaan
Hasil Penelitian	1. sistem dinamik hubungan faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk kinerja birokrasi daerah saling terkait , saling	1. Pengukuran kinerja yang dipakai selama ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta ialah menggunakan model	Upaya-upaya intervensi yang bermaksud melakukan perubahan secara terencana pada tingkat masyarakat telah dapat mendorong	Kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok masih buruk karena penilaian pada

	<p>berinteraksi, saling mempengaruhi secara positif atau negatif</p> <p>2. kebijakan birokrasi daerah terbaik dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, antara lain dengan mencegah urbanisasi, pemerataan pembangunan, termasuk mengubah desa menjadi kota, sehingga penduduk tidak lagi harus datang ke kota.</p>	<p>LAKIP</p> <p>2. Dengan menggunakan teknik statistik <i>stepwise</i> (SPSS), diperoleh dua dimensi yaitu perencanaan strategis dan sumberdaya manusia yang mempengaruhi secara dominan kinerja organisasi</p> <p>3. Kajian terhadap kinerja organisasi yang menghasilkan <i>leverage</i> hingga tahun 2020. Secara umum <i>leverage</i> terletak pada kebijakan.</p>	<p>keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kebersihan kota. Akan tetapi, sebagai suatu strategi penyadaran, belum bisa membudaya. Oleh karena itu, tahapan-tahapan intervensi dalam strategi intervensi komunitas belum diterapkan secara menyeluruh; melalui tahapan penilaian, tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pelaksanaan (implementasi), dan tahapan evaluasi.</p>	<p>dimensi manajemen proses, finansial, dan hasil masih menunjukkan belum optimalnya kinerja UPS tersebut. Meskipun demikian, dimensi kepemimpinan sudah mampu menunjukkan kinerja yang baik. Sebagian besar hal yang membuat kinerja UPS di Kecamatan Sukmajaya ini masih buruk berasal dari faktor eksternal, seperti jumlah sampah yang tidak sebanding dengan kemampuan UPS.</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Di olah oleh Peneliti

II.2. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian mengenai **Kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kota Depok (Studi Kasus: Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya)**, peneliti memaparkan beberapa teori-teori yang menjadi pondasi dalam membahas hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam menyusun berbagai temuan-temuan yang didapat dan dikaitkan dengan teori-teori yang menjadi landasan dalam proses penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijelaskan dalam sub bab dibawah ini.

II.2.1 Pelayanan Publik

Pelayanan publik berhubungan dengan pelayanan yang masuk kategori sektor publik, bukan sektor privat. Pelayanan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD). Ketiga komponen yang menangani sektor publik tersebut menyediakan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, kemandirian dan ketertiban, bantuan sosial, dan penyiaran (Wilson, 1993, dalam Nurcholis, 2005, hal. 287). Dengan demikian, pelayanan publik merupakan pelayanan yang

diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Hal senada disampaikan pula oleh Humphreys (1998) "*public services are defined as those services which are mainly, or completely, funded by taxation.*" Artinya, bahwa pelayanan publik merupakan layanan yang terutama atau seluruhnya didanai oleh pajak. Jadi, pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah.

Meskipun pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, namun, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pihak swasta, tetapi pembiayaan tetap dari pemerintah dan tetap diatur oleh kriteria pelayanan publik (Humphreys, 1998, hal. 7). Kriteria pelayanan publik ini berbeda dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh privat. Pelayanan publik ini menyediakan barang dan jasa publik yang memiliki karakteristik *non-rivalry* dan *non-excludability*. Artinya, penggunaannya tidak bersaing. Hal ini berarti keikutsertaan seseorang untuk mendapatkan manfaat tidak akan mengurangi manfaat yang tersedia bagi lainnya, sehingga menimbulkan keengganan konsumen untuk membayar, sedangkan *non-excludability* artinya tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian. Maksudnya, barang publik menyebabkan penggunaan barang secara bersama-sama tanpa mengurangi hak orang lain. Sebaliknya, barang privat merupakan barang yang memiliki *excludability* dan daya saing tinggi (Nurmandi, 2010, hal. 24). Manajemen antara pelayanan publik dan sektor privat pun terdapat perbedaan yang cukup signifikan.

Tabel 2.2
Perbedaan Utama Manajemen Pelayanan Publik Dan Sektor Privat

Pelayanan Publik	Sektor Privat
Undang-undang, peraturan pemerintah, aturan hukum	Program perusahaan, arahan direktur
Kebutuhan ekonomi nasional	Kebutuhan pasar
Relatif terbuka pada pemerintah dan pengambilan keputusan, menekankan keterwakilan	Relatif rahasia, menekankan kepercayaan bisnis
Berpihak pada publik, melibatkan banyak stakeholder	Fokus utama pada stakeholder dan pihak manajemen
Mempunyai nilai dan tujuan yang banyak: <ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan • Kepentingan publik • Pemerataan • Profesionalisme • Partisipasi pelanggan • Perdagangan kompleks 	Relatif terbatas
Sumber utama berasal dari pajak	Sumber utama berasal dari keuntungan dan pinjaman

Sumber: Holtam, dalam Willcoeks & Harrow, 1992, dalam Nurmandi, 2010, hal. 31

Perbedaan pelayanan publik dengan pelayanan privat juga diungkapkan oleh Humphreys (1998), bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan non-komersial atau tidak mencari keuntungan sehingga penyediaan pelayanan publik ini kurang ada kompetisi untuk berusaha menarik pelanggan. Pelayanan publik ini seringkali merupakan monopoli dan oligopoli. Selain itu, terdapat peraturan dasar yang mengatur pelayanan publik ini. Di Indonesia, peraturan yang mendasari pelayanan publik adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

Dalam penyediaan pelayanan publik, selain dapat bekerja sama dengan pihak swasta, pemerintah juga dapat melakukannya melalui perusahaan milik pemerintah –yang manajemennya terpisah dari pemerintah. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak sanggup untuk menyediakan seluruh pelayanan publik. Ada pelayanan yang tidak dibebankan biaya ke konsumen (masyarakat), seperti jalan, pemadam kebakaran, dan pelayanan kemanan dari polisi. Tetapi terdapat pula beberapa pelayanan yang membebankan biaya ke konsumen (masyarakat),

seperti air, transportasi umum, dan listrik – dan biasanya pelayanan ini dikelola oleh perusahaan milik pemerintah (Shah, 2005, hal. 118).

Perusahaan milik pemerintah ini beroperasi terpisah dari segala kegiatan pemerintah. Masing-masing memiliki sistem keuangan sendiri dan tenaga kerja sendiri. Tetapi, tetap berada pada kontrol pemerintah. Setiap perusahaan cenderung bertanggung jawab hanya untuk satu layanan. Sebagai contoh, Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Indonesia hanya bertanggung jawab atas pelayanan listrik.

Shah (2005) juga mengungkapkan bahwa perusahaan milik pemerintah ini dapat beroperasi dalam lingkungan yang tidak ada pesaing atau yang secara terbuka bersaing dengan sektor swasta. Jenis perusahaan milik pemerintah yang pertama berarti hanya ada satu pemasok atau sering disebut dengan monopoli. Selain itu, layanan yang membutuhkan biaya infrastruktur tinggi memiliki karakteristik *natural monopoly*. Seperti layanan air dan listrik.

Perusahaan milik pemerintah dibentuk karena beberapa alasan, yaitu (Shah, 2005, hal. 120-121):

- a) Pembentukan perusahaan milik pemerintah merupakan wujud dari peraturan yang ada. Terdapat persyaratan legislatif yang menetapkan bahwa layanan tertentu harus menjadi tanggung jawab lembaga yang terpisah dari pemerintah.
- b) Perusahaan milik pemerintah bekerja lebih bebas dalam penentuan struktur penyediaan pelayanan publik.
- c) Karyawan di perusahaan milik pemerintah ini dianggap dapat bekerja lebih baik daripada politisi di pemerintahan.
- d) Perusahaan milik pemerintah dibangun sebagai salah satu cara untuk menghindari sistem yang kaku di pemerintahan.
- e) Perusahaan milik pemerintah lebih disukai karena menghasilkan keuntungan bagi pemerintah terkait.
- f) Pembentukan perusahaan milik pemerintah ini membuka lapangan pekerjaan.

- g) Persepsi dari pemerintah dan masyarakat bahwa perusahaan milik pemerintah ini lebih efisien dan akuntabel dalam beroperasi karena segala kegiatannya lebih seperti sektor bisnis.

Organisasi penyedia pelayanan publik ini, baik pemerintah maupun swasta, memiliki otonomi untuk mengelola organisasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pengambil kebijakan. Bila pada penyedia layanan milik pemerintah, seperti departemen atau dinas, maka aturan yang harus dipatuhi adalah peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Sebaliknya, penyedia layanan milik swasta memiliki mekanisme organisasi yang lebih longgar dan dinamis karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan. Kinerja organisasi penyedia pelayanan publik ini dapat diukur oleh organisasi itu sendiri dan oleh penerima pelayanan publik

Dalam konteks negara yang sedang berkembang, kriteria-kriteria kualitas pelayanan publik selain bersifat mikro, juga bersifat kontekstual (makro). Bersifat mikro adalah parameter-parameter yang dikembangkan dari perspektif individu yang menerima pelayanan. Sedangkan yang bersifat makro lebih mengacu kepada keadilan alokasi pelayanan publik, distribusi pelayanan publik, hubungan yang kompleks antara organisasi pelayanan dengan lingkungannya.

Peneliti-peneliti lain menggunakan kriteria-kriteria yang hampir sama dan saling menggantikan satu sama lain. Secara garis besar parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi jasa dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna jasa.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat kinerja pelayanan publik dari perspektif pemberi jasa, yaitu organisasi publik. Jadi, penelitian ini melihat bagaimana kinerja sebuah organisasi publik dalam menyediakan layanan bagi masyarakat. Pelayanan publik dalam penelitian ini fokus pada pelayanan perkotaan untuk pemukiman, yaitu persampahan.

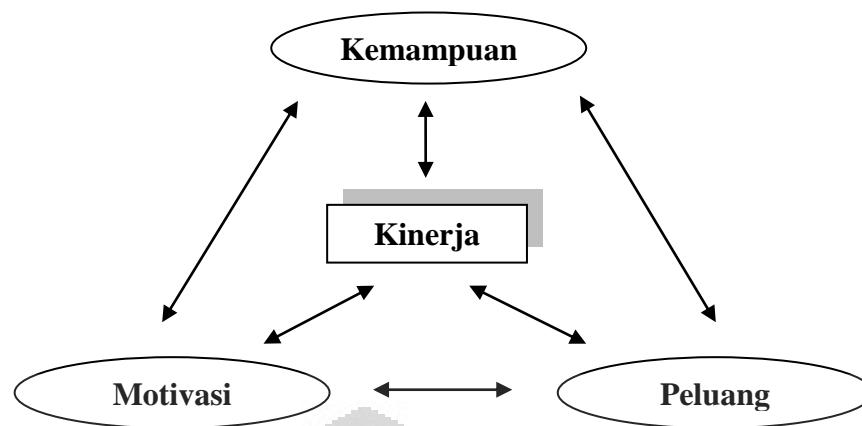
II.2.2 Kinerja

Pengertian kinerja yang paling sederhana adalah sebagai berikut
“performance is defined as managing public programs for outcomes. Managers

use public resources and mandates to ensure that their programs meet public objectives and expectations.” Artinya, kinerja merupakan hasil dari suatu program publik, dan bagaimana seorang manajer -dalam hal ini adalah pemerintah- menggunakan sumber daya publik untuk memastikan bahwa program tersebut telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Kearney & Berman, 1999, hal. 1). Hal senada juga disampaikan oleh Fahmi (2010), bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat *profit oriented* maupun *non profit oriented* yang dihasilkan selama satu periode waktu tertentu. Secara lebih tegas, Amstrong dan Baron (1998, dalam Fahmi, 2010, hal. 3) mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.

Pengertian berikutnya disampaikan oleh Mardiasmo (2006), yaitu kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya (Hersey & Blanchard, 1993 dalam Rivai & Basri, 2005, hal. 15).



Gambar 2.1

Dimensi Kinerja

Sumber: Rivai & Basri, 2005, hal. 16

Konsep kinerja ini memiliki konsep penilaian. Hal ini diungkapkan oleh Halligan, Bouckaert, dan Dooren (2010) *“The other dimension of the concept “performance” contain a value judgement. Performance has a quality that can be either high or low. First, when performance is about the quality of the actions, and not as much about the quality of the achievement, performance is conceptualized as competence or capacity. Under the assumption that a highly competent performer will be more likely to generate more and better quality output from an activity most of the time, performance becomes associated with the competence of the performing institution. There is a substantial literature on high performing public sector organizations and governments that roughly equals performance with superior capacity of the performing institution. Second, when performance is about the quality of the achievement and not as much about the quality of the actions, performance equals results. The capacity of the organization is not the focus of this conceptualization. The opinion that only results matter is emblematic for this position. Below, it is argued that results may be both the outputs and the outcomes of the public sector. Finally, when performance is conceptualized with attention for both the quality of actions and the quality of achievement, it may be typified as sustainable results.”*

Maksud dari pengertian Halligan, Bouckaert, dan Dooren (2010) adalah kinerja bisa memiliki kualitas yang tinggi atau rendah. Hal ini dapat dilihat dari

penilaian kinerja. Pertama, kinerja dinilai dari proses. Konsep dari kinerja ini adalah kompetensi dan kapasitas. Asumsinya bahwa seorang yang sangat kompeten memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menghasilkan output yang lebih baik. Kedua, kinerja dinilai dari hasil. Kemampuan organisasi bukanlah tujuan utama dari konsep ini. Pada akhirnya, penilaian kinerja akan lebih baik apabila dinilai dengan dua konsep tersebut, sehingga tercipta hasil yang berkelanjutan.

Sementara itu, kinerja juga diartikan Rogers (1990) sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi dari organisasi. Dalam kaitannya dengan kinerja organisasi, Rogers mengungkapkan beberapa isu yang perlu untuk diperhatikan yaitu tingkat harapan yang terentang dari tujuan stratejik hingga target, kejelasan ruang lingkup akuntabilitas dan tanggungjawab, adanya kebutuhan untuk menilai dan memonitor kinerja serta tuntutan terhadap adanya sistem informasi yang handal. Isu-isu ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja organisasi yang baik.

Dengan demikian, apa yang dijelaskan oleh Rogers diatas sesungguhnya berkaitan dengan terminologi manajemen kinerja (*performance management*). Manajemen kinerja adalah usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan prestasi karyawan (Ruky, 2001).

II.2.3 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan aspek pokok dari penilaian kinerja. Pengukuran kinerja ini memberikan bukti ada atau tidaknya hasil yang diharapkan telah dicapai dan jangkauan di mana pemegang jabatan telah memproduksi hasil. Hal ini akan menjadi dasar untuk umpan balik informasi yang luas yang tidak hanya digunakan oleh manajer, tetapi juga oleh individu untuk memonitor kinerja mereka sendiri. Fokus dan isi dari pengukuran kinerja akan sangat bervariasi di antara pekerjaan dan tingkatan manajemen yang berbeda. Pengukuran kinerja akan dilakukan jika pengukuran tersebut diperoleh dari perumusan tugas utama yang jelas terfokus pada hasil akhir dan pengukuran yang disarankan. Pengukuran

kinerja boleh mengacu pada berbagai hal seperti pendapatan, penjualan, output, unit yang diproses, produktivitas, biaya-biaya, waktu penyelesaian, waktu penyerahan barang, memberi layanan, kecepatan reaksi atau perputaran, kinerja standar kualitas atau reaksi pelanggan (Rivai & Basri, 2005, hal. 93-95).

Pengukuran kinerja memiliki empat jenis pengukuran yang jelas, yaitu (Rivai & Basri, 2005, hal. 95):

- a) Pengukuran uang: meliputi pemaksimalan pendapatan, menghemat biaya dan meningkatkan tingkat keuntungan.
- b) Pengukuran waktu: menyatakan kinerja terhadap jadwal pekerjaan, jumlah pekerjaan yang tertunda dan kecepatan kerja atau cepat tanggap.
- c) Pengukuran efek: meliputi kinerja dari suatu standar, perubahan dalam perilaku (para rekan kerja, staf, pelanggan atau klien), penyelesaian fisik (menyangkut) pekerjaan dan tingkatan layanan.
- d) Reaksi: mengindikasikan bagaimana orang lain memegang jabatan dan karena pengukuran sasaran yang kurang. Reaksi dapat diukur oleh evaluasi acuan, tingkat kinerja oleh pelanggan atau analisis keluhan dan komentar internal atau eksternal.

Pengukuran kinerja yang sukses akan menyediakan dasar yang terbaik untuk umpan balik. Berikut adalah petunjuk untuk perumusan kinerja (Rivai & Basri, 2005, hal. 95-96):

- a) Pengukuran harus berhubungan dengan hasil, bukan usaha.
- b) Hasil harus ada dalam kendali tetap pemegang jabatan.
- c) Pengukuran harus objektif dan dapat terlihat.
- d) Data untuk pengukuran harus tersedia.
- e) Pengukuran yang ada harus digunakan atau diadaptasi jika mungkin.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002, dalam Mardiasmo, 2006, hal. 25).

Pengukuran kinerja ini pada awalnya difokuskan pada pengukuran efisiensi yang terkait dengan *inputs, outputs, dan outcomes*. Menurut Rogers (1990) pada pemahaman ini *inputs* dianggap sebagai sumber yang dipakai untuk memproduksi pelayanan. Dalam konteks ini manusia, uang, fasilitas atau sumber-sumber material lainnya diarahkan untuk meningkatkan pelayanan. *Outputs* merujuk pada pelayanan yang dihasilkan baik menyangkut tentang mutu maupun jumlah. *Outcomes* merupakan hasil pemberian pelayanan atau keuntungan yang diperoleh pengguna pelayanan. Berdasarkan konsep diatas indikator kinerja kemudian dikembangkan lebih jauh.

Whitthaker (1995, dalam Mardiasmo, 2006, hal. 25-26) menyatakan bahwa indikator kinerja perlu diukur dengan *inputs, outputs, outcomes, benefits, dan impact*. Ia memiliki pendapat bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Elemen kunci dari sistem pengukuran kinerja terdiri dari perencanaan dan penetapan tujuan, pengembangan ukuran yang relevan, pelaporan formal dan hasil serta penggunaan informasi. Metode pengukuran kinerja menurut Whitthaker meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: a) menetapkan sasaran/tujuan dan hasil yang diinginkan (perencanaan strategik); b) menentukan indikator kinerja dan selanjutnya mengukur kinerja; c) mengevaluasi kinerja dan memanfaatkan hasil evaluasi untuk memperbaiki kinerja.

Pendapat Whittaker ini merupakan awal berkembangnya pengukuran kinerja yang mengarah sama sekali mulai keluar dari konteks finansial. Dengan demikian, pada sektor publik arah pengukuran mulai berkembang pada indikator waktu sebagai ukuran diluar finansial.

Definisi yang dibuat oleh sejumlah pakar mengenai pengukuran kinerja cukup beragam. Namun, pada akhirnya definisi-definisi tersebut bermuara kepada satu kesepakatan bahwa dengan mengukur kinerja maka proses pertanggungjawaban pengelola atas segala kegiatannya kepada stakeholder dapat menjadi lebih obyektif.

Levine, dkk (1990, dalam Tangkilisan, hal. 17) mengemukakan tiga konsep yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik,

yaitu reponsivitas (*responsiveness*), tanggungjawab (*responsibility*), dan akuntabilitas (*accountability*). Responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan dinilai semakin baik. Tanggungjawab menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang implisit atau eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai baik apabila seluruhnya, atau setidaknya sebagian besar kegiatannya, didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik.

Dari sisi organisasi publik, pengukuran kinerja dapat dipandang atas dua hal, yaitu efektivitas dan efisiensi. Konsep efektivitas untuk mengukur kinerja dapat diaplikasikan pada institusi publik bila ukuran efektivitas pelayanan pada organisasi pemerintah berkaitan dengan luasnya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Sedangkan ukuran efisiensi yang dilakukan institusi pemerintah berkaitan dengan sumberdaya yang digunakan untuk memproduksi pelayanan publik sehingga menghasilkan output yang dinikmati oleh publik (Skelcher, 1992, hal. 42). Namun, untuk mengukur kinerja organisasi publik seringkali dianggap sulit karena kinerja publik harus mempertimbangkan beberapa nilai. Selain itu, periode antara input hingga output dianggap sangat panjang (Bruijn, 2007, hal. 7). Meskipun demikian, pengukuran kinerja untuk organisasi publik tetap penting untuk dilakukan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat elemen-elemen pokok yang harus diperhatikan, yaitu (Mardiasmo, 2006, hal. 26):

- a) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi

- b) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
- c) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
- d) Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas)

Pengukuran kinerja menurut Epstein (1988, hal. 125) dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Epstein menambahkan, dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja yang dilakukan secara internal dan merupakan alat untuk mengetahui tingkat responsibilitas dari suatu kegiatan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Disamping itu pengukuran kinerja secara internal bertujuan untuk mengungkapkan tingkat keberhasilan organisasi yang dijadikan dasar inferensi dalam menentukan tingkat kinerja organisasi tersebut. Pengukuran kinerja organisasi publik secara eksternal bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan publik atau paling sedikit untuk mengetahui keinginan publik, sebagaimana dijelaskan oleh Stewart (1988, hal. 49); ..”*in the work of performance review committees, performance is often discussed without any input from the public, as though performance was a purely organizational issue*”. Hal ini menjelaskan bahwa pengukuran kinerja organisasi publik sangat penting untuk mengetahui keinginan masyarakat.

Melihat penjelasan diatas terlihat bahwa pengukuran kinerja semakin mengarah ke hal-hal yang bersifat *non-financial*. Untuk melihat pengukuran kinerja secara internal dan eksternal ini dapat melalui berbagai model pengukuran kinerja. Seperti model pengukuran kinerja yang saat ini banyak digunakan, yaitu *balanced scorecard*. *Balanced scorecard* membantu organisasi dalam menangani dua isu kunci, yaitu pengukuran kinerja organisasi dan menerapkan strategi yang efektif (Niven, 2001, hal. 3). Konsep *balanced scorecard* ini dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990. *Balanced scorecard* ini digambarkan sebagai seperangkat tindakan yang berasal dari strategi organisasi. Langkah-langkah yang dipilih untuk *scorecard* merupakan alat bagi pemimpin untuk berkomunikasi dengan karyawan dan stakeholder eksternal, serta mendorong peningkatan kinerja bagi organisasi terutama untuk mencapai tujuan (Niven, 2001, hal. 12). *Balanced scorecard* ini dapat digunakan sebagai sistem pengukuran, sistem manajemen strategi, dan alat komunikasi.

Balanced scorecard sebagai sistem pengukuran ini berawal dari tidak efektifnya indikator finansial sebagai pengukuran kinerja. Melalui *balanced scorecard*, pengukuran kinerja tidak hanya dilihat dari perspektif finansial, tetapi dilihat pula perspektif lainnya, yaitu pelanggan, *internal processes*, dan *learning* dan *growth*. Semua langkah langkah dalam *balanced scorecard* merupakan interpretasi dari strategi organisasi karena fokus utamanya adalah visi dan strategi, bukan finansial (Niven, 2001, hal. 13).

Ketika memilih ukuran untuk perspektif pelanggan pada *balanced scorecard*, organisasi harus menjawab dua pertanyaan utama, yaitu, siapa target pelanggan kita? Dan apa nilai proposisi organisasi dalam melayani pelanggan? (Niven, 2001, hal. 15). Pertanyaan ini terlihat mudah, tetapi terdapat tantangan bagi organisasi untuk menjawabnya. Kebanyakan organisasi menganggap bahwa mereka benar-benar telah menentukan target pelanggannya, namun tindakan yang dilakukan lebih memperlihatkan strategi “semua hal untuk semua pelanggan”. Sedangkan nilai proposisi organisasi menunjukkan kekhasan organisasi tersebut dibandingkan dengan kompetitornya.

Niven (2001, hal. 15-16) mengungkapkan, bahwa *internal process* dalam *balanced scorecard*, lebih diidentifikasi pada proses kunci dalam organisasi yang dapat menambah keunggulan sehingga dapat menambah pula nilai bagi pelanggan dan juga *shareholders*. Dalam perspektif *internal process* ini, tugas utama organisasi adalah mengidentifikasi proses dan mengembangkan langkah-langkah terbaik untuk memantau kemajuan organisasi tersebut. biasanya dapat dilihat dari pengembangan produk, proses produksi, manufaktur, dan layanan purna jual.

Sedangkan perspektif *learning* dan *growth* merupakan penghubung dari tiga perspektif lainnya. Pada dasarnya, empat perspektif dalam *balanced scorecard* ini saling berhubungan satu sama lain. Melalui perspektif pelanggan dan *internal process*, organisasi dapat melihat kesenjangan-kesenjangan yang terjadi sehingga dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat menjembatani kesenjangan tersebut (Niven, 2001, hal. 16).

Balanced scorecard ini merupakan contoh dari pengukuran kinerja organisasi yang linear dan secara internal. Untuk pengukuran kinerja yang

memiliki hubungan dinamis, dapat menggunakan kriteria baldrige. Disebut hubungan dinamis karena terdapat hubungan antar kategori dimana setiap kategori diukur melalui variabel-variabel tertentu. Kriteria berfokus pada dimensi yang saling berhubungan secara integral dan berhubungan secara dinamis. Kriteria baldrige ini meliputi kepemimpinan; rencana strategis; fokus pada pelanggan; pengukuran, analisis, dan *knowledge management*; fokus pada kekuatan kerja; manajemen proses; dan hasil.

Model-model pengukuran kinerja diatas tidak hanya dapat dipakai untuk sektor privat, tetapi dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja sektor publik, terutama dalam kinerja penyediaan pelayanan publik. Penggunaan model-model tersebut diharapkan dapat membuat kinerja sektor publik semakin meningkat. Pengukuran kinerja yang lebih baik pada sektor publik ini terkait dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik yang memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

II.3 Model Penelitian

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil yang dicapai dari sebuah program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Kinerja ini dapat diukur melalui perumusan indikator-indikator kinerja. Indikator kinerja ini dibuat menyesuaikan dengan tujuan dari program, kegiatan, atau kebijakan tersebut.

Teori kinerja yang peneliti gunakan adalah teori dari Kearny dan Berman. Kearny dan Berman mendefinisikan kinerja sebagai hasil dari suatu program publik, dan bagaimana seorang manajer -dalam hal ini adalah pemerintah- menggunakan sumber daya publik untuk memastikan bahwa program tersebut telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Objek dari penelitian ini adalah kinerja dari Unit Pengolahan Sampah (UPS) sebagai organisasi yang menyediakan pelayanan persampahan. Kinerja dari Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini diukur dengan menetapkan indikator-indikator kinerja. Penetapan indikator-indikator kinerja ini, peneliti menggunakan perbandingan dua model pengukuran kinerja, yaitu *balance scorecard* dan kriteria *baldrige*.

Tabel 2.3

Perbandingan 2 Model Pengukuran Kinerja

<i>Balance Scorecard</i>	Kriteria Baldrige
• <i>Financial</i>	• <i>Leadership</i>
• <i>Customer Focus</i>	• <i>Strategic Planning</i>
• <i>Internal Process</i>	• <i>Customer Focus</i>
• <i>Learning and Growth</i>	• <i>Measurement, Analysis, and Knowledge Management</i>
	• <i>Workforce Focus</i>
	• <i>Process Management</i>
	• <i>Results</i>

Sumber: Niven, 2001, hal. 13 dan Brown, 2009, hal. 6-7

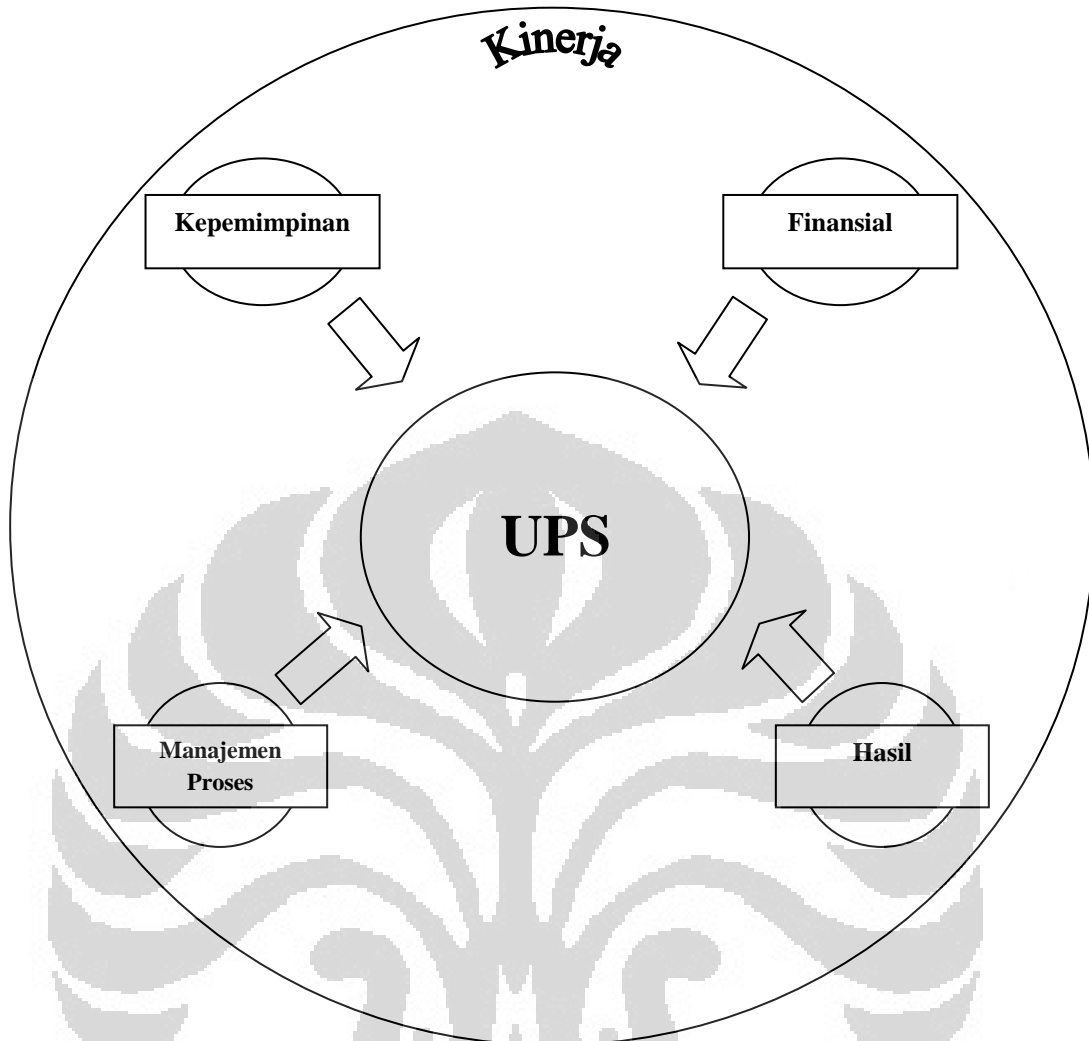
Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan kriteria di masing-masing model. Secara lebih mudah, persamaan dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Dimensi Kinerja Organisasi Menurut Teori dan Konsep

No.	Dimensi	<i>Balanced Scorecard</i>	Kriteria Baldrige
1.	<i>Finansial</i>	v	-
2.	<i>Customer Service</i>	v	v
3.	<i>Process Management</i>	v	v
4.	<i>Learning, analysis, dan knowledge management</i>	v	v
5.	<i>Leadership</i>	-	v
6.	<i>Strategic Planning</i>	-	v
7.	<i>Workforce Focus</i>	-	v
8.	<i>Result</i>	-	v

Sumber: Niven, 2001, hal. 13 dan Brown, 2009, hal. 6-7

Merujuk pada tabel 2.4 diatas, dimensi yang dimanfaatkan peneliti dalam penelitian ini adalah konsep dari Niven dan Brown. Namun, tidak semua dimensi di ambil karena disesuaikan pula dengan objek penelitian, yaitu Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Dimensi yang digunakan meliputi manajemen proses, kepemimpinan, finansial, dan hasil. Dimensi-dimensi ini diturunkan kembali menjadi indikator-indikator yang lebih spesifik. Peneliti menyimpulkan bahwa kinerja organisasi dapat dinilai baik atau buruk melalui analisis dimensi-dimensi yang telah ditentukan diatas. Dimensi manajemen proses, kepemimpinan, finansial, dan hasil dipilih karena dianggap telah mewakili penilaian kinerja penyedia pelayanan, sehingga *customer service*, *learning, analysis, dan knowledge management* tidak dipilih. Selain itu, UPS, sebagai objek penelitian tidak memiliki *strategic planning* dan *workforce focus* sehingga kedua dimensi tersebut tidak digunakan.



Gambar 2.2

Dimensi-dimensi dalam Pengukuran Kinerja

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memfokuskan diri pada pengukuran kinerja model kriteria baldrige dan *balance scorecard* dan tidak juga menggunakan sistem kerjanya, tetapi berupaya memanfaatkan dimensi-dimensi yang ada. Dimensi-dimensi dimaksud dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:

a. Manajemen Proses

Dimensi manajemen proses ini dipilih dalam mengukur kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) karena Peneliti bermaksud untuk menilai proses terbentuk hingga terlaksananya UPS. Selain itu, Peneliti juga ingin mengetahui

proses pelayanan yang dilakukan oleh UPS, khususnya UPS di Kecamatan Sukmajaya.

Dalam perspektif *balance scorecard* manajer harus mengidentifikasi proses-proses peningkatan nilai bagi pelanggan dan tujuan peningkatan nilai bagi pemegang saham. Rantai nilai yang merupakan istilah yang sering digunakan pada *balance scorecard* menggunakan rantai nilai proses bisnis internal yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu proses inovasi, proses operasional dan proses pelayanan (Gaspærzs, 2002, hal 12). Proses inovasi yang digunakan adalah identifikasi kebutuhan pelanggan masa kini dan masa mendatang serta mengembangkan solusi baru untuk kebutuhan pelanggan, sedangkan proses operasional digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan dan proses operasional, pengembangan solusi dalam proses operasional, peningkatan efisiensi pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan, pelayanan tepat waktu, pemendekan waktu layanan sehingga pelayanan dimaksud dapat memuaskan pelanggan, dan proses pelayanan berkaitan dengan pelanggan.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat merupakan sebuah kunci terciptanya kinerja organisasi yang baik (Brown, 2009, hal. 18). Oleh karenanya, peneliti menggunakan dimensi kepemimpinan sebagai salah satu indikator dalam pengukuran kinerja organisasi. Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya (Rivai, 2007, hal. 2).

Secara lebih lengkap, Howell dan Costley (2001, hal. 4-5) mengungkapkan lima karakteristik inti dalam definisi kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan merupakan proses atau serangkaian kegiatan yang sistematis yang diarahkan ke pencapaian tujuan organisasi. Kedua, tindakan para pemimpin dirancang untuk mempengaruhi perubahan tingkah laku orang lain, atau biasa disebut dengan pengikut. Pengikut ini memiliki peran penting dalam proses kepemimpinan karena tanpa adanya pengikut maka tidak akan ada yang memimpin. Ketiga, meskipun serangkaian kegiatan dilakukan lebih dari satu orang, namun terdapat satu orang yang harus memenuhi peran sebagai pemimpin.

Keempat, para pengikut melihat pemimpin yang mempengaruhi perilaku mereka sebagai tindakan yang sah dan masuk akal, serta dapat dibenarkan. Dan yang kelima, pengaruh yang dilakukan oleh pemimpin ini mengarah pada pencapaian tujuan organisasi.

Selanjutnya, kepemimpinan ini memiliki berbagai model yang diungkapkan oleh beberapa pakar. Salah satu model kepemimpinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah model kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard (1984, dalam Howell & Costley, 2001, hal. 41-42). Hersey dan Blanchard mengembangkan efektifitas model kepemimpinan dengan mengkombinasikan model pemimpin yang berorientasi tugas dan model pemimpin yang berorientasi hubungan.

c. Finansial

Dimensi finansial dijadikan sebagai salah satu dimensi dalam mengukur kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini karena Peneliti ingin menilai seberapa jauh UPS, khususnya UPS di Kecamatan Sukmajaya mampu memanfaatkan sumber daya finansial yang ada.

Metode pengukuran kinerja secara finansial ini dengan cara melihat laporan keuangan yang digunakan untuk suatu kegiatan organisasi. Pada organisasi bisnis, biasanya ukuran finansial dilihat melalui keuntungan yang diperoleh (Niven, 2001, hal. 6). Namun, Kaplan dan Norton (Kaplan & Norton, 2001, hal. 121) mengingatkan bahwa tujuan finansial bukan ukuran yang memadai bagi organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah perlu mengukur keberhasilannya melalui kemampuan mengatur pengeluaran sejumlah anggaran dan dapat meningkatkan kinerja dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atau berfokus pada pelayanan publik. Dalam penelitian ini, ukuran finansial lebih melihat ke besaran anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok untuk Unit Pengolahan Sampah (UPS), serta bagaimana Unit Pengolahan Sampah (UPS) tersebut mengelola anggarannya sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang memuaskan kebutuhan masyarakat Kota Depok.

d. Hasil

Penggunaan dimensi hasil pada pengukuran kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini karena Peneliti ingin menilai seberapa jauh kemampuan UPS

dalam memberikan pelayanan persampahan serta penilaian dampak secara langsung maupun tidak langsung yang terjadi setelah UPS ini berjalan.

Dimensi hasil kerja ini meliputi empat hal penting, yaitu *product outcomes*, *customer-focused outcomes*, *financial and market outcomes*, dan *workforce-focused outcomes* (Brown, 2009, hal. 44-49). Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil dua hal yang dianggap sesuai untuk mengukur kinerja objek penelitian, yaitu *product outcomes* dan *customer-focused outcomes*. Pada *product outcomes* ditekankan pada hasil dari sebuah barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Melalui *product outcomes* ini terlihat kualitas dari barang atau jasa tersebut. Selain itu, melalui *product outcomes* ini, dapat dilihat dampaknya yang ditimbulkan, serta sejauh mana tujuan dari produk ini dapat tercapai. Sedangkan *customer-focused outcomes* melihat dari segi penilaian masyarakat terhadap barang atau jasa yang diberikan. *Financial and market outcomes* dan *workforce-focused outcomes* tidak digunakan karena cenderung lebih cocok untuk organisasi privat.

Tabel 2.5
Matriks Pengembangan Instrumen

Konsep	Variabel	Kategori	Dimensi	Indikator	Skala	Sumber Data	
						Data Primer	Data Sekunder
Kinerja	Kinerja	- Baik - Buruk	Manajemen Proses	1. Proses inovasi (Gaspærzs, 2002) a. Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat b. Ketepatan solusi dalam pelayanan persampahan 2. Proses operasional (Gaspærzs, 2002) a. Kesesuaian tugas b. Proses pengolahan sampah yang efektif dan efisien 3. Proses pelayanan (Gaspærzs, 2002) a. Peningkatan cakupan pelayanan persampahan b. Kemampuan menanggapi komplain	Ordinal	Wawancara	Studi Kepustakaan
			Kepemimpinan	1. <i>Task-oriented</i> (Hersey & Blanchard, 1984, dalam Howell & Costley, 2001): a. Kesesuaian perilaku pemimpin		Ordinal	Survei

			<p>dengan etika dan nilai yang berlaku</p> <p>b. Kemampuan menciptakan budaya organisasi yang mempertahankan nilai-nilai sebagai organisasi yang terus tumbuh dan berkembang</p> <p>c. Kemampuan pemimpin dalam mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan</p> <p>2. <i>Relationship-oriented</i> (Hersey & Blanchard, 1984, dalam Howell & Costley, 2001):</p> <p>a. Tercipta komunikasi dengan bawahan (Brown, 2009)</p> <p>b. Terjalin kerja sama (Brown, 2009)</p> <p>c. Memberikan kesempatan bawahan untuk berkembang (Brown, 2009)</p>		Survei	
					Survei	
					Survei	
					Survei	
		Finansial	<p>1. Anggaran pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS)</p> <p>2. Anggaran operasional Unit Pengolahan Sampah (UPS)</p>	Ordinal	Wawancara	Studi Kepustakaan
					Wawancara	Studi Kepustakaan
		Hasil	<p>1. <i>Product outcomes</i> (Brown, 2009)</p> <p>a. Terbangunnya tempat pengolahan</p>	Ordinal	Wawancara	Studi

				<p>sampah</p> <p>b. Kapasitas mesin pengolahan sampah</p> <p>c. Kualitas hasil produk Unit Pengolahan Sampah (UPS)</p> <p>d. Penurunan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)</p> <p>e. Penciptaan lapangan pekerjaan baru</p> <p>2. <i>Customer-focused Outcomes</i> (Brown, 2009)</p> <p>a. Penilaian masyarakat</p>	<p>Observasi</p> <p>Wawancara Observasi</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara</p> <p>Wawancara Observasi</p>	<p>Kepustakaan</p> <p>Studi Kepustakaan</p> <p>Studi Kepustakaan</p> <p>Studi Kepustakaan</p>
--	--	--	--	--	---	---

Sumber: Di olah oleh Peneliti

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, batasan penelitian, populasi dan sampel, serta analisis data deskriptif. Pendekatan Penelitian, menguraikan pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Jenis Penelitian, menguraikan jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu penelitian. Teknik pengumpulan data menjelaskan mengenai cara-cara peneliti dalam memperoleh data, yaitu melalui wawancara, survei, observasi, studi kepustakaan, dan informan atau pihak-pihak yang dipilih menjadi narasumber dalam penelitian ini. Batasan Penelitian, menguraikan tentang penjelasan mengenai batasan penelitian yang disusun. Populasi dan sampel menjabarkan sasaran dan jumlah responden. Dan yang terakhir, analisis data deskriptif menjelaskan proses analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang akan dilakukan.

III.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Neuman (2003, hal. 110) pendekatan kuantitatif merupakan pola pikir yang berangkat dari ide yang umum ke ide yang lebih spesifik. Pendekatan kuantitatif ini mendasarkan konsep teori pada asumsi-asumsi dasar ilmu sosial seperti ontologi (hakekat dasar dari realita sosial), epistemologi (hakekat dasar ilmu pengetahuan), hakekat dasar manusia, dan aksiologi (tujuan dilakukannya penelitian) (Malo, 1985, hal. 36).

Menurut Neuman (2003, hal. 71), peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif memandang ilmu sosial sebagai: *“an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behavior in order to discover and confirm a set of probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of human activity”*. Artinya, dengan pendekatan kuantitatif, peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep untuk mengkaji topik

yang menjadi tema penelitian ini. Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini dikarenakan Peneliti menggunakan teori dan konsep sebagai dasar dalam mengukur kinerja dari objek penelitian, yaitu Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Sukmajaya.

III.2 Jenis Penelitian

Terdapat beberapa pembagian tipe penelitian yaitu berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan dimensi waktu. Berdasarkan tujuannya, terdapat tiga tujuan yang paling umum dari penelitian sosial, yaitu *exploration*, *description*, dan *explanation*. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk menggambarkan masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur (Sangadji & Sopiah, 2010, hal. 21). Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha untuk menggambarkan kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Penelitian deskriptif menurut Cooper (2007, dalam Sangadji & Sopiah, 2010, hal. 21) adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan bersifat akademis. Peneliti berharap penelitian mengenai kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini dapat digunakan sebagai sumber dari sebagian besar gagasan yang bersifat ilmiah (Neuman, 2003, hal. 21). Artinya, hasil yang diperoleh kelak dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi pemerintah terkait dalam memperbaiki kualitas pelayanannya. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross-sectional* atau penelitian yang dilakukan dalam durasi waktu tertentu. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005, hal. 45) dalam penelitian *cross sectional*, penelitian dilakukan dalam satu waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan.

III.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik penelitian untuk mencari dan menentukan informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara objektif (Malo & Trisnoningtas, 2003, hal. 201). Dalam usaha mengumpulkan menganalisis masalah, peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut:

III.3.1 Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap responden agar mendapat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam pelaksanaannya, teknik wawancara dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu wawancara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa setting pertanyaan yang pasti.. Sedangkan wawancara yang terstruktur adalah wawancara yang menggunakan instrumen wawancara, yang biasanya berupa pedoman wawancara (*interview guidance*) (Usman, 2006, hal. 96-98).

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang terstruktur, yaitu dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga hasil wawancara dapat digunakan untuk melihat kesesuaian antara data primer dan data sekunder yang didapatkan oleh peneliti. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan Kepala Seksi Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Kepala Seksi Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Koordinator di Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kecamatan Sukmajaya, Perwakilan jurnalis dari salah satu media massa yang memantau perkembangan Unit Pengolahan Sampah (UPS), serta kepada masyarakat.

III.3.2 Survei

Survei merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/sistematis yang sama kepada banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Dalam metode survei, kuesioner adalah instrumen utama untuk mengumpulkan data (Irawan, 2006, hal. 109). Kuesioner merupakan daftar pertanyaan tertulis, yang sekaligus akan mencatat jawaban dari responden (Usman, 2006, hal. 98).

Tujuan dilaksanakannya survei ini adalah menilai dimensi kepemimpinan. Untuk mengukur dimensi kepemimpinan pada Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya peneliti akan melakukan survei kepada seluruh pekerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya yang terdiri dari UPS Merdeka II, dan UPS Sadewa. Data yang dihasilkan dari survei ini merupakan data primer yang nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai data pendukung.

III.3.3 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data/fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Penggunaan teknik ini dilakukan oleh peneliti untuk tujuan mengamati kondisi dan sistem kerja di Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kecamatan Sukmajaya. Melalui observasi ini, peneliti akan menganalisis dan membandingkan hasil wawancara maupun survei dengan fakta-fakta di lapangan.

III.3.4 Studi Kepustakaan

Penelitian ini juga didukung oleh data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan terkait penelitian ini, yang terdiri dari studi kepustakaan dokumen perencanaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) Kota Depok, laporan keuangan terkait dengan perencanaan Unit Pengolahan Sampah (UPS), peraturan perundang-undangan serta dokumen pendukung penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk

melengkapi data mengenai dimensi finansial, manajemen proses dan hasil dari Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya.

III.3.5 Informan

Pemilihan informan merupakan faktor penting karena informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi dan data yang selanjutnya akan dianalisa. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi mengenai kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya, maka peneliti menetapkan informan sebagai berikut:

- a. 1 Kepala Seksi Pengadaan Sarana Prasarana Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok.
- b. 1 Kepala Seksi Pengolahan Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok.
- c. 1 Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok.
- d. 2 koordinator Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya, yaitu UPS Merdeka II dan UPS Sadewa.
- e. Perwakilan jurnalis dari salah satu media massa yang memantau perkembangan Unit Pengolahan Sampah (UPS).
- f. 2 masyarakat di Kecamatan Sukmajaya.

III.4 Batasan Penelitian

Penelitian mengenai kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kota Depok, khususnya di Kecamatan Sukmajaya ini memiliki batasan hanya melibatkan ruang lingkup di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sehingga informan yang menjadi narasumber merupakan informan yang berada di Kota Depok dan mengetahui tentang kajian penelitian yang sedang diteliti. Batasan-batasan penelitian ini mencakup beberapa hal.

- a. Objek penelitian adalah Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yaitu UPS Merdeka II dan UPS Sadewa.

- b. Pengukuran kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini menggunakan empat dimensi, yaitu manajemen proses, kepemimpinan, finansial, dan hasil.

III.5 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan semua unit yang menjadi objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian (Usman, 2006, hal. 103). Populasi dalam penelitian ini adalah 24 pekerja Unit Pengolahan Sampah yang tersebar di UPS Merdeka II dan UPS Sadewa. Penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah *Total Sampling (Complete Enumeration)* karena jumlah populasi yang akan diteliti tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini sama dengan jumlah populasinya, yaitu 24 pekerja Unit Pengolahan Sampah yang tersebar di UPS Merdeka II dan UPS Sadewa.

III.6 Analisis Data Deskriptif

III.6.1 Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, 1982, dalam Moleong, 2006, hal. 248). Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini dimulai dengan menyiapkan instrumen penelitian, yaitu pedoman wawancara yang telah disesuaikan dengan operasionalisasi konsep. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang telah ditentukan dan mencari data-data sekunder sebagai data pendukung. Hasil wawancara kemudian dikumpulkan dan diperiksa keabsahannya yaitu dengan memadukan kesesuaian jawaban informan dengan objek kajian penelitian baru kemudian dianalisis.

III.6.2 Analisis Data Kuantitatif

Secara konseptual, analisis deskriptif merupakan metode untuk menggaambarkan data yang dikumpulkan secara sederhana. Penyajiannya dapat berbentuk tabel, atau grafik, termasuk juga perhitungan rata-rata, standar deviasi,

dan sebagainya (Usman, 2006, hal. 118). Proses analisis data kuantitatif pada penelitian ini dimulai dengan menyiapkan instrumen penelitian, yaitu kuesioner. Kemudian kuesioner ini akan disebarakan kepada sampel yang telah ditentukan. Alat bantu yang dibutuhkan untuk mengolah data statistik frekuensi dan presentase dari kuesioner tersebut menggunakan peranti lunak SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 17.0.

III.7 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan atau kendala yang ditemukan saat melaksanakan penelitian mengenai Kinerja Unit Pengolahan Sampah Kota Depok (studi kasus: Unit Pengolahan Sampah Kecamatan Sukmajaya), antara lain:

1. Keterbatasan data finansial karena pihak terkait, yaitu DKP Kota Depok tidak berkenan memberikan data finansial tersebut sehingga peneliti harus meminta data ke DPPK (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Depok. Akan tetapi, data yang diperoleh sangat umum dan tidak spesifik pada UPS di Kecamatan Sukmajaya.
2. Dokumen atau data mengenai UPS di Kecamatan Sukmajaya, yaitu UPS Merdeka II dan UPS Sadewa sangat minim sehingga sedikit menghambat analisis peneliti.
3. Informasi mengenai UPS Sadewa dan UPS Merdeka II tidak terlalu dikuasai oleh pihak internal DKP. Hal ini disebabkan oleh pejabat-pejabat yang menjadi narasumber adalah pejabat baru sehingga penguasaan informasi mengenai kedua UPS tersebut masih kurang.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi mengenai penjelasan gambaran umum dari program-program pelayanan kebersihan Kota Depok, penjelasan mengenai Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok, serta penjelasan mengenai Unit Pengolahan Sampah (UPS), terutama UPS di Kecamatan Sukmajaya.

4.1 Program Pelayanan Kebersihan Kota Depok

Kebersihan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan yang bersih selain terlihat indah oleh mata tentu akan membawa dampak positif bagi kesehatan yaitu tidak dapat berkembangnya bibit penyakit. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok memiliki beberapa program pelayanan kebersihan yang menunjang terwujudnya Kota Depok yang bersih dan hijau. Program-program tersebut adalah:

4.1.1 Gerakan Depok Memilah

Gerakan Depok Memilah adalah upaya mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan gerakan 3 R (*reduce, re-use, re-cycle*). *Re-duce* adalah gerakan mengurangi sampah. Hal yang mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan melakukan membawa kantong/tas ketika belanja, sehingga mengurangi kantong plastik yang biasanya dijadikan pembungkus barang belanjaan. *Re-use* adalah menggunakan kembali sampah yang masih bisa dipakai misalnya dengan memanfaatkan plastik/kain limbah rumah tangga sebagai bahan kerajinan tangan. *Re-cycle* dapat dilakukan dengan memilah sampah-sampah koran, plastik, kaleng dengan menjualnya ke lapak-lapak di sekitar rumah kita. Dengan kegiatan 3R ini selain mengurangi sampah juga akan berdampak ekonomis menambah penghasilan rumah tangga. Sedangkan untuk sampah organik diolah dengan menggunakan keranjang Takakura.

4.1.2 Sosialisasi Komposting

Program Sosialisasi Komposting ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok. Sosialisasi dilakukan ditingkat Rukun Warga (RW) di wilayah Kota Depok. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan komposting rumah tangga. Pada tahun 2011 ada beberapa rukun warga yang mendapatkan pelatihan (lihat tabel 4.1)

Tabel 4.1
Lokasi Komposting dan 3 R

Lokasi	Alamat	Jenis Kegiatan	Pelaksana
Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RW 05 Kel. Grogol Kec. Limo ▪ RW 06 Kel. Serua Kec. Bojongsari ▪ RW 03 Kel. Kemiri Muka Kec. Beji ▪ RW 16 Kel. Cilangkap Kec. Cimanggis ▪ RW 02 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya ▪ RW 09 Kel. Bojong Pondok Terong ▪ RW 10 Kel. Tugu Kec. Cimanggis ▪ RW 02 Kel. Depok Jaya ▪ RW 29 Kel. Cipayung ▪ RW 02 Kel. Sawangan ▪ RW 11 Kel. Meruyung ▪ RW 03 Kel. Tanah Baru Kec. Beji ▪ RW 10 Kel. Tugu Kec. Cimanggis ▪ RW 02 Kel. Pasir Putih ▪ RW 04 Kel. Bojong Sari Baru ▪ RW 09 Kel. Ratujaya ▪ RW 05 Kel. Tanah Baru ▪ RW 08 Kel. Rangkepan Jaya 	Komposting Rumah Tangga dengan Takakura dan Biopori	Ibu Rumah Tangga

Sumber: DKP Kota Depok, 2012

4.1.3 Pembinaan Lapak-lapak

Program ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. Lapak-lapak yang dibina ini akan membeli sampah-sampah rumah tangga yang bernilai ekonomis, seperti sampah botol, plastik, ataupun kertas. Selanjutnya sampah-sampah yang telah dikumpulkan dapat dijual lagi atau diolah dan didaur

ulang, sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Program pembinaan lapak ini telah dilakukan di beberapa wilayah Kota Depok, yaitu sekitar Perumahan Cening Ampe, Perumahan Manggis Indah, Bulak 17, Pasar BBM, Perumahan PGRI, Perumahan Depok Permai, Perumahan Graha Prima, PT. Arista, Perumahan Kemang Swatama, PT. Galkso, Pondok Tirta Mandala, Perumahan Kali Baru, Perumahan Vila Pertiwi, Grand Depok City Sektor Roma, dan Perumahan Taman Cimanggis.

4.2 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok

4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) merupakan unsur pelaksana pemerintah kota di bawah Walikota Depok, yang berfungsi melaksanakan fungsi pengaturan dan kebijakan serta pelaksanaan teknis pelayanan pengelolaan sampah atau kebersihan dan pertamanan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2010 (Perubahan dari Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat daerah). Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Huruf d Angka 5. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Pasal 54 Ayat (2), selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Walikota No 45 Tahun 2010 (Perubahan dari Peraturan Walikota No 24 Tahun 2008).

Adapun fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah :

- a. Merumuskan kebijakan teknis bidang kebersihan
- b. Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang kebersihan
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang kebersihan dan pertamanan

- d. Melakukan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan bangunan

Pengelolaan urusan ketatausahaan

Tugas pokok dan fungsi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok terbagi ke dalam tiap bidang satuan kerja. Tidak semua tugas pokok dan fungsi dari bidang satuan kerja tersebut akan dijabarkan dalam bab IV ini, satuan kerja yang akan dijabarkan adalah yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Bidang Sarana Prasarana Kebersihan dan Bidang Pelayanan Kebersihan.

4.2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sarana Prasarana Kebersihan

Tugas Pokok :

- Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan.

Fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan mengacu pada rencana strategis dinas;
- Pelaksanaan pengkajian data sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang sarana dan prasarana kebersihan;
- Pelaksanaan pengkajian data sarana dan prasarana sebagai bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan;
- Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- Pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana kebersihan;

- Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4.2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pelayanan Kebersihan

Tugas Pokok:

- Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kebersihan.

Fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan mengacu pada rencana strategis dinas;
- Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan air limbah dan persampahan;
- Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan;
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Unit Pengolahan Sampah (UPS)

Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini dibentuk sebagai suatu strategi untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Depok (Dokumen RPJMD Kota Depok 2006-2011). UPS ini merupakan bagian dari misi Walikota Depok pada periode 2006-2011, yaitu misi membangun dan mengelola sarana & prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata. Misi ini dimaksudkan untuk

meningkatkan pendistribusian pelayanan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah Kota Depok, salah satunya adalah pelayanan persampahan. Sebelumnya, paradigma pengelolaan sampah di Kota Depok hanya sebatas kumpul-angkut-buang dengan tetap meninggalkan masalah. Meskipun ada program “*sanitary landfill*” di TPA tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan “*open dumping*” yang meninggalkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan sampah perlu dirubah secara bertahap kearah “*Reduce-Reuse-Recycle-Participation*” sehingga tidak semua sampah akan menjadi masalah, sebaliknya akan berkontribusi membuka lapangan kerja (Dokumen RPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011).

UPS ini merupakan bagian dari DKP Kota Depok yang memiliki tugas untuk mengolah sampah dimasing-masing sumber sampah. Pada tahun 2006 tersebut, ditargetkan dibangun 60 UPS yang tersebar dibeberapa titik-titik Kota Depok. Namun, hingga tahun 2012 ini, UPS yang benar-benar beroperasi hanya 19 UPS. Jumlah UPS yang beroperasi ini belum mampu mengatasi permasalahan sampah di Kota Depok karena kapasitasnya belum sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Untuk tahun 2010 saja, cakupan layanan persampahan baru mencapai 38% dan kurangnya dorongan maupun kesadaran penduduk untuk mengelola sampah sendiri sehingga timbunan sampah dapat ditemui hingga ke badan sungai. Kondisi TPA Cipayung juga sudah melewati daya tampungnya dan diperkirakan hanya dapat dipertahankan maksimal dalam 1 tahun ke depan (Dokumen RPJMD Kota Depok Tahun 2011-2016).

Jumlah 19 UPS yang beroperasi ini tersebar dibeberapa kecamatan, salah satunya di Kecamatan Sukmajaya. Kemampuan UPS yang dimiliki kecamatan ini tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan. Penduduk Kecamatan Sukmajaya pada tahun 2010 mencapai 232.895 (DDA 20120), namun UPS yang tersedia hanya 3 UPS, yaitu UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II. Masing-masing UPS ini memiliki kapasitas mengolah sampah kurang lebih 30 m³ sampah perharinya. Gambaran umum ketiga UPS tersebut dapat dilihat dibawah ini.

a. Unit Pengolahan Sampah (UPS) Sadewa

Unit Pengolahan Sampah (UPS) Sadewa terletak di Jln. Sadewa Raya, Depok Tengah, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya. Luas lahan dan bangunan UPS ini adalah 316 m². Status lahan yang digunakan untuk UPS Sadewa adalah fasos-fasum (fasilitas sosial-fasilitas umum). Pembangunan UPS Sadewa dilakukan pada tahun 2008 dengan bersumber dari dana APBD Kota Depok, lalu mulai beroperasi pada Juni 2009. UPS ini memiliki jenis mesin pencacah 1000 MC dan jenis mesin pengayak 500 MC. Kapasitas mesin tersebut adalah 30 m³/hari.

Karyawan yang bekerja di UPS Sadewa berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 koordinator, 1 keamanan, dan 12 karyawan. UPS Sadewa ini dikoordinatori oleh Pak Slamet Riyanto. Karyawan di UPS Sadewa ini adalah warga sekitar UPS tersebut.

Volume sampah di UPS Sadewa mencapai ± 598 m³/bulan. Jumlah volume sampah yang besar ini terjadi karena cakupan kayanan UPS cukup banyak yaitu RW 08 sampai dengan RW 22. Pemilahan sampah di UPS ini menghasilkan sampah organik sebesar ± 179 m³/bulan dan sampah non organik sebesar 389 m³/bulan. Setelah dilakukan pemilahan, sampah organik akan diolah menjadi kompos. Hasil pengolahan sampah organik ini hanya 54 m³/bulan. Sedangkan residu yang dihasilkan pun masih cukup besar, yaitu 155 m³/kubik. Residu ini merupakan sisa sampah yang tidak bisa diolah lagi, maka residu tersebut akan diangkut ke TPA.

b. Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka I

Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka I dibangun pada tahun 2008 dan berada di Kelurahan Abadijaya. Pada tahun 2009, UPS Merdeka I ini sudah mulai beroperasi. Namun, pada tahun 2010 tidak difungsikan lagi sebagai tempat pengolahan sampah. Hal ini terjadi karena penolakan dari masyarakat setempat, sehingga operasional UPS ini terhenti. Sebab terjadinya penolakan ini karena letak UPS Merdeka I yang sangat dekat dengan Perumahan Cipayung. warga merasa terganggu dengan bau dan tumpukan sampah di UPS tersebut. Penolakan

ini diwujudkan masyarakat dengan cara membawa ke pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Rahmadi, salah satu warga Perumahan Cipayung.

“waktu mau dibangun itu kan kecamatan menjamin. Ya ngejamin ga bakalan bau, ga bakalan ganggu masyarakat. Tapi apa buktinya? Sampah malah makin banyak, terus, apa itu, baunya juga, nyengat banget, Mbak. Terus kita kan komplain ke kecamatan, eh camatnya udah ganti, kesannya ga bertanggung jawab gitu. Ya udah, akhirnya saya sama warga yang lain sepakat bawa ke pengadilan...” (rahmadi, 2012)

Namun, tuntutan masyarakat untuk menutup UPS Merdeka I ini kalah dipengadilan. Meskipun demikian, operasional UPS Merdeka I ini tetap dihentikan oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Ida, salah satu staf Pengolahan Sampah Kota Depok.

“... kita menang, Mbak. Tapi mereka kan megangnya janji Walikota. Ya udah, mending ditutup aja.” (Ida, 2012)

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Moch. Isa, Kasie Pengadaan Sarana Prasarana, Kota Depok.

“Kalau di merdeka I kan sudah ada keputusan pengadilan ya, kita menang. Tapi kita ga berani mengoperasikan karena kita juga ga mau benturan sama masyarakat. Jadi ya cari baiknya aja...” (Isa, 2012)

Hingga saat ini, bangunan UPS Merdeka I ini hanya dijadikan gudang tempat penyimpanan mesin dan sarana prasarana kebersihan lainnya. Menurut informasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, bangunan UPS Merdeka I ini nantinya akan dijadikan sebagai rumah kompos.

c. Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka II

Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka II terletak di Jln. Merdeka, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya. Luas lahan dan luas bangunan UPS ini adalah 466 m² dan pembangunan UPS ini dilakukan pada tahun 2008 dengan bersumber dari dana APBD Kota Depok. UPS Merdeka II memiliki lahan yang

berstatus fasos-fasum (fasilitas sosial-fasilitas umum). Kapasitas mesin yang dimiliki oleh UPS ini adalah 30 m³/hari, mesin ini terdiri dari dua jenis, yaitu mesin pencacah dengan jenis 1000 MC dan mesin pengayak dengan jenis 500 MC. Seperti halnya UPS yang lain, UPS Merdeka II juga memiliki 14 orang karyawan yang terdiri dari 1 orang koordinator, 1 orang keamanan, dan 12 orang karyawan. Koordinator untuk UPS Merdeka II ini dipegang oleh Pak Irawan. Karyawan di UPS ini berasal dari lingkungan sekitar UPS tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, cakupan layanan UPS ini adalah RW 11 dan RW 17. Volume sampah setiap bulan yang dibawa ke UPS Merdeka II mencapai ± 638 m³/bulan. Setelah melalui proses pengolahan, hasil pemilahan untuk sampah organik mencapai ± 255 m³/bulan, sedangkan hasil pemilahan untuk sampah non organik mencapai ± 351 m³/bulan. Hal ini menunjukkan bahwa di UPS Merdeka II sampah non organik lebih banyak daripada sampah organik. Khusus untuk sampah organik, akan diolah menjadi kompos. Hasil pengolahan untuk sampah organik ini sebesar ± 242 m³/bulan. Walaupun sudah diolah, namun tetap saja UPS menghasilkan residu, di UPS Merdeka II residu mencapai ± 45 m³/bulan. Residu ini nantinya akan diangkut menuju TPA.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kota Depok, khususnya UPS di Kecamatan Sukmajaya, yaitu UPS Merdeka II dan UPS Sadewa. Kinerja UPS di Kecamatan Sukmajaya ini dijelaskan melalui manajemen proses, yaitu proses inovasi terbentuknya UPS, proses operasional, dan proses pelayanan yang dilakukan UPS tersebut. Kemudian, dijelaskan pula melalui model kepemimpinan di UPS Merdeka II dan UPS Sadewa, finansial, serta hasil dari UPS di Kecamatan Sukmajaya tersebut.

V.1 Manajemen Proses

Manajemen proses merupakan istilah lain dari rantai nilai, dalam organisasi, manajer harus mampu mengidentifikasi proses-proses yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan. Organisasi dalam penelitian ini, yaitu Unit Pengolahan Sampah (UPS), merupakan organisasi publik, jadi pelanggan dalam hal ini adalah masyarakat. Manajemen proses ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu proses inovasi, proses operasional, dan proses pelayanan.

V.1.1 Proses Inovasi

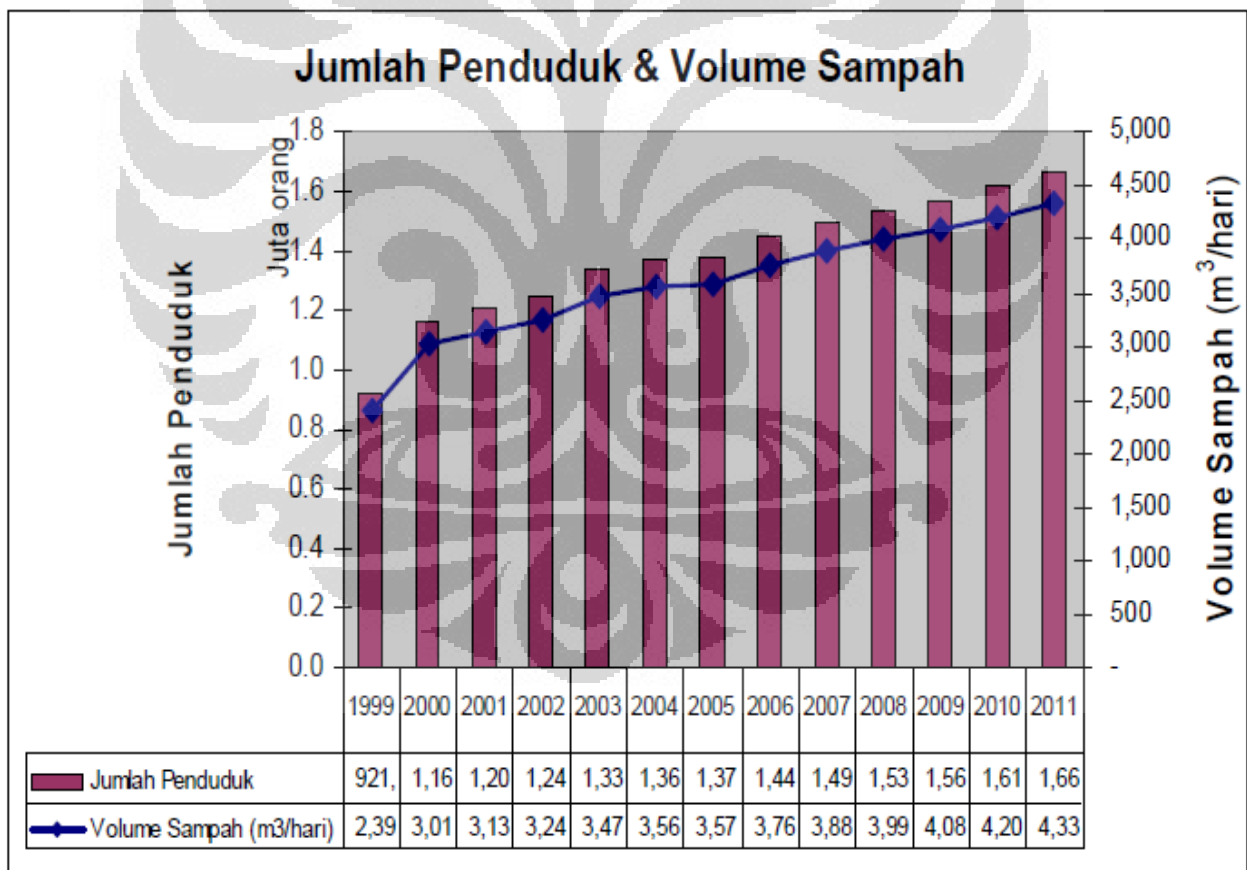
V.1.1.1 Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat

Salah satu pengukuran dalam proses inovasi ini menggunakan identifikasi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa mendatang. Hal inilah yang memaksa Pemerintah -sebagai penyedia pelayanan untuk masyarakat- memiliki kemampuan untuk memahami kebutuhan masyarakatnya. Seperti halnya Pemerintah Kota Depok yang memutuskan untuk membentuk Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang memiliki tugas untuk mengolah sampah. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat Kota Depok akan pelayanan persampahan semakin tinggi, padahal kapasitas TPA yang dimiliki, yaitu TPA Cipayang sudah mulai berkurang dan diperkirakan hanya dapat

berfungsi hingga tahun 2012 karena 11,2 hektare luas TPA tersebut, kini hanya tersisa 0,64 hektare (Rajagukguk, 2011).

Jika Pemerintah Kota Depok memaksa TPA Cipayung untuk terus menerima sampah, maka TPA ini akan cepat penuh. Hal ini beresiko pada penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Padahal letak TPS ini sebagian besar ada di lingkungan masyarakat. Hal ini jelas akan mengganggu kenyamanan dan juga beresiko penyebaran penyakit.

Penambahan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat ini tidak dapat dihindari karena setiap harinya mereka pasti akan menghasilkan sampah. Terlebih jumlah penduduk Kota Depok setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini berimplikasi pula pada penambahan jumlah sampah.



Grafik 5.1

Proyeksi Jumlah Penduduk dan Volume Sampah di Kota Depok

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2006

Sampah-sampah yang telah dihasilkan oleh masyarakat ini tidak bisa selamanya hanya dibuang ke TPA, tetapi harus mampu diolah. Pengolahan sampah inilah yang menjadi tugas utama UPS. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Moch. Isa, Kasie Pengadaan Sarana dan Prasarana DKP Kota Depok pada wawancara 6 Maret 2012 yang lalu.

“...Jadi UPS itu ada karena kita melihat dari timbunan sampah yang besar yang mana sebelumnya pengelolaan sampah selalu dari masyarakat ke TPA. TPA punya kapasitas yang terbatas, umur yang terbatas, sarananya juga terbatas. Sehingga kalau sampah ini selalu dibuang ke TPA, nanti TPA itu cepat penuh. Artinya, umurnya pendek, gitu. Kalau penuh, kemana lagi? Nyari lahan untuk dijadikan TPA itu tidak mudah, siapa orang, lahannya bisa dibebaskan untuk TPA. Atau siapa orang yang mau rumahnya didekati oleh TPA. Sehingga muncullah suatu program adanya UPS. UPS itu untuk mengolah sampah di sumber sampah. Sehingga semua sampah yang ada di sumber-sumber sampah itu, tidak semuanya harus diangkut ke TPA. Dampaknya jelas dong, umur TPA panjang. Karena TPA kan cuma masuk kolam terus ditutup, sanitary landfill ya. Itu yang mendasari awalnya kenapa UPS itu muncul programnya. Jadi tidak sebanding sampah yang dihasilkan dari masyarakat dengan TPA.” (Isa, 2012).

Pernyataan dari Pak Moch. Isa diatas menggambarkan bahwa pelayanan persampahan yang hanya membuang ke TPA sudah tidak efektif lagi. Selain itu, tidak mungkin dilakukan penambahan jumlah TPA karena pencarian lahan untuk dijadikan TPA tersebut sangat sulit. Hal inilah yang mengharuskan Pemerintah mencari alternatif lain agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, yaitu melalui UPS. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Enthy Sukarti, Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, pada wawancara 2 April 2012 yang lalu, tujuan dibentuknya UPS ini ada tiga, yaitu untuk mengolah sampah, merekrut tenaga-tenaga kerja dengan standar UMR, dan menghasilkan kompos sebagai produknya. Tujuan UPS untuk mengolah sampah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah

yang masuk ke TPA Cipayung karena sampah dapat diolah langsung dari sumbernya, yaitu masyarakat. Jadi, letak UPS ini berada dilingkungan masyarakat. Hasil pengolahan sampah yang dilakukan oleh UPS –yaitu kompos- harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga sampah yang diangkut ke TPA benar-benar sampah yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Artinya, jumlah sampah yang dibawa ke TPA ini akan mengalami penurunan dan mampu memperpanjang umur TPA. Selain itu, UPS ini dapat merekrut pekerja dari masyarakat. Jadi, manfaat UPS ini lebih banyak daripada TPA.

Melalui UPS ini, Pemerintah Kota Depok memiliki tujuan untuk mengubah sistem pelayanan persampahannya. Sebelumnya pelayanan hanya kumpul-angkut-buang, sekarang lebih mengarah pada penanganan sampah dari sumbernya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Burhanudin, bahwa UPS ini merupakan pengolahan sampah yang berskala kawasan. Jadi, harapannya nanti tidak ada lagi sampah yang keluar dari kawasan karena semuanya sudah habis diolah di UPS tersebut, untuk sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah an-organik didaur ulang (Burhanudin, 2012).

Pembangunan UPS ini merupakan salah satu agenda utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011. Namun, peraturan daerah (Perda) yang mendasari pembangunan UPS ini belum ada, Pemerintah Kota Depok hanya mengacu pada Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga mengacu pada Permendagri No. 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah. Dinas pelaksana untuk UPS ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok. Proses perencanaan hingga operasional UPS ini menjadi tanggung jawab dari DKP.

Hingga tahun 2011, UPS yang telah beroperasi berjumlah 19 UPS. UPS ini tersebar di beberapa kecamatan di Kota Depok, salah satunya adalah

Kecamatan Sukmajaya. Kecamatan Sukmajaya ini menjadi fokus penelitian ini karena jumlah penduduknya terbesar kedua setelah Kecamatan Cimanggis, jadi sumber sampahnya sangat tinggi. Kecamatan Sukmajaya ini memiliki 3 UPS, yaitu UPS Merdeka I, UPS Merdeka II, dan UPS Sadewa. Namun, UPS Merdeka I ini sudah tidak beroperasi lagi, jadi hanya tersisa UPS Merdeka II dan UPS Sadewa. Alasan dari DKP membangun UPS di Merdeka I, Merdeka II, dan Sadewa ini disampaikan oleh Pak Moch. Isa.

“... karena wilayah itu padat penduduk, jadi sumber sampahnya tinggi. Yang kedua, pada saat itu kemungkinan besar hasil dari koordinasi dengan masyarakat. Ketiga, itu status tanahnya kan fasos-fasum.” (Isa, 2012).

Pemilihan lahan untuk pembangunan UPS di Kecamatan Sukmajaya ini didasari pada status lahan yang fasos-fasum (fasilitas sosial-fasilitas umum) atau milik pemerintah. Hal ini memberikan kemudahan bagi pemerintah karena tidak perlu mencari lahan dari masyarakat. Selain itu, lahan yang digunakan oleh UPS di Kecamatan Sukmajaya ini awalnya merupakan TPS, jadi sumber sampahnya sudah ada. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Irawa, Koordinator UPS Merdeka II.

“Iya. Sempel itu mah, karena disitu (UPS Merdeka II) tempatnya tadinya tempat pembuangan sampah, sehingga ya sekalian dijadikan.” (Irawan, 2012).

Koordinator UPS Sadewa, yaitu Pak Slamet Riyanto juga mengungkapkan hal senada, bahwa lahan UPS Sadewa sebelumnya merupakan TPS.

“oh itu, jadi begini ya mbak. Awalnya, dulunya, sebelum ada UPS ini, adanya TPS. Jadi seluruh daerah Sadewa, eh, seluruh Depok Tengah II ini, khususnya untuk perumnas, memang buangnya kemari. Itu awalnya ya, jadi dari tembok ini (sambil menunjuk bangunan di dekat tempat wawancara) sampat jembatan sana, itu tempat pembuangan, dari tahun 1978 lah ya...” (Riyanto, 2012).

Pertimbangan penentuan lahan ini juga melihat akses jalan dan sumber sampah. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa UPS merupakan pengolahan sampah yang berskala kawasan, jadi pembangunan UPS pun harus ditempat yang memiliki sumber sampah. Selain itu, akses jalan juga diperlukan agar sistem pengangkutan tidak mengalami kesulitan (Isa, 2012). Untuk UPS di Kecamatan Sukmajaya, yaitu UPS Merdeka II dan UPS Sadewa berada dilingkungan pemukiman dan memiliki akses jalan yang luas sehingga mudah dalam hal pengangkutan sampah. Selain itu, karena awalnya berupa TPS jadi masyarakat sekitarnya sudah terbiasa dekat dengan sampah. Justru keberadaan UPS di wilayah Merdeka II dan Sadewa ini membuat sampah yang awalnya berserakan dan tidak teratur menjadi lebih terkoordinir karena ada petugas yang melakukan hal tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Soegijanto, Sekertaris RW 18 Kelurahan Mekarjaya, bahwa sampah sekarang lebih teratur tidak seperti dulu sebelum ada UPS. Dulu jadwal pengangkutan tidak jelas sehingga seringkali terjadi penumpukan sampah, hal ini menimbulkan bau yang sangat tidak nyaman. Selain itu, sebelum ada UPS, TPS ini tidak memiliki atap sehingga banyak lalat. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu warga yang tinggal dekat dengan UPS Merdeka II, yaitu Pak Waluyo, bahwa setelah ada UPS sampah menjadi lebih teratur. Dulu sampah berserakan sampai keluar pagar batas TPS dan menutup jalan. Melihat manfaat UPS yang dirasakan oleh masyarakat sekitarnya ini dapat mencerminkan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat didekat UPS Merdeka II dan UPS Sadewa. Hal ini terjadi karena keadaan lingkungan mereka menjadi lebih baik dan nyaman daripada dulu sebelum ada UPS. Meskipun demikian, UPS ini belum sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Kecamatan Sukmajaya karena masih banyak titik-titik TPS di kecamatan tersebut. penumpukan sampah-sampah di titik-titik TPS ini tidak bisa seluruhnya diolah ke UPS Merdeka II dan Sadewa karena kapasitas kedua UPS tersebut terbatas. Sehingga penumpukan sampah di Kecamatan Sukmajaya belum sepenuhnya teratasi oleh UPS.

V.1.1.2 Ketepatan Solusi Pelayanan Persampahan

Pembentukan dan pembangunan UPS ini dianggap sebagai solusi yang tepat oleh Pemerintah Kota Depok. Hal ini terkait dengan kapasitas TPA Cipayung yang semakin berkurang. Oleh karenanya, pemerintah merasa perlu untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA dengan cara mengolah sampah tersebut dari sumbernya. Namun, persepsi pemerintah dengan masyarakat ini belum sepenuhnya sejalan. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Sukmajaya, sempat terjadi penolakan pada saat akan dibangunnya UPS disana. Bahkan salah satu UPS, yaitu UPS Merdeka I sudah tidak beroperasi lagi karena berbenturan dengan tuntutan masyarakat. Penolakan ini juga terjadi pada awal pembangunan di UPS Merdeka II dan UPS Sadewa. Hal ini terjadi karena tidak adanya sosialisasi yang diperoleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Waluyo, warga RT 03/RW 21 Kelurahan Abadijaya pada 12 Maret 2012.

“ga ada tuh. Tau-tau udah mau bangun aja. Ya saya mah cuma warga, masyarakat kecil. Mungkin udah, ditingkat RT/RW barangkali. Tapi ga ada yang ke masyarakat. Kita mah taunya udah mau dibangun aja gitu. Mungkin pilih-pilihan kali, kaya tokoh masyarakat, yang tertentu aja. Mungkin ada ya, tapi kan kalo kaya saya ya mana mungkin diundang. Terus dulu ada yang bilang mesinnya mau ditaro didalem gitu, jadi dibikin lubang jadi ga ngeluarin bising.” (Waluyo, 2012).

Hal ini memperlihatkan bahwa proses sosialisasi yang dilaksanakan belum merata. Tidak mengherankan jika terjadi beberapa penolakan atau komplain dari masyarakat perihal pembangunan UPS ini. Sampah merupakan hal yang selalu dihindari oleh masyarakat, jika kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah ini, maka pembangunan UPS akan berjalan dengan baik. Seharusnya penyadaran ini dapat dibangun melalui sosialisasi yang intens dari DKP, sehingga masyarakat dapat memahami peran penting dari UPS tersebut. Namun, yang dilakukan oleh DKP untuk meredam penolakan dari masyarakat justru menggunakan negoisasi dalam bentuk

perbaikan fasilitas disekitar UPS. Hal ini terjadi diwilayah UPS Merdeka II. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Waluyo.

“begini, saya kan dulu juga ikut, waktu mau dibangun, warga sih kalau dibilang keberatan, ya memang keberatan. Tapi akhirnya kita sepakat, boleh dibangun dengan catatan lingkungan kita harus diperhatiin. Antara lain got ini, air kan dari atas kemari kan masuknya ke pembuangan air, jadi masuk kesana semua (sambil menunjuk got dekat tempat wawancara). Warga minta ada saluran air yang lancar, jadi dengan adanya gedung ini, otomatis tadinya air kesini semua, kalo ada saluran air yang lain, kan jadi kebagi dua. Kedua, yang penting jangan sampai mengganggu orang, istilahnya, ya kaya bau. Bau itu kan otomatis, namanya juga sampah. Waktu itu janjinya sih ga bakalan bau, jadi katanya nanti bau itu kan bisa dipakein kimia ya, diobatin gitu. Terus bising juga ga...” (Waluyo, 2012).

Tindakan negoisasi ini tidak akan berpengaruh banyak pada penyelesaian masalah persampahan karena masyarakat hanya melihat keuntungan pada hal lain bukan pada pengolahan sampah itu sendiri. Padahal jika pemahaman pengolahan sampah ini sudah terjadi pada masyarakat, maka UPS dapat menjadi solusi yang sangat menjamin penyelesaian masalah sampah di Kota Depok. Pemahaman pada masyarakat ini dapat dilakukan pemerintah melalui program-program pelayanan kebersihan, seperti program dari DKP yaitu Gerakan Depok Memilah atau Sosialisasi Komposting. Program-program ini akan membantu masyarakat memahami pentingnya melakukan pengolahan sampah serta keuntungan yang bisa diperoleh dari pengolahan tersebut. Jika program ini dilakukan secara berkala ke setiap RT disetiap kelurahan maka pemahaman masyarakat akan timbul sedikit demi sedikit. Hal ini akan mempermudah proses pelayanan persampahan melalui UPS karena masyarakat yang sudah sadar dan memahami pentingnya pengolahan sampah akan secara serta merta ikut membantu UPS. Namun, sayangnya program-program tersebut dilakukan dengan sistem permintaan dari masing-masing kelurahan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu staf

Seksi Pengolahan Sampah, yaitu Ibu Made, mereka akan mengadakan sosialisasi Gerakan Depok Memilah atau Sosialisasi Komposting ini jika ada pihak kelurahan atau kecamatan yang mengajukan permintaan dengan cara pengiriman surat. Menurut Ibu Made sendiri, kebanyakan kelurahan yang mengajukan permintaan ini tidak terdapat UPS di kelurahan tersebut. seperti halnya di Kecamatan Sukmajaya, kelurahan yang mengajukan adalah Kelurahan Bhaktijaya, bukan Kelurahan Abadijaya atau Kelurahan Mekarjaya yang sudah terdapat UPS Merdeka II dan UPS Sadewa. Padahal, jika keberadaan UPS ini dibarengi dengan program-program pelayanan kebersihan tersebut dapat membantu pekerjaan pengolahan sampah di UPS. Sehingga sampah yang dapat terolah semakin banyak dan berimplikasi pada penurunan jumlah sampah yang dibuang ke TPA.

Namun, pada kenyataannya program-program ini belum sepenuhnya menyentuh pemahaman masyarakat. Terlebih tentang pentingnya keberadaan UPS diwilayah mereka. Hal ini terjadi karena UPS ini tidak memberikan keuntungan secara nyata bagi masyarakat. Seperti di UPS Merdeka II dan UPS Sadewa, keuntungan yang baru dirasakan oleh masyarakat adalah perekrutan tenaga kerja. Namun, hal ini hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat saja karena tenaga kerja yang dibutuhkan di UPS hanya 14 orang. Mengenai hasil produk UPS yaitu kompos selama ini belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga keberadaan UPS ini masih minim dukungan dari masyarakat, mereka hanya memberikan dukungan dalam bentuk kegiatan yang pasif seperti penerimaan pembangunan UPS diwilayah mereka. Seperti yang disampaikan oleh Pak Irawan, Koordinator UPS Merdeka II.

“...Ya dukungannya mereka menerima berdiri, berjalan, berarti masyarakat masih mendukung...” (Irawan, 2012).

Padahal, jika masyarakat mampu memberikan dukungan secara aktif seperti melakukan pemilahan terlebih dahulu sebelum dibawa ke UPS, maka pekerjaan pengolahan sampah di UPS akan semakin ringan. Hal ini dapat berimplikasi pada banyaknya sampah yang bisa diolah. Sehingga pada

akhirnya UPS ini dapat menjadi solusi yang benar-benar tepat dalam mengatasi permasalahan pelayanan persampahan di Kota Depok. Meskipun, solusi melalui UPS ini dirasakan belum begitu tepat, tapi upaya Pemerintah Kota Depok berinovasi dalam sistem pelayanan persampahannya ini patut diapresiasi karena memperlihatkan kepedulian pemerintah dalam menyediakan pelayanan persampahan yang lebih baik, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak yang perlu dibenahi.

V.1.2 Proses Operasional

V.1.2.1 Kesesuaian Tugas

Tugas utama dari UPS adalah mengolah sampah (Made, 2012), begitu pula untuk UPS Sadewa dan UPS Merdeka II. Setiap harinya, kedua UPS ini dituntut untuk bisa mengolah sampah dari lingkungan sekitar. Namun, di Kecamatan Sukmajaya ini, UPS yang benar-benar masih bertugas untuk mengolah sampah hanya UPS Merdeka II. Setiap harinya, petugas UPS Merdeka II ini bertugas untuk menerima sampah dari lingkungan sekitar, kemudian melakukan pemilahan, dan selanjutnya mencacah sampah organik untuk dijadikan bahan kompos. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Irawan, Koordinator UPS Sadewa.

“sistem kerjanya ya pagi-pagi ada gerobak yang datang, dipilah, digiling, diayak. Terus dipilah lagi untuk yang ga bisa diolah (residu). Jadi, dipilih mana yang bisa dijadiin kompos, mana yang jadi residu.”
(Irawan, 2012).

Berdasarkan informasi dari salah satu petugas UPS Merdeka II, yaitu Pak Guntur, untuk sampah an-organik yang telah dipilah, biasanya mereka akan menjualnya ke pengepul atau dibawa oleh DKP Kota Depok (Guntur, 2012).

Sedangkan UPS Sadewa sudah tidak lagi menjalankan tugasnya karena mengalami kerusakan mesin pengolah sampah sejak akhir tahun 2011 yang lalu. Hal ini mengakibatkan tugas UPS Sadewa beralih menjadi tempat

penampungan sampah sementara dan menunggu sampah-sampah tersebut untuk diangkut ke TPA. Petugas-petugas UPS Sadewa yang seharusnya bekerja untuk mengolah sampah, sekarang hanya bertugas untuk mengatur timbunan sampah agar tidak sampai keluar hanggar. Tugas UPS Sadewa ini tidak jauh berbeda dengan TPS, perbedaannya hanya terdapat petugas yang mengatur sampah di UPS. Ketidaksesuaian tugas UPS Sadewa ini mengakibatkan tujuan pengolahan sampah -yang diharapkan dapat mengurangi sampah ke TPA- ini menjadi sulit untuk tercapai, terutama untuk wilayah Kecamatan Sukmajaya yang memiliki sumber sampah yang tinggi. Sumber sampah ini berasal dari penduduk Kecamatan Sukmajaya yang mencapai 232.895 jiwa. Asumsi dari DKP, satu orang penduduk ini menghasilkan 2,5 liter sampah, jadi di Kecamatan Sukmajaya setiap harinya terdapat 582.237,5 liter sampah atau setara dengan 582-583 m³ sampah.



Gambar 5.1
Tumpukan Sampah di UPS Sadewa (kiri), Kegiatan
Petugas UPS Sadewa (kanan)
Sumber: Hasil Pengamatan

Jumlah sampah yang dihasilkan penduduk Kecamatan Sukmajaya ini tidak sebanding dengan kapasitas UPS Sadewa dan UPS Merdeka II. Terlebih untuk UPS Sadewa yang sekarang ini tidak lagi mengolah sampah. Seharusnya hal ini bisa cepat ditanggapi oleh pihak DKP Kota Depok, namun kenyataannya hingga sekarang belum ada tindakan apapun. Sehingga tugas utama UPS Sadewa untuk mengolah sampah belum bisa dijalankan kembali

V.1.2.2 Proses Pengolahan Sampah yang Efektif dan Efisien

Proses pengolahan sampah yang dilakukan di UPS Merdeka II dan UPS Sadewa tidak jauh berbeda. Pengelolaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka II ini dilakukan oleh 14 petugas, yang terdiri dari satu orang sebagai koordinator, satu orang sebagai keamanan, dan duabelas orang sebagai pekerja pengolah sampah. Koordinator dari UPS Merdeka II ini adalah Pak Irawan, beliau bertugas untuk mengawasi sekaligus ikut bekerja dalam kegiatan pengolahan. Sedangkan pekerja bertugas melakukan pemilahan dan pengomposan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu pekerja UPS Merdeka II, jam operasional UPS ini dimulai pukul 08.00-16.00 WIB. Kegiatan pengolahan sampah dimulai dengan memasukkan gerobak sampah dari warga sekitar, selanjutnya sampah didalam gerobak ini dituang didekat mesin *belt conveyor* dengan tujuan untuk mempermudah proses pemilahan. Proses memasukan sampah ke dalam UPS Merdeka II ini berlangsung dari pukul 08.00-14.00 WIB.

Sampah-sampah yang telah dikumpulkan di UPS Merdeka II ini selanjutnya akan diolah. Pertama kali yang dilakukan oleh pekerja adalah menyebar sampah ke atas mesin, dan kemudian dipilah antara sampah organik dan sampah an-organik. Pemilahan ini dilakukan 3-4 orang.



Gambar 5.2

Mesin *Belt Conveyor* di UPS Merdeka II

Sumber: Hasil Pengamatan

Sampah-sampah yang telah dipilah ini selanjutnya akan masuk ke dalam mesin pencacah, sampah yang bisa tercacah adalah sampah organik. Sedangkan sampah an-organik akan dipisahkan dan diturunkan dari mesin *belt conveyor*. Selanjutnya, sampah an-organik ini akan dikumpulkan oleh pekerja dan kemudian dijual kepada pengepul.



Gambar 5.3

Mesin Pencacah di UPS Merdeka II

Sumber: Hasil Pengamatan

Hasil pencacahan sampah ini kemudian dipisahkan ke bagian belakang UPS Merdeka II, untuk selanjutnya diberi obat untuk menjadi kompos, obat yang digunakan adalah EM4. Kemudian residu atau sampah yang tidak bisa diolah lagi akan diangkut ke TPA dengan menggunakan truk sampah. Pengangkutan ini dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh DKP. Untuk UPS Merdeka II, pengangkutan dilakukan 2x dalam seminggu. Untuk pengangkutan sendiri, biasanya dilakukan dengan menggunakan 2 truk sampah, namun jika jumlah residu cukup banyak, maka akan ada penambahan jumlah truk sampah. Sedangkan sampah organik yang telah menjadi kompos selanjutnya akan dikemas dan akan dibawa ke rumah kompos atau diambil oleh DKP. Hal ini diungkapkan oleh Pak Irawan.

“dibawa ke Merdeka I, yang rencananya pemerintah mau menyiapkan rumah kompos. Ini rencananya ada di Merdeka I. Sama paling diambil sama dinas.” (Irawan, 2012).

Pengolahan sampah yang dilakukan oleh UPS Sadewa ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan di UPS Merdeka II. UPS ini juga dikelola oleh 14 orang petugas. Satu orang bertindak sebagai koordinator, yaitu Pak Slamet Riyanto. Koordinator ini bertugas untuk menjaga keamanan UPS sekaligus ikut bekerja dalam kegiatan pengolahan. Lalu ada satu orang keamanan, dan duabelas orang lainnya bertugas sebagai pekerja yang melakukan kegiatan pemilahan dan pengomposan.

Kegiatan pengolahan sampah di UPS Sadewa ini dimulai dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Namun, ketika Peneliti melakukan observasi, ternyata kegiatan pengolahan di UPS Sadewa ini tidak berjalan karena mesinnya mati. Jadi, menunggu mesin diperbaiki, kegiatan di UPS Sadewa hanya menumpuk sampah sampai diangkut.



Gambar 5.4

Kegiatan Memasukan Sampah ke dalam UPS Sadewa

Sumber: Hasil Pengamatan

UPS Sadewa ini memiliki peraturan sendiri untuk para tukang sampah yang membuang ke UPS tersebut, yaitu memasukan gerobak sampah secara bergiliran, satu giliran hanya untuk 2 gerobak sampah. Hal ini diungkapkan oleh Pak Slamet.

“...biasanya kita jam 8 itu masukin gerobak dulu, itu masuknya dua dua dulu.” (Riyanto, 2012)

Selanjutnya, sampah yang sudah menumpuk karena tidak bisa diolah tersebut akan diangkut ke TPA. Berdasarkan informasi dari Pak Slamet, jadwal pengangkutan untuk UPS Sadewa ini adalah 3x dalam seminggu.

“...Jadwalnya itu kita seminggu 3x pengangkutan. Hari senin, selasa, sama hari kamis. Kalo kamis ga diangkut, ya paling jumat. Jumat ga bisa ya sabtu...” (Riyanto, 2012)

Namun, jadwal pengangkutan yang telah ditentukan oleh DKP ini terkadang sering terlambat sehingga UPS Sadewa mengalami penumpukan sampah. Meskipun demikian, para pekerja berusaha agar sampah tersebut tidak sampai keluar dari hanggar, sehingga dapat mengganggu kenyamanan lingkungan. Hal ini tidak akan terjadi apabila mesin pengolah sampah tidak rusak. Berdasarkan informasi dari salah satu petugas UPS Sadewa, yaitu Pak Rasidi, ketika mesin belum rusak, UPS Sadewa juga melakukan kegiatan pengolahan sampah seperti UPS Merdeka II. , kegiatan yang dilakukan adalah pemilahan sampah dan pengomposan untuk sampah organik. Pemilahan sampah ini dilakukan secara manual diatas mesin *belt conveyer*, berdasarkan informasi dari petugas, pemilahan ini dilakukan oleh 4-5 orang. Sampah yang telah dikumpulkan dari warga, disebar diatas mesin *belt conveyer* tersebut, selanjutnya sampah ini akan terbawa oleh *belt* yang berputar dan kemudian masuk ke dalam mesin pencacah. Selama sampah diatas belt tersebut, petugas melakukan pemilahan sampah organik dan an-organik. Namun karena pemilahan ini dilakukan secara manual, banyak sampah yang tidak bisa diolah (an-organik) ikut masuk ke dalam mesin. Hal inilah yang menyebabkan mesin sering rusak.



Gambar 5.5

Mesin *Belt Conveyor* di UPS Sadewa

Sumber: Hasil Pengamatan

Selanjutnya, sampah organik yang sudah tercacah kemudian akan diolah lagi dengan mesin penyaring agar lebih halus. Setelah itu, sampah akan diberi obat EM4. Proses pengomposan ini akan berlangsung 2 minggu hingga 1 bulan. Selanjutnya, setelah kompos dikemas, maka akan diambil oleh DKP dan dibawa ke rumah kompos atau dibeli oleh masyarakat sekitar. Harga untuk kompos ini hanya dihargai untuk penggantian karung. Hal ini diungkapkan oleh Pak Burhanudin, Kasie pengolahan sampah DKP Kota Depok.

“paling ya ganti karung aja lah. Istilahnya biaya karung. Ya kalau UPS ini sudah bisa jalan bagus ya nantinya kan komposnya bisa dijual...”
(Burhanudin, 2012).

Kemudian, untuk sampah an-organik akan diambil oleh pemulung. Sedangkan untuk sampah yang benar-benar sudah tidak bisa diolah atau residu akan diangkut ke TPA. Proses pengolahan yang dilakukan di UPS Merdeka II dan UPS Sadewa ini belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien karena menghabiskan waktu yang cukup banyak. Seperti kegiatan pemilahan yang dilakukan secara manual di UPS Merdeka II. Hal ini diungkapkan oleh Pak Guntur, salah satu petugas UPS Merdeka II, bahwa *“... kadang kita bisa seharian tuh, milah-milah sampah. Soalnya kan sampahnya banyak banget...”* (Guntur, 2012). Hal ini tentu saja menghambat proses pengolahan sampah lainnya. Padahal sampah setiap harinya terus bertambah.

Hal ini berpengaruh besar pada sampah-sampah organik yang belum terpilah lebih dari 2 hari karena kualitasnya sudah tidak bagus lagi untuk dijadikan kompos (Kementerian PU, 2003, hal. 3). Akibatnya, sampah organik yang sudah menumpuk lebih dari 2 hari tersebut menjadi residu dan dibuang ke TPA. Seharusnya, pemilahan sampah ini sudah tidak menjadi fokus UPS lagi karena tanggung jawab untuk memilah sampah ada di masyarakat. Namun, berdasarkan informasi dari Ibu Made, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah ini masih belum terbangun.

Selain itu, mesin pengolah sampah di UPS Merdeka II memiliki keterbatasan, kapasitas mesin ini hanya mampu mengolah sampah 30 m³ per harinya, padahal jumlah sampah yang masuk ke UPS Merdeka II ini mencapai 38-43 m³ per harinya. Sehingga masih terdapat sisa 8-13 m³ sampah yang belum bisa terolah. Sisa sampah ini juga belum tentu bisa terolah keesokan harinya karena ada tambahan sampah yang baru. Kapasitas mesin yang seharusnya bisa mengolah 30 m³ sampah per hari ini juga belum tentu bisa benar-benar mengolah sampah dengan jumlah tersebut. Hal ini terjadi karena mesin yang digunakan tidak bisa dijalankan secara terus-menerus. Menurut Pak Guntur, jika mesin digunakan seharian maka akan cepat panas dan beresiko mengalami kerusakan (Guntur, 2012). Terlebih untuk mesin di UPS Sadewa yang sudah rusak, sehingga mereka tidak lagi mengolah sampah. Fasilitas pengolahan sampah yang tidak memadai ini membuat proses pengolahan sampah di UPS Sadewa dan UPS Merdeka II semakin tidak efektif dan efisien. Pasalnya, fasilitas pengolahan sampah ini menjadi daya dukung utama UPS dalam mengolah sampah. Sebenarnya, hal ini tidak akan terjadi apabila kapasitas sampah yang masuk kurang dari 30 m³ perhari, jadi mesin pengolah sampah dapat bekerja secara optimal. Namun, hal ini tidak dapat dihindari karena baik UPS Sadewa maupun UPS Merdeka II memiliki tuntutan untuk melayani lingkungannya.

V.1.3 Proses Pelayanan

V.1.3.1 Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan

Pelayanan persampahan melalui UPS dapat memperluas cakupan pelayanan. Hal ini terjadi karena selama ini pelayanan hanya dilakukan dengan cara pengangkutan dan kemudian dibuang ke TPA. Keterbatasan armada pengangkutan dan kapasitas TPA membuat pelayanan persampahan di Kota Depok hanya sebesar 34% (depoklik.com, 2011). Melalui UPS ini, Pemerintah Kota Depok bertujuan memperluas cakupan pelayanan dengan cara sampah-sampah diluar 34% yang telah terangkut tersebut dapat diolah di UPS. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Burhanudin, Kasie Pengolahan Sampah DKP Kota Depok.

“...misalkan 1 KK itu menghasilkan kurang lebih 10 liter sampah per hari, terus dibandingkan dengan jumlah truk yang ada, ini cuma bisa melayani 35% sampah yang ada. Sisanya ya masuk ke TPS resmi atau TPS liar. Yang kita layani kan cuma TPS resmi. Nah, dengan adanya UPS, sampah-sampah yang biasa dibuang ke TPS liar bisa dibuang ke UPS. Jadi, cakupan layanannya lebih luas kan...” (Burhanudin, 2012).

Seperti halnya UPS di Kecamatan Sukmajaya yang awalnya hanya berupa TPS, dulu sampah-sampah hanya menumpuk di TPS menunggu untuk diangkut ke TPA. Namun sekarang, sampah-sampah tersebut dapat diolah di UPS Merdeka II dan UPS Sadewa. Namun, peningkatan cakupan pelayanan persampahan ini hanya terjadi di UPS Merdeka II. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator UPS Merdeka II, yaitu Pak Irawan, setiap harinya mereka menerima sampah sebanyak 35 gerobak, 3 gerobak motor, dan sampah-sampah yang langsung diletakkan oleh warga didepan UPS. Dari volume sampah yang diterima tersebut, UPS Merdeka II mampu mengolah sampah kurang lebih 20 gerobak, jika asumsi satu gerobak sampah adalah $1,08 \text{ m}^3$, maka dalam sehari UPS Merdeka II mampu mengolah 22 m^3 sampah. Berbeda jika UPS ini tidak ada, maka sampah sebanyak 35 gerobak, 3 gerobak motor, dan sampah-sampah yang langsung diletakkan oleh warga

didepan UPS tersebut hanya menumpuk di TPS dan menunggu untuk diangkut. Hal inilah yang membuat UPS dapat memperluas cakupan pelayanan di Kecamatan Sukmajaya. Namun, dalam pengolahan sampah ini UPS Merdeka II memiliki keterbatasan karena terdapat keterbatasan tenaga dan waktu. Selain itu, kemampuan mesin jika terus digunakan akan cepat panas dan akhirnya rusak.

Akan tetapi, peningkatan cakupan pelayanan ini tidak terjadi di UPS Sadewa. Hal ini dikarenakan kerusakan mesin pengolahan sampah yang dialami UPS tersebut. Alhasil, mereka tidak mampu lagi mengolah sampah. Padahal, volume sampah yang diterima oleh UPS Sadewa ini mencapai 42 gerobak setiap harinya. Sampah-sampah ini berasal dari 22 RW di Kelurahan Abadijaya dan sebagian Kelurahan Mekarjaya yang sebelumnya dilayani oleh UPS Merdeka I. Menurut Koordinator UPS Sadewa, yaitu Pak Slamet, 42 gerobak sampah ini bisa 2-3 kali membuang sampahnya ke UPS Sadewa. DKP Kota Depok menyebutkan bahwa kapasitas satu gerobak ini adalah 1,08 m³. Jika memakai asumsi dari DKP Kota Depok tersebut, maka UPS Sadewa setiap harinya menerima 45-136 m³ sampah. Padahal hanggar UPS Sadewa ini tidak besar, hanya ± 316 m². Jadi, kapasitas sampah yang masuk ini tidak sebanding dengan kemampuan UPS Sadewa. Terlebih ketika akhir tahun 2011, mesin mereka mengalami kerusakan. Jadi, hingga saat ini, fungsi UPS Sadewa hampir sama dengan TPS yaitu menampung sampah dan menunggu untuk diangkut ke TPA. Akan tetapi, UPS Sadewa tetap memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat. Agar sampah yang masuk tidak mengalami pembudakan, maka UPS Sadewa menerapkan sistem pembagian kelompok untuk setiap RW yang membuang sampah. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Slamet, semua RW yang membuang sampah ke UPS Sadewa dibagi ke dalam kelompok A dan Kelompok B. Kelompok A ini terdiri dari RW 11-RW 22, sedangkan RW 01-RW 10 masuk ke dalam kelompok B. Jadwal buang ke UPS Sadewa ini dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1
Jadwal Pembuangan Sampah di UPS Sadewa

No.	Hari	Kelompok
1.	Senin	Kelompok A dan Kelompok B
2.	Selasa	Kelompok B
3.	Rabu	Kelompok A
4.	Kamis	Kelompok B
5.	Jumat	Kelompok A
6.	Sabtu	Kelompok A dan Kelompok B

Sumber: Hasil Pengamatan

Setiap pembuangan, tidak boleh lebih dari 2 kali buang. Artinya, setiap hari –kecuali hari Senin dan hari Sabtu- UPS Sadewa menerima 42 gerobak sampah dari 11 RW. Peraturan ini ditetapkan oleh koordinator UPS Sadewa dengan kesepakatan dari DKP dan para pejabat RT/RW setempat.

“...sekarang kita bagi dua sistemnya, Mbak. Setiap hari sebelum kita bikin sistem buang-libur-buang-libur, itu bisa mencapai 80 gerobak karena 2x buang mereka (masyarakat). Kan ada 42, kalo 2x kan mencapai 84. Akhirnya saya bagi jadi 2 pembuangan...” (Riyanto, 2012)

“...Ini juga kita udah dapet persetujuan dari DKP kan sama pengurus-pengurus RW, gitu. Karena bukan apa-apa, karena kan kita pembuangan cuma ada disini aja, kalau mereka ga mau kita atur, ya terserah mereka mau buang kemana, tapi kalau mereka mau saya atur, ya monggo mereka buang kesini. Dengan catatan, sehari harus 2 gerobak.” (Riyanto 2012)

V.1.3.2 Kemampuan Menanggapi Komplain

Sebuah pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat kemungkinan besar akan menimbulkan komplain. Komplain ini harus bisa ditangani oleh pihak penyedia pelayanan dengan baik atau biasa disebut

dengan manajemen komplain (www.fsa.gov.uk). Seperti pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Unit Pengolahan Sampah (UPS). Di Kecamatan Sukmajaya sendiri, komplain dari masyarakat terhadap UPS Sadewa dan UPS Merdeka II pun terjadi. Komplain yang diajukan di UPS Sadewa lebih ke tumpukan sampah yang terlalu banyak. Hal ini mengganggu kenyamanan dari masyarakat sekitar karena sampah yang menumpuk ini akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Masyarakat hanya berharap dibangun lagi UPS lain agar sampah yang dibawa ke UPS Sadewa berkurang, sehingga tidak menumpuk terlalu lama. Hal ini terjadi karena sebelum UPS Merdeka I ditutup, pembuangan sampah di Kelurahan Mekarjaya dapat dibagi dua. Namun, semenjak UPS Merdeka I ditutup, sampah yang tadinya masuk ke UPS itu dialihkan sebagian ke UPS Sadewa. Padahal hanggar UPS Sadewa ini kecil. Seperti yang dikatakan oleh Pak Soegijanto, sekretaris RW 18 Kelurahan Mekarjaya, *"...Alangkah baiknya kalo ada tempat lain lagi, komplainnya cuma itu. Liat itu yang di merdeka, bangunannya kan sayang, terus tempatnya juga ga dalam lingkungan rumah..."* (Soegijanto, 2102).

Selain itu, lalu lalang truk sampah atau gerobak sampah diwilayah sekitar UPS ini cukup mengganggu kenyamanan warga. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Soegijanto,.

"... Saya sih emang ga, saya RW 18, tempatnya di RW 19, tapi kan tiap hari yang lalu lalang itu lewat sini semua. Ya sovelnya, truknya, gerobaknya..." (Soegijanto, 2012).

Menurut koordinator UPS Sadewa ini sendiri, banyak masyarakat yang mengajukan keluhan langsung, terutama dengan bau sampah yang tidak diangkut. Sikap koordinator UPS Sadewa dalam menanggapi keluhan ini adalah menghubungi pihak-pihak terkait, terutama ke bagian yang bertanggung jawab dalam pengangkutan sampah. Sehingga sampah ini bisa segera diangkut.

"biasanya komplain memang ke saya. Terus ya saya biasanya ngadu ke kepala bagian yang pengangkutan, Pak Bambang. Tapi ya sebelumnya

kita ngomong dulu ke atasan kita. Kita bilang aja ini warga sadewa pada komplain, terus disuruh bilang aja ke Pak Bambang. Atau kita bisa juga hubungi korcamnya (koordinator kecamatan) yang menangani pengangkutan sampah.” (Riyanto, 2012).

Tindakan yang dilakukan oleh koordinator UPS Sadewa tersebut merupakan bentuk penanganan komplain. Namun, tanggapan yang dilakukan oleh UPS Sadewa ini tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan ketidakpuasan masyarakat karena yang berwenang penuh untuk mengatasi hal ini adalah DKP. Jika koordinator sudah menyampaikan keluhan namun tidak ada tindakan penyelesaian yang cepat dari pihak DKP, maka keluhan ini akan tetap muncul. Akan tetapi, keluhan dari masyarakat sekitar UPS Sadewa ini tidak sampai menimbulkan konflik yang mengancam operasional UPS karena pekerja UPS ini berasal dari masyarakat, sehingga membantu masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan.

Komplain ini terjadi pula di UPS Merdeka II, terutama komplain masalah bau dan tumpukan sampah. Lebih jauh lagi komplain ini lebih mengarah pada janji pemerintah yang belum terpenuhi. Janji ini terkait dengan pembangunan UPS di wilayah tersebut, yaitu berupa pembangunan saluran air karena daerah ini merupakan daerah rawan banjir. Semenjak UPS Merdeka II beroperasi, hingga tahun 2012 ini, realisasi pembangunan saluran air tersebut belum juga dilaksanakan. Padahal bangunan UPS ini ikut andil pula menambah banjir di daerah tersebut. seperti yang disampaikan oleh salah satu warga sekitar UPS, yaitu Pak Waluyo.

“...Ya itu sih tuntutan warga ya, satu jangan sampai bau, sampai membludak gitu, jangan sampai keluar sampahnya. Tapi ya tuntutan utama yang diminta warga itu, belum ada realisasinya. iya, yang saluran air. Dari sini cuma ngandelin ini (menunjuk got yang berada dekat dengan tempat wawancara), padahal ini keadaannya begini. Terus daerah sini rendah kan, pasti air kemari semua, disana (tempat yang lebih rendah) pasti kebanjiran. Kalo ujan ya kebanjiran terus... kita minta supaya jangan mengganggu banget. Tapi semenjak ada

gedung ini, kebanjiran tambah parah. Bisa sampe setengah meter masuk...” (Waluyo, 2012).

Keluhan Pak Waluyo dan masyarakat lainnya ini sudah disampaikan ke pihak UPS dan ke pihak DKP. Namun, hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Dalam hal ini, UPS memang tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki wewenang untuk menangani keluhan tersebut.

Kemampuan manajemen komplain di kedua UPS ini memang belum kuat karena mereka hanya pelaksana teknis dilapangan dan tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan keluhan dari masyarakat. UPS ini hanya mampu menyampaikan keluhan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu DKP.

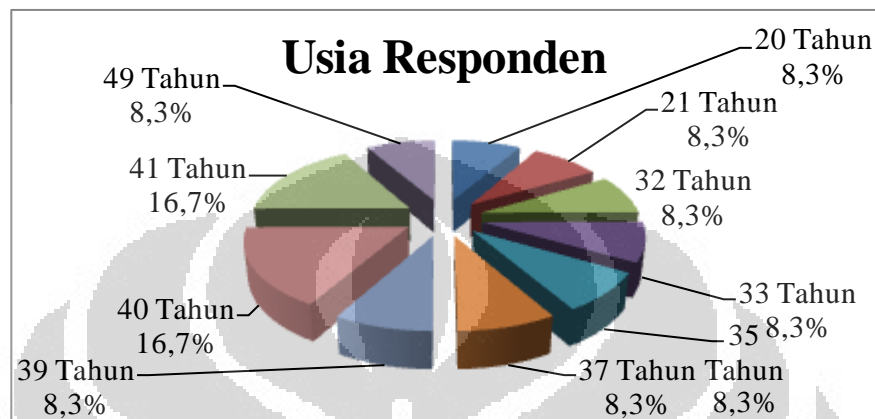
V.2 Kepemimpinan

Penilaian kepemimpinan dalam Penelitian ini menggunakan teori dari Hersey dan Blanchard mengenai efektivitas model kepemimpinan. Teori ini mengkombinasikan model pemimpin yang berorientasi tugas dan pemimpin yang berorientasi hubungan. Model pemimpin yang berorientasi tugas ini cenderung memiliki perilaku yang sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang berlaku, menciptakan budaya organisasi yang mempertahankan nilai-nilai sebagai organisasi yang terus tumbuh dan berkembang, serta mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan. Sedangkan model pemimpin yang berorientasi hubungan lebih cenderung menekankan pada komunikasi dengan bawahan, kerja sama, serta memberikan kesempatan bawahan untuk berkembang.

Penilaian kepemimpinan ini dimaksudkan untuk melihat model pemimpin dimasing-masing Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya, yaitu di UPS Sadewa dan UPS Merdeka II. Peneliti bermaksud untuk melihat perbedaan model kepemimpinan dari kedua UPS tersebut serta pengaruhnya terhadap kerja dari bawahannya. Selain itu, peneliti juga ingin melihat bagaimana pemimpin tersebut mengelola masing-masing UPS.

V.2.1 Kepemimpinan di UPS Sadewa

Penilaian kepemimpinan di UPS Sadewa dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 12 petugas di UPS tersebut. Karakteristik dari 12 responden dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



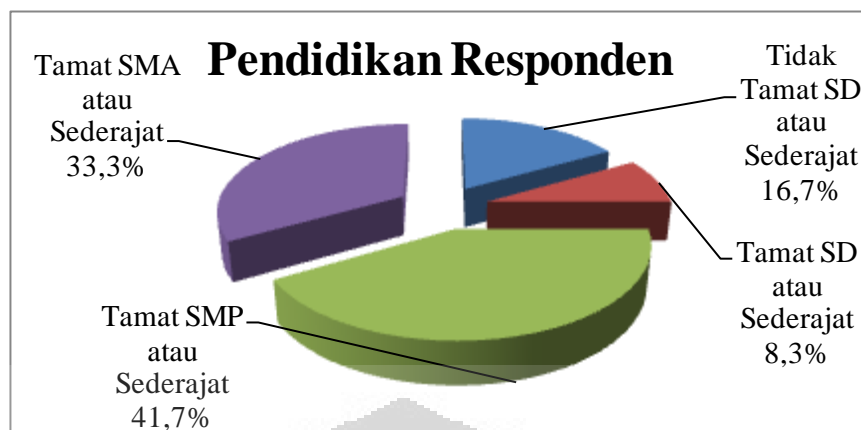
Grafik 5.2

Persentase Usia Responden (n=12)

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, April 2012

Pada grafik 5.2 diatas terlihat bahwa usia responden bervariasi dari usia 21-49 tahun. Untuk usia 20, 21, 32, 33, 35, 37, 39, dan 49 tahun memiliki persentase sebesar 8,3% atau setara dengan 1 responden untuk masing-masing usia. Sedangkan untuk usia 40 dan 41 tahun memiliki persentase 16,7% atau setara dengan 2 responden untuk masing-masing usia. Hal ini memperlihatkan bahwa usia petugas di UPS Sadewa ini cenderung berada pada usia produktif. Selain itu, rentang usia ini biasanya memiliki fisik yang masih kuat karena pekerjaan di UPS sendiri cukup berat. Para petugas di UPS Sadewa ini harus bekerja dari jam 08.00-17.00 WIB. Pekerjaan yang mereka lakukan juga berkaitan dengan sampah. Artinya, banyak sumber penyakit yang dapat menyerang para petugas ini. jadi, diperlukan petugas yang masih produktif dan sehat secara fisik.

Selanjutnya, keseluruhan responden atau 100% berjenis kelamin laki-laki. Hal ini terjadi karena seluruh pekerja di UPS Sadewa adalah laki-laki.



Grafik 5.3

Persentase Pendidikan Responden (n=12)

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, April 2012

Pendidikan responden di UPS Sadewa sebagian besar adalah tamat SMP atau sederajat, yaitu sebesar 41,7% atau setara dengan 5 responden. Sedangkan urutan kedua adalah tamat SMA atau sederajat, yaitu 33,3% atau 4 responden. Sisanya, memiliki pendidikan tidak tamat SD atau sederajat sebesar 16,7% atau 2 responden, dan tamat SD atau sederajat sebesar 8,3% atau 1 responden. Beroperasinya UPS Sadewa ini memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat sekitar karena telah membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi. Hal ini terlihat pada grafik 5.3 diatas, sebagian besar petugas UPS Sadewa tidak mengenyam pendidikan tinggi, justru persentase terbanyak ada pada lulusan SMP atau sederajat.

Selanjutnya, untuk penilaian responden terhadap model kepemimpinan di UPS Sadewa ini akan dijabarkan melalui grafik dan penjelasannya dibawah ini.

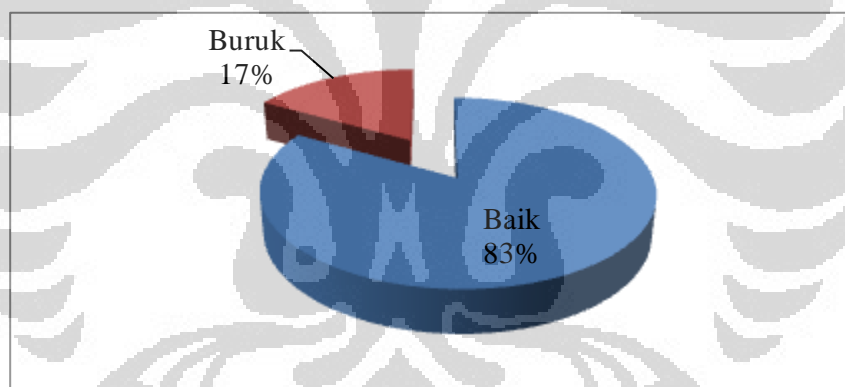
V.2.1.1 Task-oriented

a. Kesesuaian Perilaku Pemimpin dengan Etika dan Nilai yang Berlaku

Pemimpin di UPS Sadewa adalah Koordinator UPS, yaitu Pak Slamet Riyanto. Pak Slamet Riyanto merupakan pemimpin yang dapat berperilaku

sesuai dengan etika dan nilai yang berlaku. Pak Slamet dapat bertindak sebagai pemimpin yang patuh terhadap peraturan organisasi dan mampu membuat bawahannya juga mematuhi peraturan tersebut. Berdasarkan informasi dari Pak Slamet sendiri, peraturan umum di UPS Sadewa ini adalah jam kerja yang sudah dipatok oleh DKP Kota Depok, yaitu mulai jam 08.00-17.00 WIB. Menurut salah satu petugas UPS Sadewa, yaitu Pak Sugeng Kristiarto, Pak Slamet dan seluruh petugas hampir tidak pernah telat dalam memulai pekerjaan. Hal ini dipengaruhi pula oleh gerobak sampah yang setiap pagi selalu datang jam 08.00 WIB, jadi UPS Sadewa harus sudah buka pada jam 08.00 WIB tersebut.

b. Kemampuan Pemimpin dalam Menciptakan Budaya Organisasi yang Mempertahankan Nilai-nilai sebagai Organisasi yang Terus Tumbuh dan Berkembang



Grafik 5.4

Persentase Kemampuan Pemimpin dalam Menciptakan Budaya Organisasi yang Mempertahankan Nilai-nilai sebagai Organisasi yang Terus Tumbuh dan Berkembang (n=12)

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, April 2012

Koordinator UPS Sadewa, yaitu Pak Slamet Riyanto mampu menciptakan budaya organisasi yang mempertahankan nilai-nilai sebagai organisasi yang terus tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dilihat pada grafik 5.4 diatas, terlihat bahwa 83% atau 10 responden memiliki jawaban baik, sedangkan sisanya yaitu 17% atau 2 responden memiliki jawaban buruk.

Menurut salah satu petugas UPS Sadewa, yaitu Pak Rasidi, Pak Slamet Riyanto ini adalah orang yang tegas dan disiplin. Ketegasan ini berdampak baik ketika UPS Sadewa menerapkan sistem pembagian 2 kelompok dalam pembuangan sampah ke UPS. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Pak Slamet.

“ya kalau mereka ga mau diatur, ya ga usah buang kesini...” (Riyanto, 2012).

Ketegasan Pak Slamet ini juga mampu membuat UPS Sadewa menjadi lebih baik, seperti yang diungkapkan oleh Pak Slamet, sewaktu UPS Sadewa pertama kali beroperasi pada tahun 2009, sampah masih banyak yang keluar hanggar. Hal ini terjadi karena koordinator bukan masyarakat sekitar UPS Sadewa, jadi cenderung bersikap tidak peduli. Ketegasan ini mencerminkan bahwa Pak Slamet cenderung berperilaku sesuai dengan etika dan nilai-nilai yang berlaku. Selain itu, Pak Slamet memiliki keuntungan lain, yaitu sejak tahun 1979 sudah tinggal di daerah Sadewa, Depok Tengah, jadi sangat memahami keadaan lingkungan sekitarnya.

Namun, terdapat kelemahan pada kepemimpinan Pak Slamet ini, yaitu kurangnya pengawasan terhadap pekerjaan di UPS Sadewa. Hal ini terjadi karena Pak Slamet memiliki pekerjaan lain, yaitu menjadi satpam di salah satu pabrik. Sehingga waktunya harus terbagi dua antara pekerjaannya sebagai Koordinator UPS Sadewa dan sebagai satpam.

c. Kemampuan Pemimpin dalam Mengalokasikan Sumber Daya untuk Kegiatan

Pak Slamet Riyanto merupakan pemimpin yang mampu mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan. Hal ini diperlihatkan dari jawaban baik yang memiliki persentase 100% atau total keseluruhan responden. Hal ini diungkapkan oleh Pak Rasidi, salah satu petugas UPS Sadewa yang mengatakan bahwa kompos yang dihasilkan UPS Sadewa cenderung meningkat setiap bulannya. Peningkatan jumlah kompos ini terjadi karena kemampuan petugas yang semakin meningkat dalam mengolah sampah serta penggunaan mesin yang maksimal. Namun, akibat mesin yang

rusak sejak akhir tahun 2011 yang lalu, akhirnya UPS Sadewa benar-benar mengarahkan sumber daya yang ada untuk tetap maksimal dalam melayani masyarakat, yaitu petugas UPS. Petugas-petugas di UPS Sadewa ini berupaya secara maksimal untuk menata sampah yang masuk agar tidak sampai membludak keluar hanggar. Pak Slamet Riyanto pun sangat menjaga agar petugas-petugas UPS Sadewa mampu melakukan hal tersebut.

V.2.1.2 Relationship-oriented

a. Terciptanya Komunikasi dengan Bawahan

Sebagai pemimpin di UPS Sadewa, Pak Slamet Riyanto mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan bawahan. Hal ini terlihat pada 100% atau total keseluruhan responden menjawab baik. Menurut Pak Rasidi, salah satu petugas UPS Sadewa, Pak Slamet selalu memberikan pengarahan kepada petugas yang lain dan terkadang Pak Slamet juga ikut bekerja mengolah sampah. Selain itu, koordinator dan seluruh petugas di UPS Sadewa ini bertempat tinggal di satu wilayah, jadi komunikasi juga sudah terjalin dengan baik dari sebelumnya.

b. Terjalin Kerja Sama

Kerja sama antara koordinator dengan petugas di UPS Sadewa belum terjalin dengan baik, hal ini terlihat pada persentase yang mencapai 100% atau keseluruhan responden menjawab buruk. Hal ini terjadi karena Pak Slamet kurang melibatkan petugas dalam pengambilan keputusan. Seperti ketika sampah di UPS Sadewa sudah penuh dan belum diangkut oleh truk sampah, Pak Slamet langsung menghubungi pihak DKP, terutama pihak yang berkaitan dengan pengangkutan agar sampah di UPS Sadewa segera diangkut. Jadi, tidak ada upaya untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan petugas lainnya. Hal ini diakui oleh petugas di UPS Sadewa, seperti Pak Rasidi yang menyatakan bahwa “... jarang sih, hampir ga pernah. Ya ambil keputusan aja, kecuali itu, eee, yang dibagi 2 kelompok itu. Kalau yang itu ya dirembug dulu sama warga.” (Rasidi, 2012). Selain itu, berdasarkan informasi dari Pak Rasidi, keinginan dari petugas untuk melibatkan diri

dalam pengambilan keputusan juga belum ada. Mereka cenderung mengikuti cara-cara yang sudah ada.

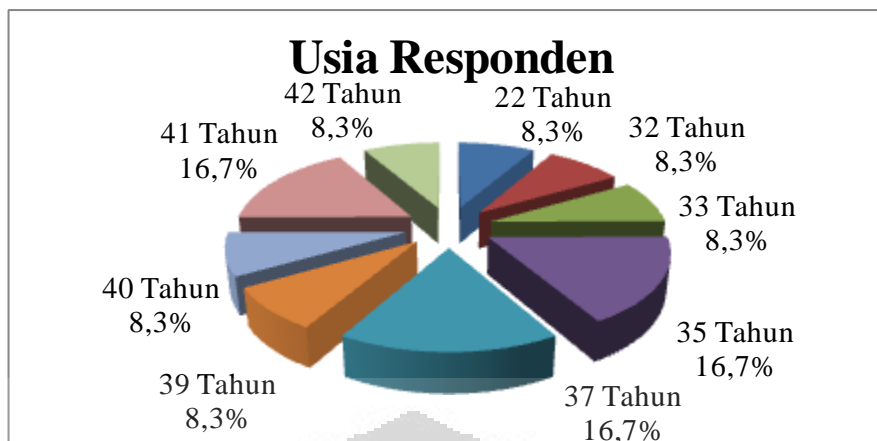
c. Pemimpin Memberikan Kesempatan Bawahan untuk Berkembang

Kesempatan petugas UPS Sadewa untuk berkembang sangat minim, hal ini terlihat dari 100% atau keseluruhan responden menjawab buruk. Hal ini terjadi bukan karena Pak Slamet tidak memberikan kesempatan, tetapi karena memang jarang dilakukan oleh pihak DKP maupun pihak lain yang bersangkutan. Hal ini dibenarkan oleh salah satu staf Seksi Pengolahan Sampah DKP Kota Depok, bahwa pelatihan untuk petugas UPS ini memang belum ada, hanya dilakukan sekali sewaktu pertama kali petugas ini mulai bekerja di UPS.

Melihat penjelasan diatas, terlihat bahwa model kepemimpinan di UPS Sadewa ini cenderung kepada model *task oriented* atau pemimpin yang berorientasi tugas. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang cenderung baik pada indikator-indikator model kepemimpinan *task oriented* tersebut. model kepemimpinan ini mampu membuat petugas UPS Sadewa lebih disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Terutama ketika mesin pengolahan sampah sudah tidak berfungsi lagi. Mereka tetap bekerja secara maksimal memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu menata sampah yang masuk agar tidak keluar hanggar sehingga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

V.2.2 Kepemimpinan di UPS Merdeka II

Penilaian kepemimpinan di UPS Merdeka II dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 12 petugas di UPS tersebut. Karakteristik dari 12 responden dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



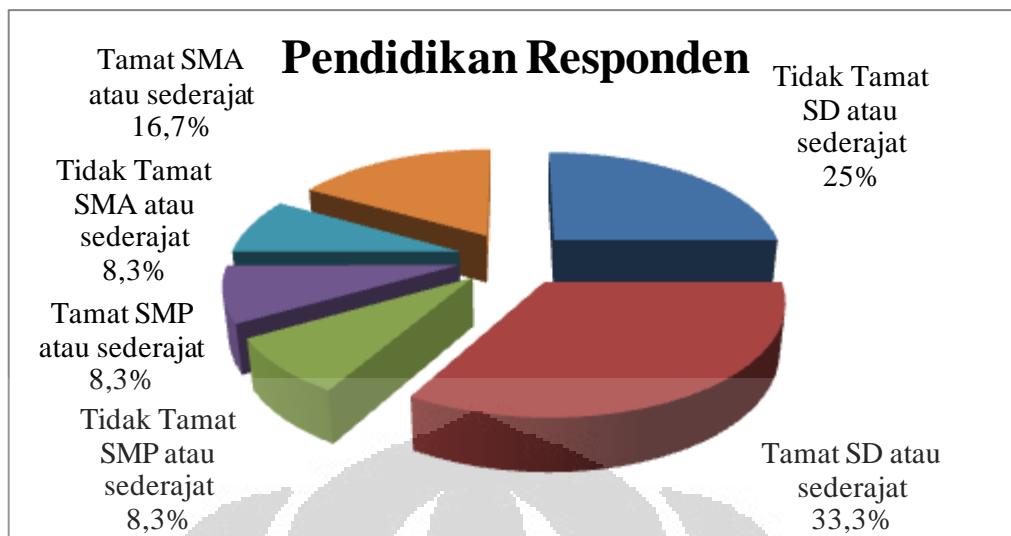
Grafik 5.5

Persentase Usia Responden (n=12)

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, April 2012

Melihat pada grafik 5.5 diatas terlihat bahwa usia responden beragam, yaitu antara usia 22-42 tahun. Untuk usia 22, 32, 33, 39, 40, dan 42 tahun memiliki persentase 8,3% atau 1 responden dimasing-masing usia. Sedangkan untuk usia 35, 37, dan 41 tahun memiliki persentase 16,7% atau 2 responden dimasing-masing usia. Sama halnya dengan usia petugas di UPS Sadewa, usia petugas di UPS Merdeka II ini pun berada pada usia produktif. Hal ini dikarenakan tugas di UPS Merdeka II juga berat, jadi membutuhkan pekerja yang kuat dan sehat pula.

Selanjutnya, keseluruhan responden dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin lelaki, yaitu dengan persentase 100%. Hal ini disebabkan seluruh petugas UPS Merdeka II berjenis kelamin laki-laki.



Grafik 5.6

Persentase Pendidikan Responden (n=12)

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, April 2012

Pada grafik 5.6 diatas terlihat bahwa pendidikan sebagian besar responden adalah tamat SD atau sederajat, yaitu sebesar 33,3% atau setara dengan 4 responden. Kemudian disusul dengan tidak tamat SD atau sederajat sebesar 25% atau 3 responden. Pendidikan tertinggi responden adalah tamat SMA atau sederajat, namun hanya 2 responden atau 16,7% yang berpendidikan SMA ini. Sisanya, yaitu tamat SMP atau sederajat dan tidak tamat SMA atau sederajat memiliki persentase 8,3% atau 1 orang responden. Keberadaan UPS Merdeka II ini juga memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang tidak berpendidikan tinggi, sama halnya dengan UPS Sadewa. Bahkan di UPS Merdeka II ini persentase paling tinggi adalah petugas yang memiliki pendidikan tamat SD atau sederajat. Selain itu, pendidikan tertinggi petugas di UPS Merdeka II ini adalah tamat SMA atau sederajat.

Selanjutnya, untuk penilaian responden terhadap model kepemimpinan di UPS Sadewa ini akan dijabarkan melalui grafik dan penjelasannya dibawah ini.

V.2.2.1 Task-oriented

a. Kesesuaian Perilaku Pemimpin dengan Etika dan Nilai yang Berlaku

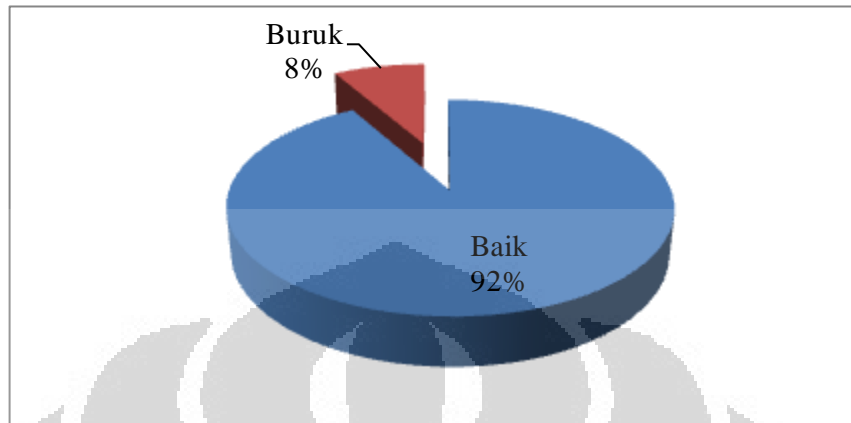
Pemimpin di UPS Merdeka II ini adalah Pak Irawan. Pak Irawan merupakan pemimpin yang dapat berperilaku sesuai dengan etika dan nilai yang berlaku. Hal ini ditunjukkan pada jawaban responden yang 100% atau total keseluruhan responden menjawab baik. Perilaku ini tercermin dari kedisiplinan Pak Irawan terhadap petugas-petugas UPS Merdeka II. Berdasarkan informasi dari salah satu petugas UPS Merdeka II, yaitu Pak Guntur, Pak Irawan termasuk pemimpin yang disiplin. Selain itu, Pak Irawan selalu memberi teguran kepada bawahannya yang tidak taat aturan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Guntur.

“... sering sih sanksi gitu. Kaya misalkan ga masuk tanpa ijin, apa gimana gitu, ya dikasih sanksi... ya kadang lisan, kadang juga disuruh ngapain gitu...” (Guntur, 2012).

b. Kemampuan Pemimpin dalam Menciptakan Budaya Organisasi yang Mempertahankan Nilai-nilai sebagai Organisasi yang Terus Tumbuh dan Berkembang

Pak Irawan merupakan pemimpin yang mampu menciptakan budaya organisasi yang mempertahankan nilai-nilai organisasi yang terus tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari 100% atau total keseluruhan responden memiliki jawaban baik. Kemampuan Pak Irawan ini diperoleh dari sikap disiplin kepada bawahannya. Salah satu petugas UPS Merdeka II, yaitu Pak Agus Sulaeman mengatakan bahwa *“... masalahnya kan, bagus ga-nya disini kan tergantung sama Pak Irawan. Kalau dia-nya ga ini, apa namanya, tegas gitu, ya anak-anak ga bakalan bisa bagus. Terus kan di kampung sini kan dia dihormatin lah.”* (Sulaeman, 2012). Jadi, terlihat bahwa Pak Irawan mampu membawa bawahannya untuk bekerja dengan baik.

c. Kemampuan Pemimpin dalam Mengalokasikan Sumber Daya untuk Kegiatan



Grafik 5.7

Persentase Kemampuan Pemimpin dalam Mengalokasikan Sumber Daya untuk Kegiatan (n=12)

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, April 2012

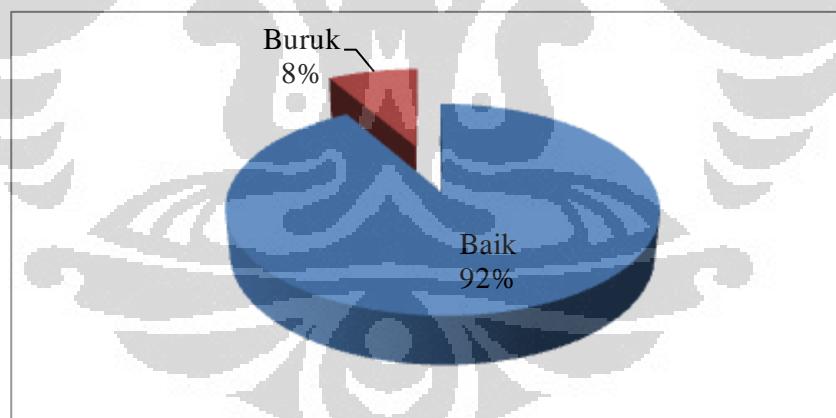
Koordinator UPS Merdeka II, yaitu Pak Irawan, merupakan pemimpin yang mampu mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan. Hal ini ditunjukkan oleh grafik 5.7 diatas, terlihat bahwa 92% atau 11 responden menjawab baik, dan hanya 1 responden atau 8% menjawab buruk. Pengalokasian sumber daya yang maksimal ini telah dilakukan UPS Merdeka II, terutama untuk mesin pengolahan sampah. Setiap harinya mesin ini digunakan secara maksimal oleh petugas. Namun, kemampuan mesin tersebut memang tidak sebanding dengan jumlah sampah yang harus diolah. Begitu pula dengan solar yang digunakan untuk menjalankan mesin tersebut. Pak Irawan sendiri menyampaikan bahwa jatah solar dari DKP Kota Depok adalah 20 liter per hari, jumlah ini dirasakan kurang. Tapi UPS Merdeka II harus tetap bisa menjalankan tugasnya walaupun sumber daya yang ada belum sepenuhnya tercukupi.

V.2.2.2 Relationship-oriented

a. Terciptanya Komunikasi dengan Bawahan

Pak Irawan dapat menciptakan komunikasi yang baik dengan petugas UPS Merdeka II. Hal ini dapat dilihat dari persentase yang mencapai 100% atau total keseluruhan responden menjawab baik. Hal ini terjadi karena Pak Irawan ini sering melakukan pengawasan di UPS. Selain sebagai koordinator UPS Merdeka II, Pak Irawan merupakan anggota dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), jadi lebih banyak waktu luang daripada koordinator di UPS Sadewa, yaitu Pak Slamet Riyanto, yang bekerja juga sebagai satpam. Jadi, interaksi Pak Irawan dengan petugas UPS Merdeka II ini lebih sering terjadi. Selain itu, Pak Irawan ini juga berasal dari masyarakat sekitar UPS Merdeka II, sama seperti para petugasnya. Jadi hubungan mereka sudah terjalin dengan baik dari sebelumnya. Hal ini akhirnya berpengaruh pada komunikasi yang dapat berjalan dengan baik antara Pak Irawan dengan petugas UPS Merdeka II.

b. Terjalin Kerja Sama



Grafik 5.8

Persentase Terjalin Kerja Sama (n=12)

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, April 2012

Melihat grafik 5.8 di atas terlihat bahwa Pak Irawan mampu menjalin kerja sama yang baik dengan bawahannya, yaitu petugas UPS Merdeka II. Hal ini ditunjukkan oleh persentase 92% atau 11 responden menjawab baik, sedangkan sisanya yaitu 8% atau 1 responden menjawab buruk. Kerja sama

yang terjalin dengan baik ini terjadi karena interaksi yang dilakukan oleh Pak Irawan dengan petugas cukup intens. Selain itu, Pak Irawan juga sering melakukan konsultasi dengan petugas dalam pengambilan keputusan. Menurut Pak Marjuki, salah satu petugas UPS Merdeka II, jika ada masalah, Pak Irawan mengajak petugas untuk menyelesaikannya bersama. Namun, terkadang memang tidak semua petugas diajak bicara oleh Pak Irawan, hanya beberapa saja. Seperti ketika mesin mengalami kerusakan, Pak Irawan terlebih dahulu meminta petugas untuk memperbaikinya. Namun, apabila kerusakannya parah maka Pak Irawan meminta DKP Kota Depok untuk memeriksanya.

c. Pemimpin Memberikan Kesempatan Bawahan untuk Berkembang

Pak Irawan dapat memberikan kesempatan untuk bawahannya bisa berkembang. Hal ini ditunjukkan oleh persentase 100% atau total keseluruhan responden menjawab baik. Hal ini dikarenakan, seluruh petugas UPS Merdeka II pernah memiliki kesempatan untuk pelatihan dari DKP di UPS Sukatani. UPS Sukatani ini telah beroperasi sebelum UPS Merdeka II. Pelatihan ini lebih mengarah pada pembelajaran cara-cara mengolah sampah dan kompos. Pelatihan ini sangat membantu petugas UPS Merdeka II dalam memahami cara-cara pengolahan sampah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Guntur.

“ya guna banget, Mbak. Eee, kita kan jadi tau ya, eee, apa itu, kaya ngolah sampah organik sampai jadi kompos. Cara milah-milahnya, terus, eee, nyacah, sama ngayaknya...” (Guntur, 2012).

Melalui penjelasan diatas, terlihat bahwa model kepemimpinan di UPS Merdeka II adalah model gabungan dari model task oriented dengan model relationship oriented. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan-pernyataan baik pada setiap indikator kedua model tersebut. Hal ini terjadi karena Pak Irawan merupakan tipe orang yang disiplin namun mampu menciptakan hubungan yang baik dengan bawahannya. Hubungan ini juga tercipta dari lingkungan tempat tinggal mereka yang berada dalam satu wilayah. Jadi, baik Pak Irawan

maupun petugas UPS Merdeka II sudah mengenal satu sama lain sebelum mereka bekerja di UPS. Hal ini mampu membawa petugas UPS Merdeka II bekerja secara maksimal, walaupun pengolahan sampah belum mampu mereka kerjakan secara optimal karena keterbatasan mesin.

V.3 Finansial

Ukuran finansial menjadi salah satu alat untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi. Namun untuk organisasi publik, ukuran finansial lebih menitikberatkan pada kemampuan mengatur pengeluaran sejumlah anggaran dan dapat meningkatkan kinerja dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atau berfokus pada pelayanan publik. Seperti pelayanan persampahan di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok –yang dilakukan oleh UPS Sadewa dan UPS Merdeka II. Dalam penelitian ini, ukuran finansial untuk UPS Sadewa dan UPS Merdeka II lebih melihat ke besaran anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok untuk kedua UPS tersebut, serta bagaimana kedua UPS ini mengelola anggarannya sehingga dapat menciptakan pelayanan persampahan yang memuaskan kebutuhan masyarakat Kecamatan Sukmajaya.

V.3.1 Anggaran Pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS)

Pelaksanaan tugas pelayanan persampahan yang dilakukan oleh UPS Sadewa dan UPS Merdeka ini memerlukan suatu tempat dimasing-masing titik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Depok. Tempat atau hanggar dari kedua UPS ini digunakan untuk mengolah sampah dari masyarakat sekitar. Pembangunan hanggar tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui proses tender. Pada tahun 2007-2008, proses tender tersebut dilakukan langsung oleh DKP Kota Depok, termasuk tender untuk pembangunan hanggar di Kecamatan Sukmajaya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Moch. Isa, Kasie Pengadaan Sarana Prasarana DKP Kota Depok, “iya, yang Sukmajaya dari sini. Tapi kalau yang baru sudah lewat Pemda, lewat LPSE.” (Isa, 2012).

Anggaran untuk membangun satu hanggar UPS ini bernilai 500 juta lebih. Rata-rata nilai ini hampir sama untuk semua UPS, begitu pula dengan UPS di Kecamatan Sukmajaya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Moch. Isa.

“Sukmajaya, ya kurang lebih 500 juta, itu dengan berbagai item pekerjaan ya. Ada nguruk, ada segala macam. Ga langsung dibangun gitu karena tanahnya belum tentu tanah siap pakai, belum tentu itu. Kadang ada tanahnya yang curam, jadi kita ada kegiatan pemerataannya dulu. Jadi 500 juta itu sudah include dari ngurusin tanah sampai jadi bangunan.” (Isa, 2012).

Anggaran pembangunan UPS di Kecamatan Sukmajaya ini berasal dari APBD Kota Depok. Berdasarkan data dari DPPK (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset) Kota Depok, alokasi untuk pembangunan satu hanggar UPS pada tahun 2007 sebesar Rp 579.954.650,- yang terdiri dari Rp 550.000.000 untuk bangunan fisik, dan sisanya digunakan untuk kegiatan operasional pembangunan dan juga honorarium kegiatan. Salah satu staf dari DPPK Kota Depok, yaitu Pak Didit mengungkapkan bahwa pada tahun 2007 ini, pembangunan UPS menjadi agenda utama Walikota, sehingga dana yang dialokasikan cukup besar.

Namun, berhubung terdapat keterbatasan data dari pihak DKP, maka Peneliti tidak mengetahui besaran dana yang benar-benar terpakai untuk pembangunan UPS tersebut. besaran dana ini hanya diketahui dari hasil wawancara dengan Pak Moch Isa, yaitu sekitar 500 juta untuk pembangunan satu hanggar.

Selain untuk pembangunan fisik, terdapat pula pengadaan untuk mesin pengolahan sampah. Pengadaan mesin ini juga diperoleh dengan cara membuka tender. Anggaran yang digunakan untuk pengadaan satu set mesin pengolahan sampah ini berkisar 280 juta. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Moch. Isa.

“...Mesin itu seperangkat itu kurang lebih 280 juta. Mesin itu ada banyak, ada 4 satu set itu.” (Isa, 2012)

Padahal, untuk alokasi pengadaan mesin pengolahan sampah ini mencapai 400 juta (Anggi, 2012). Hal ini dibenarkan oleh pihak DPPK Kota Depok pada wawancara 12 April 2012, untuk tahun 2008-2009 besaran alokasi untuk pengadaan mesin tersebut adalah Rp 349.725.000,-. Nilai ini jauh lebih besar dari dana yang digunakan oleh DKP. Artinya, kemampuan DKP dalam menggunakan anggaran untuk mesin ini belum maksimal. Pada akhirnya, kualitas mesin yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat karena sering sekali rusak (Anggi, 2011). Seringnya mesin rusak ini menyebabkan pengolahan sampah tidak maksimal, sehingga sering terjadi penumpukan sampah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sukmajaya, yaitu di UPS Sadewa dan UPS Merdeka II.

V.3.2 Anggaran Operasional Unit Pengolahan Sampah (UPS)

Setiap UPS yang beroperasi membutuhkan dana agar mampu melakukan tugasnya dengan baik. Dana operasional UPS ini berasal dari APBD Kota Depok, khususnya dari retribusi. Tarif retribusi untuk pelayanan persampahan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Untuk wilayah Kecamatan Sukmajaya yang sampahnya masuk ke UPS Merdeka II dan Sadewa adalah sampah rumah non real estate dan sampah rumah real estate. Besaran tarif berdasarkan luas bangunan adalah sebagai berikut:

- a) Sampah rumah non real estate:
 - Lebih kecil atau sama dengan 21 m² Rp 2000/bulan
 - 22 m² sampai dengan 70 m² Rp. 3.500,- / bulan
 - 71 m² sampai dengan 200 m² Rp. 4.500,- / bulan
 - 201 m² sampai dengan 300 m² Rp. 6.000,- / bulan
 - Diatas 300 m² Rp. 3.500,- / bulan
- b) Sampah rumah real estate:
 - 21 m² sampai dengan 36 m² Rp. 7.000,- / bulan
 - 37 m² sampai dengan 54 m² Rp. 8.500,- / bulan
 - 55 m² sampai dengan 70 m² Rp. 10.000,- / bulan

- 71 m² sampai dengan 120 m² Rp. 12.500,- / bulan
- Diatas 120 m² Rp. 17.500,- / bulan

Retribusi tersebut dibayarkan ke Pemerintah Kota Depok dan selanjutnya diserahkan kepada DKP untuk kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan, dalam satunya adalah untuk operasional UPS. Dana untuk operasional UPS dipegang oleh DKP, kecuali untuk gaji, DKP menyerahkan anggaran ke koordinator setiap bulannya, selanjutnya koordinator akan mendistribusikannya ke petugas UPS. Selain gaji, pihak UPS hanya menerima dalam bentuk barang, seperti solar untuk menggerakkan mesin. Setiap bulannya, petugas UPS menerima gaji Rp 750.000,- dari DKP. Kemudian, untuk mesin, setiap UPS menerima 20 liter solar setiap minggunya. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Irawan, Koordinator UPS Merdeka II.

“kita paling Cuma butuh solar. Kira-kira sehari itu pake 20 liter. Ya tinggal di kaliin aja tuh sama harganya sampe sebulan.” (Irawan, 2012).

Tabel 5.2

Anggaran Operasional Bulanan Unit Pengolahan Sampah (UPS)

No.	Kegiatan operasional	Anggaran
1.	Gaji Petugas (14 x Rp 750.000)	Rp 10.500.000
2.	Solar (20 liter x 30 hari x Rp 4500)	Rp 2.700.000
Jumlah		Rp 13.200.000

Sumber: Diolah oleh Peneliti

Melihat tabel 5.2 diatas, kebutuhan operasional UPS setiap bulannya mencapai Rp 13.200.0000,-. Besaran ini sama untuk semua UPS, termasuk di Kecamatan Sukmajaya. Untuk UPS di Kecamatan Sukmajaya ini, operasionalnya dimulai pada tahun 2009. Dana untuk perasional UPS ini

berasal dari APBD Kota Depok. Anggaran setiap tahun untuk operasional UPS tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.3
Anggaran Tahunan Untuk Satu Unit Pengolahan Sampah (UPS)

No.	Uraian	Besaran 2009	Besaran 2010	Besaran 2011
1.	Honorarium Petugas UPS	126.000.000	76.160.000	131.577.700
2.	BBM Operasional	67.824.000	28.404.000	57.511.800
Jumlah		193.824.000	104.564.000	189.089.500

Sumber: DPPK Kota Depok

Pada tahun 2009, anggaran untuk satu UPS setiap bulannya adalah Rp 16.152.000,-. Besaran ini masih bisa menutupi kegiatan operasional di UPS. Namun, pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2010, anggarannya menjadi Rp 8.713.667,- setiap bulan. Jumlah ini tidak sebanding dengan kebutuhan UPS setiap bulannya, sehingga DKP harus mencari upaya lain untuk menutupi kekurangan tersebut. Sedangkan untuk tahun 2011, anggarannya kembali meningkat menjadi Rp 15.757.458,- setiap bulannya.

Menurut petugas UPS, kebutuhan operasional yang diberikan oleh DKP ini masih kurang. Seperti solar yang hanya disediakan 20 liter setiap hari, namun mereka berusaha untuk mengoptimalkan yang ada. Sedangkan untuk gaji petugas, jumlah yang diberikan oleh DKP, yaitu Rp 750.000,- ini masih dirasakan kurang oleh UPS. Selain itu, petugas UPS juga tidak memperoleh tunjangan apapun karena mereka hanya pegawai kontrak. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Irawan.

“...Yang kurang sih paling gaji pekerja. Di bawah UMR gaji mereka, Cuma 750 ribu. Ditung-itung cuma 28.000 sehari. Udah gitu sama sekali ga dapet tunjangan kesehatan. Padahal mereka tiap hari kerjanya bareng sampah. Padahal kan kesejahteraan mereka juga

perlu diperhatiin. Mereka mah kalau ada kerjaan lain, ya mending kerja yang lain.” (Irawan, 2012)

Hal ini diperkuat pula oleh pernyataan Pak Slamet Riyanto, Koordinator UPS Sadewa.

“...kalau dari UMP ya kita memang masih dibawah standar dan itu kita juga ga bisa menolak karena memang itu udah dari sananya. Dan kita juga ga mendapatkan fasilitas yang lain selain gaji. Apa itu askes, apa itu jamsostek, ga ada. Kita cuma dapet gaji, sama subsidi BBM aja, apa itu, solar untuk mesin.” (Riyanto, 2012)

Besaran anggaran untuk satu UPS ini bisa mencapai ratusan juta setiap tahunnya, padahal UPS yang menjadi tanggungan Pemerintah Kota Depok ada 19 UPS. Sehingga beban yang harus ditanggung pemerintah untuk melakukan pelayanan persampahan melalui UPS ini mencapai 1 milyar lebih, padahal masih ada pelayanan lain, seperti pengangkutan dan TPA Cipayung. salah satu staf DKP Kota Depok, yaitu Ibu Made mengungkapkan bahwa anggaran untuk operasional UPS ini terhitung sangat membebani Pemerintah Kota Depok karena biaya operasionalnya cukup besar, padahal pelayanan yang harus disediakan oleh pemerintah tidak hanya pelayanan persampahan. Hingga tahun 2012 ini, UPS yang beroperasi berjumlah 19 UPS, dan rencananya setiap tahun akan bertambah UPS yang beroperasi. Oleh karenanya, tujuan kedepannya, pemerintah mengharapkan ada kemandirian disetiap UPS. Biaya operasional ini nantinya akan ditanggung secara swadaya oleh masyarakat setempat. Jika sudah demikian, pemerintah hanya memantau setiap pekerjaan di UPS tersebut. Selain itu, anggaran dari pemerintah bisa digunakan untuk penyediaan fasilitas pekerja UPS. Sehingga, diharapkan kedepannya para petugas ini bisa lebih maksimal lagi dalam melakukan pekerjaannya.

V.4 Hasil

V.4.1 *Product Outcomes*

V.4.1.1 Terbangunnya Tempat Pengolahan Sampah

a. Unit Pengolahan Sampah (UPS) Sadewa

Unit Pengolahan Sampah (UPS) Sadewa dibangun pada tahun 2008 dan terletak di di Jln. Sadewa Raya, Depok Tengah, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya. UPS ini memiliki luas bangunan dan luas tanah sebesar $\pm 316 \text{ m}^3$, UPS ini merupakan bagian dari fasilitas sosial dan umum di Kecamatan Sukmajaya. Lokasi UPS Sadewa ini terletak dikawasan pemukiman, jarak antara UPS dengan pemukiman sangat dekat, yaitu kurang dari 5 meter. Terdapat banyak pemukiman di sekitar UPS Sadewa ini.

Bangunan UPS Sadewa merupakan bangunan dengan penutup semi terbuka yang berbahan seng sehingga memungkinkan bau sampah menyebar keluar. Bau sampah ini akan semakin tercium apabila musim hujan tiba karena bentuk bangunannya memungkinkan air hujan dapat masuk ke lokasi UPS. Menurut informasi dari salah satu staf Seksi Pengolahan Sampah, yaitu Ibu Made, sampah yang terkena air ini akan menjadi basah dan mengeluarkan air sampah. Air sampah ini kemungkinan mengandung logam berat dan berbahaya jika tidak diolah. Air sampah di UPS Sadewa ini dibiarkan begitu saja mengalir dilantai UPS yang terbuat dari semen. Padahal air sampah ini berpotensi mencemari air sungai yang berada tepat di sebelah UPS Sadewa. Meskipun demikian, letak UPS Sadewa ini memiliki keuntungan, yaitu akses jalan yang luas dan dekat dengan jalan raya, sehingga memudahkan pengangkutan.

Bangunan UPS Sadewa ini terdiri dari tiga bagian area. Area pertama memiliki luas sekitar 1/6 luas UPS Sadewa, area ini dimanfaatkan untuk sarana Kamar Mandi dan kantor yang terletak dilantai dua. Area kedua memiliki luas sekitar 3/6 luas UPS dan berfungsi sebagai tempat menaruh sampah dan mesin pengolahnya. Kemudian area ketiga memiliki luas sekitar

2/6 luas UPS dan berfungsi sebagai area pengomposan. Area pengomposan ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada area pengumpulan sampah. Namun, berhubung kegiatan pengomposan ini tidak berjalan kurang lebih sejak akhir tahun 2011, maka area pengomposan ini dipakai sebagai tempat menaruh sampah. Sehingga bisa dikatakan hampir 50% dari bangunan UPS Sadewa digunakan untuk tempat pengumpulan sampah.

Fasilitas yang tersedia di UPS Sadewa ini ada kantor dan kamar mandi. Namun kantor ini tidak digunakan karena memang tidak ada petugas administrasi, jadi dimanfaatkan sebagai tempat istirahat petugas UPS. Seperti pernyataan dari Pak Rasidi, salah satu petugas UPS Sadewa.

“ga, ga dipake. Orang ga ada petugas yang make. Dari awal emang udah ga ada. Eee, ya paling dipake kita-kita aja buat istirahat. Tapi itu juga jarang sih...” (Rasidi, 2012).

Selain itu, Pak Rasidi juga mengungkapkan bahwa kondisi kamar mandi ini dalam keadaan kurang baik. Sumber air bersih diambil dari Gereja Methodis yang berada disebelah UPS Sadewa, namun keadaan kamar mandi ini memprihatinkan karena pintunya sering terlepas dan airnya mampet, jadi jarang digunakan oleh petugas.

b. Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka II

UPS Merdeka II berlokasi di Jl. Merdeka, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Luas bangunan UPS Merdeka II ini sekitar \pm 466 m². Letak UPS Merdeka II ini dekat dengan pemukiman penduduk, jarak antara bangunan UPS ini sekitar 5 meter dari pemukiman. UPS Merdeka II ini dilengkapi dengan fasilitas lainnya, yaitu kantor administrasi, dan kamar mandi. Namun, sama halnya dengan UPS Sadewa, kantor administrasi ini tidak digunakan karena tidak adanya petugas administrasi. Untuk keadaan kamar mandinya, masih lebih baik dari UPS Sadewa, walaupun memang agak kotor.

Pemanfaatan UPS Merdeka II ini terbagi menjadi empat area, yaitu, area fasilitas kantor dan kamar mandi, area penumpukan sampah dan mesin pengolahnya, area pengomposan, dan area pengumpulan sampah an-organik. Area terbesar digunakan untuk tempat menaruh sampah dan mesin pengolahnya, yaitu lebih dari 50%. Hal ini terjadi karena sampah yang masuk tidak bisa diolah seluruhnya karena terbatasnya kapasitas mesin.

Bentuk bangunan UPS Merdeka II ini sama dengan UPS Sadewa, yaitu bangunan dengan penutup semi terbuka yang berbahan seng, sehingga memungkinkan air hujan akan masuk. Air yang masuk ke dalam hanggar ini akan menyebabkan bau sampah yang semakin menyengat. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Waluyo, salah satu warga yang tinggal di dekat UPS Merdeka II.

“...Kalo ini kan bau doang, apalagi kalo sampah udah numpuk ga diangkut-angkut sampai keluar pintu, nyesek liatnya. Apalagi kemarin kan bocor, airnya itu masuk terus keluar, itu bau banget. Sampai radiusnya bisa 200-300 meter.” (Waluyo, 2012).

Bau menyengat dari sampah ini sangat mengganggu masyarakat sekitar, terlebih kawasan lingkungan sekitar UPS Merdeka II ini adalah kawasan rawan banjir. Sehingga bau yang menyengat dari sampah tersebut semakin mengganggu ketika musim hujan.

V.4.1.2 Kapasitas Mesin Pengolahan Sampah

a. Unit Pengolahan Sampah (UPS) Sadewa

UPS Sadewa ini dilengkapi dengan mesin pengolahan sampah. Mesin ini terdiri dari mesin pencacah dan mesin pengayak. Mesin pencacah ini berjenis MC 1000, seperti yang diungkapkan oleh Pak Rasidi.

“ini mesinnya MC 1000, ini ada tulisannya kan (sambil menunjuk ke mesin)...” (Rasidi, 2012).

Mesin pencacah ini dapat mengolah sampah dengan kapasitas 30m^3 setiap 2 jam, namun pada kenyataannya belum mampu mengolah sebanyak itu karena keterbatasan tenaga dan waktu. Perharinya UPS Sadewa dapat mengolah sampah hingga 25 gerobak, atau setara dengan 27 m^3 sampah. Padahal jumlah sampah yang masuk ke UPS ini mencapai 42 gerobak atau setara dengan 45 m^3 sampah. Jika Hari Senin dan Sabtu, jumlah sampah yang masuk menjadi 2 kali lipat dibandingkan hari yang lain, yaitu mencapai 84 gerobak atau setara dengan 91 m^3 sampah. Hal ini terjadi karena seperti yang telah dijelaskan pada sub bab proses pelayanan, bahwa pada Hari Senin dan Sabtu tersebut seluruh RW yang menjadi tanggung jawab UPS Sadewa membuang sampahnya. Sedangkan hari lain, sistem pembuangannya dibagi menjadi dua kelompok.

Namun, pengolahan sampah di UPS Sadewa ini sudah tidak berfungsi lagi karena mesin rusak, khususnya mesin pencacah. Kerusakan mesin ini sudah terjadi sejak akhir tahun 2011, namun hingga Maret 2012, belum juga ada tindakan dari DKP Kota Depok. Menurut informasi dari wartawan Jurnal Depok, Yaitu Pak Apik Yudha, mesin yang rusak ini perlu menunggu 6 bulan baru akan diperbaiki.

“...Dan nunggu service-nya lama, sampai 6 bulan.” (Yudha, 2012).

Menurut Pak Apik Yudha, perbaikan mesin yang harus menunggu selama 6 bulan ini sudah merupakan prosedur dari pemerintah karena biaya perawatan sangat mahal, jadi tidak bisa setiap saat langsung diperbaiki.

“ya memang begitu prosedurnya, biaya perawatan kaya gitu kan mahal. Ada tiap tahun dikucurin dana perawatan.” (Yudha, 2012).

Terdapat dugaan bahwa mesin yang dipakai di semua UPS di Kota Depok -termasuk UPS Sadewa- ini berupa mesin bekas. Dugaan ini muncul karena mesin pencacah di UPS hampir setiap 2 bulan mengalami kerusakan. Padahal asumsinya, dengan spesifikasi mesin yang seharusnya, kondisi mesin tersebut dapat bertahan hingga 5 tahun. Hal ini diungkapkan oleh wartawan Jurnal Depok, yaitu Pak Apik Yudha.

“...Tapi kan itu mesinnya 2 bulan mati, 2 bulan mati. Per 2 bulan. Padahal kalo menurut itungannya, itu kuat sampai 5 tahun. Kalo spec-nya sesuai ya. Mesin-mesin aja second semua.” (Yudha, 2012).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Petugas UPS Sadewa, sebelum rusak, mesin juga tidak bisa bekerja secara optimal. Setiap harinya, mesin harus diistirahatkan minimal setiap 2 jam karena jika digunakan secara terus-menerus, mesin akan cepat panas dan akhirnya rusak. Kualitas mesin yang tidak optimal ini membuat kinerja UPS Sadewa dalam mengolah sampah menjadi semakin berkurang. Terlebih ketika mesin tersebut benar-benar sudah tidak bisa digunakan, UPS Sadewa tidak dapat lagi mengolah sampah. Ketika Peneliti melakukan konfirmasi ke DKP perihal mesin di UPS Sadewa ini, pihak DKP mengungkapkan bahwa mesin memang belum bisa diperbaiki. Namun, pihak DKP memiliki rencana untuk mengangkut seluruh sampah di UPS Sadewa, setelah itu baru mereka akan memperbaiki mesinnya. Permasalahannya, pengangkutan sampah tersebut tidak bisa dilakukan dengan cepat karena armada yang ada terbatas. Selain itu, armada ini juga harus mengangkut sampah ditempat lain. Sehingga belum bisa dipastikan kapan mesin UPS Sadewa ini akan diperbaiki.

b. Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka II

UPS Merdeka Iin dilengkapi dengan mesin pencacah dan mesin pengayak. Mesin pencacah ini berjenis 1000 MC. Mesin pengolahan sampah ini masih bisa berfungsi dengan baik, walaupun kapasitasnya terbatas. Setiap harinya mesin ini hanya mampu mengolah sampah 25-30m³. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Herniwaty dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok.

“ya kalau untuk UPS itu paling kapasitasnya sekitar 25-30 m³ lah...”
(Herniwaty, 2012).

Kapasitas mesin ini tidak sebanding dengan jumlah sampah yang masuk ke UPS Merdeka II. Menurut koordinator UPS Merdeka II, yaitu Pak Irawan, dalam sehari gerobak yang masuk ke UPS ini mencapai 35 gerobak dan ada

tambahan sampah dari gerobak motor serta sampah yang diletakkan didepan UPS oleh warga. Jumlah sampah yang masuk ini jumlahnya sekitar 38-43 m³. Perharinya, semua sampah yang masuk tersebut tidak mampu diolah seluruhnya.

“35 gerobak, ini sampah yang diatur. Terus yang ditumpuk didepan (UPS) bisa 2 gerobak. Terus ada geromo (gerobak motor), yang ngambilin sampah dipinggir-pinggir jalan, ini bisa sampe 3 geromo tiap harinya... Semuanya ga bisa terolah, dari mesin yang ada tidak memadai.” (Irawan, 2012).

Ketika beroperasi, mesin pengolah ini akan mengeluarkan bising. Tetapi, hal ini tidak mengganggu masyarakat karena letak UPS Merdeka ini dipinggir jalan raya, jadi kebisingan mesin dapat ditutup oleh bunyi kendaraan yang lewat.

Namun, terdapat informasi bahwa mesin yang digunakan di UPS Merdeka II ini merupakan mesin dari UPS Merdeka I yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Hal ini disebabkan mesin milik UPS Merdeka II ini rusak dan masih dalam perbaikan. Hal ini diungkapkan oleh Pak Apik Yudha, wartawan dari Harian Jurnal Depok.

“...Merdeka II itu juga ga punya mesin... Itu mesin dari mana? Dari Merdeka I. Katanya mesinnya lagi di service...” (Yudha, 2012).

V.4.1.3 Kualitas Hasil Produk Unit Pengolahan Sampah (UPS)

a. Unit Pengolahan Sampah (UPS) Sadewa

Produk dari pengolahan sampah di UPS adalah kompos. Hingga saat ini, UPS Sadewa hanya mampu mengolah sampah organik, sedangkan pemanfaatan sampah anorganik belum ada.

Berdasarkan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan Kementerian

Pekerjaan Umum (2003, hal. 3), persyaratan umum suatu tempat dapat melakukan pengomposan adalah:

- Lokasi pembuatan kompos harus sedekat mungkin dengan daerah pelayanan
- Luas lahan yang dibutuhkan kurang lebih 216 M²
- Tersedianya bahan baku sampah organik dan anorganik minimal 3 m³ per hari.

Melihat persyaratan umum diatas, UPS Sadewa dapat memenuhi ketiga syarat tersebut. Letak UPS Sadewa ini sangat dekat dengan daerah pelayanan, walaupun ada beberapa RW (daerah pelayanan) yang jauh, namun sebagian besar daerah pelayanannya dekat dengan UPS. Selain itu, luas lahan UPS ini lebih dari 216 m², yaitu 316 m². Jumlah sampah yang dibawa ke UPS Sadewa ini setiap harinya melebihi 3 m³, yaitu mencapai 45-91 m³ sampah.

Komposisi sampah di UPS Sadewa ini sebagian besar adalah sampah organik, berdasarkan informasi dari salah satu petugasnya, sampah organik ini mencapai lebih dari setengah dari jumlah sampah. Dengan kapasitas mesin yang ada dan kemampuan dari petugas, UPS Sadewa dapat menghasilkan kompos 70-150 karung setiap bulannya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Rasidi, salah satu petugas UPS Sadewa.

“kalo sebulan itu kita dulu bisa sampai 70 karung. Terus naik lagi jadi 80, ya paling banyaknya itu bisa sampai 150.” (Rasidi, 2012).

Pengujian kualitas untuk produk kompos yang dihasilkan oleh UPS Sadewa ini belum pernah dilakukan. Namun, dari pernyataan Pak Burhanudin, Kasie Pengolahan Sampah DKP Kota Depok, kualitas kompos di semua UPS memang belum bagus, masih terdapat kandungan-kandungan kimia yang kurang baik untuk tanaman konsumsi.

“...Sebenarnya kualitasnya bukan ga bagus, tapi belum bagus lah, terutama untuk tanaman yang bisa dikonsumsi... Katanya terlalu

banyak kadar timbalnya, logam. Tapi ini sebagian ya, ada juga yang bagus.” (Burhanudin, 2012).

Hasil kompos ini selanjutnya akan dibawa oleh DKP ke rumah kompos. Untuk pendistribusian kompos ini, DKP bekerja sama dengan Departemen Pertanian, seperti yang dikatakan oleh Ibu Enthy Sukarti, Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, *“yang saya tahu itu selama ini kerja sama dengan Dinas Pertanian...”* (Sukarti, 2012). Selain, Departemen Pertanian, instansi-instansi vertikal lainnya juga terkadang ikut mengambil kompos ini. Namun, tidak semua kompos akan dibawa oleh Departemen Pertanian atau instansi vertikal lainnya karena kualitasnya yang belum teruji dengan baik. Sisanya, dapat diambil masyarakat secara cuma-cuma. Hal ini diungkapkan oleh Pak Burhanudin.

“...Kita kan sistemnya masih open ya mbak, siapa yang mau ya tinggal ambil. Ini sih buat saat ini. nanti sih kalau udah komposnya berkualitas tinggi, ya tentu ada harganya ya. Pernah juga dulu, kaya instansi-instansi vertikal atau horizontal, kaya kalangan TNI suka ngambil kalau memerlukan kompos untuk tanaman yang sifatnya bukan untuk dimakan ya...” (Burhanudin, 2012).

Namun, untuk saat ini UPS Sadewa tidak lagi memproduksi kompos akibat mesinnya rusak. Sehingga kegiatan mereka hanya menampung dan menata sampah agar tidak sampai keluar hanggar. Sampah-sampah tersebut kemudian diangkut oleh truk sampah ke TPA Cipayung.

Untuk jenis sampah an-organik, UPS Sadewa menyerahkannya kepada pemulung. Menurut petugas UPS Sadewa, pemulung ini akan diberi kesempatan untuk masuk hanggar pada waktu siang hari, yaitu sekitar pukul 14.00, sehingga tidak mengganggu kegiatan yang lain. Padahal jika UPS Sadewa bisa memanfaatkan sampah an-organik itu menjadi sesuatu yang bernilai, maka akan menjadi nilai tambah bagi petugas di UPS Sadewa dan juga masyarakat sekitar. Namun, hal ini memang belum bisa dilakukan karena kesadaran dari petugas maupun masyarakat akan nilai tambah dari

sampah an-organik belum ada. Mereka juga belum mampu untuk melakukan pemanfaatan seperti daur ulang sampah an-organik menjadi barang yang memiliki nilai tambah, seperti kerajinan tas atau yang lainnya.

b. Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka II

Sama seperti UPS Sadewa, produk dari UPS Merdeka II ini adalah kompos. UPS Merdeka II juga memenuhi persyaratan umum yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (2003, hal. 3), yaitu letak UPS Merdeka II ini dekat dengan daerah pelayanan. Lalu, dalam sehari jumlah sampah yang masuk lebih dari 3 m³, yaitu mencapai 38-43 m³ perhari. Luas lahan bangunan UPS Merdeka II inipun lebih dari 216 m², yaitu sekitar 466 m².

Jenis sampah yang masuk ke UPS Merdeka II ini sebagian besar adalah sampah organik, menurut petugas UPS, Teknik Lingkungan Universitas Indonesia pernah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil persentase antara sampah organik dan an-organik berkisar 62:38. Jenis sampah organik yang banyak ini mendukung produksi kompos. Proses pengomposan di UPS Merdeka II masih berlangsung hingga saat ini, menurut salah satu petugas UPS Merdeka II, yaitu Pak Guntur, dalam sebulan, mereka dapat menghasilkan kompos sekitar 20 karung.

“ya kalo sebulan sih, paling kita 20-an karung ya Mbak karena ini sih, mesinnya juga kan ga kuat, terus kita juga orangnya segini doang...”

(Guntur, 2012).

Hasil cacahan sampah organik yang akan dijadikan kompos ini akan diletakkan dibagian belakang hanggar dan diberi cairan kimia berjenis EM4 (Guntur, 2012). Cairan kimia EM4 ini sebenarnya tidak terlalu bagus untuk menghasilkan kompos, berdasarkan petugas UPS, cairan yang bagus adalah biothamal. Namun, biothamal ini jarang beredar di Depok. Selain itu, area hasil pencacahan sangat dekat dengan sampah yang belum dicacah, hal ini dapat mempengaruhi kualitas sampah hasil cacahan yang nantinya akan dijadikan kompos. Akan tetapi, hal ini sulit dihindari mengingat hanggar UPS

Merdeka II yang tidak sebanding dengan dengan volume sampah yang masuk.



Gambar 5.6

Hasil Cacahan Sampah Organik di UPS Merdeka II

Sumber: Hasil Pengamatan

Sama seperti UPS Sadewa, kualitas kompos produksi UPS Merdeka II ini belum pernah diuji. Hasil kompos ini juga diambil oleh DKP atau diminta oleh warga sekitar yang membutuhkan. Sedangkan untuk sampah an-organik, petugas UPS Merdeka II belum mampu mengolahnya. Namun, mereka sudah mampu memanfaatkan sampah an-organik tersebut, seperti dikumpulkan dan dijual ke pengepul. Jadi hasil penjualan dari sampah an-organik ini dapat menjadi tambahan penghasilan bagi mereka.

V.4.1.4 Penurunan Volume Sampah di TPA

Tujuan awal dari pembentukan Unit Pengolahan Sampah (UPS) adalah untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Cipayung karena kapasitas TPA ini sudah tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Depok. Cara untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA Cipayung tersebut yaitu dengan mengolahnya. Sampah yang diolah oleh UPS ini berjenis sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya (www.dephut.go.id). Sampah organik ini kemudian diolah hingga menjadi suatu produk kompos. Kegiatan pengolahan sampah ini dikerjakan di setiap UPS yang ada di Kota Depok, termasuk UPS Sadewa dan UPS Merdeka II yang berada di Kecamatan Sukmajaya.

UPS Sadewa sendiri dalam satu hari dapat mengumpulkan 45-91 m³ sampah. Namun, sampah-sampah tersebut tidak bisa diolah dalam waktu satu hari karena kapasitas mesin hanya 30m³ perhari. Melihat kapasitas mesin yang tidak sesuai dengan jumlah sampah yang harus diolah ini membuat kemampuan UPS Sadewa dalam mengolah sampah tidak maksimal.

Tabel 5.4

Rekapan Laporan Unit Pengolahan Sampah (UPS) Sadewa Tahun 2009-2011

No.	Tahun	Volume Sampah yang Masuk			Hasil Pemilahan		Hasil Pengolahan Organik	
		Gerobak	Mobil/Truck	Volume (M ³)	Organik (M ³)	An-organik (M ³)	Organik (M ³)	Residu (M ³)
1.	2009	3240	0	4860	3937	923	2952	984
2.	2010	8579	156	7206	740	261	812	2028
3.	2011	4911	536	949	1287	686	1276	143

Sumber: DKP Kota Depok

Pada tabel 5.6 diatas, jumlah sampah yang masuk sangat besar, terlebih pada tahun 2010 yang mencapai 7206 m³ sampah. Namun, UPS Sadewa pada tahun 2010 tersebut hanya mampu memilah 14% dari jumlah keseluruhan sampah yang masuk. Sehingga sampah yang tidak terpilah ini akan menjadi residu dan dibuang ke TPA Cipayung, terutama untuk sampah-sampah organik yang tidak terolah. Hal ini dikarenakan produk kompos tidak boleh berasal dari sampah organik yang telah menumpuk lebih dari 2 hari (Kementerian Pekerjaan Umum, 2003, hal. 3). Sehingga sampah organik tersebut akhirnya menjadi residu. Jumlah volume sampah pada tahun 2010 ini tidak sebanding dengan tahun 2009 dan 2011, oleh karenanya UPS Sadewa hanya mampu memilah dan mengolah sampah dibawah 15%. Kinerja terbaik UPS Sadewa terjadi pada tahun 2011, yaitu mencapai 99% sampah organik mampu diolah, jumlah residu pun hanya sedikit. Akan tetapi, pada akhir 2011 mesin pengolahan di UPS Sadewa rusak dan tidak dapat digunakan. Selama kurang lebih 4 bulan mengalami kerusakan mesin, belum ada tindakan dari pihak DKP Kota Depok. Sehingga UPS Sadewa tidak lagi mampu mengolah

sampah. Mereka hanya bisa menampung dan menata sampah agar tidak keluar dari hanggar dan menunggu sampah-sampah tersebut diangkut ke TPA Cipayung.

Hal yang sama terjadi pula di UPS Merdeka II, volume sampah yang masuk setiap harinya mencapai 38-43 m³, namun kemampuan mesin yang dimiliki pun tidak sebanding dengan volume sampah tersebut. sehingga jumlah residu yang dihasilkan masih banyak.

Tabel 5.5
Rekapan Laporan Unit Pengolahan Sampah (UPS) Merdeka II Tahun 2009-2011

No.	Tahun	Volume Sampah yang Masuk			Hasil Pemilahan		Hasil Pengolahan Organik	
		Gerobak	Mobil/Truck	Volume (M ³)	Organik (M ³)	An-organik (M ³)	Organik (M ³)	Residu (M ³)
1.	2009	3375	0	3881	2833	1048	2125	708
2.	2010	4514	0	2853	1011	615	481	705
3.	2011	6602	0	6846	3361	3389	1489	649

Sumber: DKP Kota Depok

Volume sampah terbesar di UPS Merdeka II terjadi pada tahun 2011, yaitu mencapai 6846 m³. Pada tahun 2011 tersebut, UPS Merdeka II hanya mampu mengolah 44% sampah organik. Hal ini terjadi karena kemampuan mesin yang tidak sebanding dengan volume sampah yang harus diolah. Sehingga banyak sampah yang akhirnya menjadi residu. Volume sampah yang masuk di UPS Merdeka II ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Padahal kapasitas hanggar dan kemampuan mesin tetap sama, jadi kemampuan UPS dalam mengolah sampah cenderung menurun. Hal ini terlihat pada hasil pengolahan sampah organik, pada tahun 2009 UPS Merdeka II mampu mengolah 75% sampah, namun menurun pada tahun 2010 dan 2011, yaitu 48% dan 44%.

Kemampuan UPS Sadewa dan UPS Merdeka II dalam mengolah sampah sangat terbatas karena mesin yang dimiliki kapasitasnya tidak sebanding dengan volume sampah yang masuk. Selain terbatasnya kapasitas mesin, terdapat pula keterbatasan tenaga dan waktu dari para petugas UPS. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Guntur, salah satu petugas UPS Merdeka II.

“sebenarnya sih bahannya banyak, tapi kan tergantung yang ngerjainnya, terus kita juga kan paling selesai jam 4 sore, ya paling berapa lah yang keolah...” (Guntur, 2012).

Sebagian besar waktu petugas di UPS dihabiskan untuk kegiatan pemilahan karena sampah yang dibawa dari lingkungan rumah tangga belum dilakukan pemilahan. Kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memilah sampah ini belum ada. Berdasarkan laporan studi EHRA Kota Depok (2011, hal.28), sebagian besar masyarakat di Sukmajaya tidak pernah melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang, yaitu sebesar 81,9%. Hal ini menyebabkan petugas UPS harus melakukan pemilahan terlebih dahulu sebelum mengolah dan hal ini menghabiskan waktu yang cukup banyak. Seharusnya, upaya penyadaran masyarakat untuk memilah sampah ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum UPS ini dibangun, jadi masyarakat dapat terlibat dalam pengolahan sampah tersebut. Seperti sosialisasi program bank sampah, pelatihan pembuatan kerajinan dari sampah, atau pelatihan pengolahan sampah organik dengan cara takakura atau biopori.

Selama ini pemilahan sampah di UPS dilakukan secara manual, yaitu dengan cara menuang seluruh sampah ke atas mesin *belt*, kemudian 4-5 orang petugas akan melakukan pemilahan langsung diatas mesin tersebut. Cara pemilahan ini dirasakan tidak efektif karena masih ada sampah-sampah an-organik yang ikut masuk ke dalam mesin pencacah. Hal ini mengakibatkan hasil cacahan terkadang masih tercampur dengan sampah an-organik. Selain itu, sampah an-organik yang masuk ke dalam mesin pencacah ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin. Oleh karenanya kegiatan pengolahan sampah di UPS ini masih belum maksimal karena belum secara signifikan

berdampak dalam mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Cipayung. terlebih sejak akhir tahun 2011, UPS Sadewa tidak lagi menjalankan kegiatan pengolahan sampah akibat mesinnya yang rusak. Kedua UPS yang terdapat di Kecamatan Sukmajaya ini juga belum mampu melayani seluruh masyarakatnya, hanya 23% saja yang mampu terlayani. Menurut Ibu Herniwaty dari Bappeda Kota Depok, yang tidak terlayani oleh UPS akan masuk ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang pada akhirnya harus diangkut pula ke TPA Cipayung, atau ada pula yang dibakar dan dibuang ke sungai.

Belum maksimalnya UPS dalam mengatasi permasalahan di Kota Depok ini diakui oleh DKP Kota Depok.

“...Ya belum sesuai karena masih banyak yang dibuang ke TPA. Harapannya kan cuma 5% yang dibuang. Kenyataannya yang dibuang itu, masih 60% residu plus cacahan. Yang ga terbuang ke TPA paling yang non organik. Di daur ulang, banyak yang ngambil, ini yang 40% nya. Idealnya sih residu itu 5-10% ya.” (Burhanudin, 2012).

Pengolahan sampah di UPS yang belum maksimal ini disebabkan pula oleh keadaan fisik dari UPS itu sendiri. Idealnya, setiap UPS ini memiliki luas lahan mencapai 500m², namun memperoleh lahan seluas ini untuk pengolahan sampah sangat sulit didapat. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ibu Enthy Sukarti, Ketua Komisi C DPRD Kota Depok.

“... tetapi karena ini, eee, pengolahan dai sumber sampah ini belum bisa maksimum karena , eee, jadi kan UPS itu banyak problem sengketanya di lahan. Bukan di program UPS itu sendiri, ya karena kan UPS ini berhubungan sama jalan akses masuk, berhubungan dengan luas tanah, tanah kan satu UPS itu minimum itu dia harus 500 m², karena standar mesinnya itu dia butuh hanggar seluas 500 m² diluar parkir. Nah, mencari tanah seluas 500 m² untuk UPS itu ga semua masyarakat berkenan tanahnya dibuat UPS, makanya program UPS ini agak tersendat...” (Sukarti, 2012)

Jika idealnya luas lahan untuk UPS ini 500 m², maka UPS Sadewa dan UPS Merdeka II ini belum memenuhinya karena luas kedua UPS tersebut kurang dari 500 m². Untuk UPS Merdeka II, luasnya sekitar 466 m², sedangkan luas UPS Sadewa hanya 316 m². Luas bangunan UPS ini terkadang tidak mampu untuk menampung volume sampah yang masuk, terutama di UPS Sadewa yang hanggarnya kecil, padahal volume sampah yang masuk perharinya mencapai 45-91 m³.

Melihat kenyataan yang ada, tujuan awal dari pembentukan UPS ini belum tercapai, terutama dalam hal mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Cipayung. Untuk Kecamatan Sukmajaya sendiri, keberadaan UPS Sadewa dan UPS Merdeka II belum mampu dirasakan dampaknya secara signifikan oleh masyarakat karena kemampuan pelayanan kedua UPS tersebut hanya 23%. Masih banyak titik-titik di Kecamatan Sukmajaya ini yang dijadikan TPS legal maupun ilegal. Kemampuan pelayanan UPS ini memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kecamatan Sukmajaya, sehingga masih banyak sampah yang masuk ke TPS daripada diolah di UPS. Agar UPS ini mampu mengurangi jumlah sampah di TPA Cipayung secara maksimal, perlu adanya penambahan jumlah UPS atau paling tidak memaksimalkan UPS yang sudah ada. Hal ini diungkapkan oleh Pak Burhanudin.

“kalau melihat jumlah penduduknya ya masih jauh. Idealnya kalau asumsi ya, 1 UPS itu melayani 3000 KK, ini maksimal ya. Tapi sekarang aja baru ada 19 UPS. Penambahan tahun ini aja diperkirakan baru 12-15 UPS. Jadi masih jauh lah.” (Burhanudin, 2012).

Pernyataan dari Pak Burhanudin ini diperkuat pula oleh pernyataan dari Ibu Enthy Sukarti.

“...sampah di Depok itu sekitar 3000 m³ perhari, setengah yang ga keangkut kan berarti 1500 m³, kalo mesin itu kapasitasnya 30 m³ berarti kan 50an UPS baru bisa efektif...” (Sukarti, 2012).

V.4.1.5 Penciptaan Lapangan Pekerjaan Baru

Bagi masyarakat dilingkungan UPS Sadewa dan UPS Merdeka II, dibukanya kedua UPS tersebut memberikan peluang pekerjaan baru karena salah satu tujuan UPS ini adalah merekrut petugas dari kalangan masyarakat sekitar. Pekerja di setiap UPS ini terdiri dari 14 orang, dan diambil dari warga sekitar UPS. Sistem pencarian pekerja ini berbeda antara UPS Merdeka II dan UPS Sadewa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pekerja di UPS Merdeka II, mereka sebelumnya mengajukan lamaran ke pihak RW jika ingin bekerja di UPS. Sedangkan di UPS Sadewa, para pekerja langsung ditunjuk dari pihak RW. Seperti yang dikatakan oleh Pak Slamet:

“saya dulu masuk kemari karena diambil sama RW saya, gitu. Jadi dari Sadewa diambil berapa orang, dari nakula berapa orang, gitu. Jadi total keseluruhan semua ini, pekerja itu ada 14 orang. Jadi memang sebagian ini dari warga. Warga nya, warga setempat” (Riyanto, 2012)

Perekrutan petugas UPS dari masyarakat ini telah menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memberikan kesempatan untuk beberapa masyarakat yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Soegijanto, Sekertaris RW 18 Kelurahan Mekarjaya. Pak Soegijanto ini tinggal di lingkungan dekat UPS Sadewa.

“...Karena ya itu, menyerap tenaga kerja tadi. Intinya itu karena kan ini pensiunan, terus notabene untuk melanjutkan kuliah, kan tidak sampai. Ya sebatas SMA, persaingan banyak, kalo mau kerja ditempat yang lain, kan susah.” (Soegijanto, 2012).

Penyerapan tenaga kerja untuk UPS ini yang paling banyak adalah kalangan laki-laki karena pekerjaan di UPS adalah tugas yang cukup berat bila dikerjakan oleh wanita. Namun, penyerapan tenaga kerja untuk UPS tersebut tergolong rendah karena hanya membutuhkan 14 tenaga kerja. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Untuk Kota Depok sendiri, angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki yang masih menganggur berjumlah 40.340 (DDA Kota Depok, 2010,

hal. 39), jika UPS yang sudah beroperasi ada 19 UPS, berarti keberadaan UPS ini baru menyerap 0,66% tenaga kerja.

V.4.2 *Customer-focused Outcomes*

V.4.2.1 Penilaian Masyarakat

Penilaian terhadap *customer-focused outcomes* ini dilakukan dengan melihat penilaian langsung dari masyarakat Kecamatan Sukmajaya terhadap pelayanan UPS Sadewa dan UPS Merdeka II. Garda terdepan pelayanan persampahan di Kota Depok ini dipegang oleh UPS karena tugasnya adalah mengolah sampah dari sumbernya, yaitu masyarakat. Oleh karenanya, penilaian masyarakat terhadap pelayanan UPS ini perlu dilihat, khususnya masyarakat disekitar UPS Sadewa dan UPS Merdeka II.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar UPS Sadewa, diperoleh gambaran penilaian yang cukup baik terhadap UPS karena kebutuhan mereka telah terpenuhi. Pasalnya, sebelum UPS Sadewa ada, lahannya digunakan untuk Tempat Pembuangan Sementara (TPS), jadi sampah berserakan, tidak teratur, menumpuk, dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Ketika UPS Sadewa mulai beroperasi, sampah menjadi tidak berserakan karena terdapat petugas yang mengatur sampah-sampah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Pak Soegijanto, sekretaris RW 018.

“... ya yang jelas sih terpenuhi ya. Ya bisa dibilang baik lah ya karena kebutuhan warga sini terpenuhi. Paling ya baunya aja. Sama pengangkutan yang truknya lalu lalang. Sampah ini kan masalahnya kompleks ya, ya kan...” (Soegijanto, 2012)

Selain itu, warga setempat juga mengungkapkan penilaian yang cukup baik. Terlebih warga yang anggota keluarganya bekerja di UPS Sadewa, seperti Ibu Yana yang suaminya bekerja disana. Ibu Yana merasa sangat terbantu karena suaminya tidak menganggur lagi. Hal ini menciptakan *sense of belonging* masyarakat terhadap UPS Sadewa karena masyarakat merasa memiliki dan membutuhkan UPS Sadewa ini. Selain itu, lahan tempat

dibangunnya UPS Sadewa yang semula berupa TPS ini berada dilingkungan pemukiman. Sehingga, masyarakat sekitar UPS Sadewa merasa sudah terbiasa dan tidak terganggu dekat dengan sampah.

Berbeda dengan masyarakat sekitar UPS Sadewa, di UPS Merdeka II masyarakat merasa pelayanan UPS belum baik. Hal ini disebabkan oleh ketidaknyamanan masyarakat terhadap UPS tersebut, terutama dengan bau ditimbulkan sampah. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Waluyo, salah satu warga yang tinggal disekitar UPS Merdeka II.

“ya kalo gimana ya, siapa juga yang mau deket sama sampah. Ya jelas ga seneng... ya memang ada kegunaannya, tapi ya cukup mengganggu. Apalagi pas diangkat tuh, bau banget. Kita kan jadi ngerasa gimana ya, ya ampun... deket sama UPS ini bau banget. Kan sampah udah numpuk beberapa hari, begitu diangkat kan uap baunya keluar. Itu sampe jauh baunya, sampe ratusan meter kesono baunya. Ya kalo bisa ini pindah aja deh...” (Waluyo, 2012).

Selain itu, dampak pengolahan sampah UPS Merdeka II ini juga kurang dirasakan oleh masyarakat. Seperti pernyataan ketua RT 01/RW 28, yaitu Pak Sugeng yang mengatakan bahwa *“... ya kalau untuk lingkungan kita sih udah terpenuhi kebutuhannya. Sampah diangkat sama tukang sampah tiap hari, iuran dari warga buat tukang sampah juga udah ditagihin. Tapi kalau UPS ya saya kurang tau ya, tapi kok keliatannya gitu-gitu aja dari dulu.”* (Sugeng, 2012).

Masyarakat di lingkungan UPS Merdeka II ini memang banyak yang tidak memperhatikan pekerjaan UPS, mereka hanya mengetahui saja di wilayah mereka terdapat tempat pengolahan sampah. Seperti pernyataan dari Ibu Rini Hidayat, salah satu warga yang tinggal didekat UPS Merdeka II.

“kalau optimal ga nya, ya saya ga tahu ya. Kan itu urusan mereka. Saya cuma tau, eee, itu tempat buat ngolah sampah jadi kompos. Tapi ga tahu deh komposnya kemana. Lagian bau banget sampahnya, saya aja males lewat situ...” (Hidayat, 2012)

Namun, keberadaan UPS Merdeka II diakui oleh masyarakat dapat mengatur sampah lebih baik daripada sebelumnya. Sama halnya dengan UPS Sadewa, lahan tempat dibangunnya UPS Merdeka II ini awalnya adalah TPS. Jadi, manfaat dengan adanya UPS Merdeka II ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Pak Waluyo.

“...Dulu waktu belum ada ini, sampah udah ga beraturan, bahkan ada yang ditaro dijalan. Setelah ada ini agak mendingan. Ya itu saya emang akui, jadi ada tempat penampungan yang ini, agak mending. Kalo dulu emang berantakan. Bahkan saya juga suka kesel, suka saya marahin warga yang buang seenaknya. Kan dulu sebelum dibangun, ini pembuangan sampah juga, sampah itu bahkan sampe nutupin jalan. Padahal udah dipager pake bambu juga, tapi masih tetep aja diluar pager. Ya emang manfaatnya ya itu, yang tadinya sampah berserakan, sekarang udah beraturan, karena ada yang ngatur, ada yang ngoordinir.” (Waluyo, 2012)

Meskipun demikian, penilaian masyarakat terhadap kedua UPS di Kecamatan Sukmajaya tersebut memang belum baik karena masih ada hal-hal yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Seperti bau yang tidak sedap atau pengangkutan sampah yang mengganggu kenyamanan. Akan tetapi, masyarakat merasa UPS ini sudah memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat sekitar, walaupun belum memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kecamatan Sukmajaya karena kapasitasnya sangat terbatas. Namun, setidaknya terdapat upaya dari pemerintah untuk memperluas pelayanan persampahan ini kepada masyarakat. Sehingga tercipta pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya.

Tabel 5.8
Ringkasan Hasil Temuan

Dimensi	Temuan	Keterangan
<p>Manajemen Proses</p> <p>1. Proses Inovasi</p> <p style="padding-left: 20px;">a. kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat</p> <p style="padding-left: 20px;">b. ketepatan solusi pelayanan persampaham</p> <p>2. Proses Operasional</p> <p style="padding-left: 20px;">a. kesesuaian tugas</p>	<p>Pembentukan Unit Pengolahan Sampah (UPS) oleh Pemerintah Kota Depok ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat Kota Depok semakin membutuhkan pelayanan persampahan karena jumlah sampah yang dihasilkan semakin tidak sebanding dengan TPA Cipayung, sehingga dibutuhkan pelayanan dengan cara lain, yaitu melalui UPS</p> <p>Pembentukan UPS ini dianggap sebagai solusi yang tepat bagi Pemerintah Kota Depok. Namun, hal ini belum dirasakan oleh masyarakat karena masih banyak sampah yang belum bisa terolah di UPS. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap UPS ini masih cenderung buruk, yaitu mengganggu kenyamanan lingkungan, sehingga banyak terjadi penolakan.</p> <p>Tugas dari UPS adalah mengolah sampah. Begitu pula untuk UPS di Kecamatan Sukmajaya, yaitu UPS Sadewa dan UPS Merdeka II. Namun, tugas mengolah sampah ini sudah tidak lagi sesuai untuk UPS Sadewa karena mesin pengolah sampahnya rusak sejak akhir 2011. Sedangkan untuk UPS Merdeka II, tugas yang dilakukan sudah sesuai, yaitu mengolah sampah. Tugas ini masih berjalan, walaupun belum</p>	

<p>b. proses pengolahan sampah yang efektif dan efisien</p> <p>3. Proses Pelayanan</p> <p>a. peningkatan cakupan pelayanan persampahan</p> <p>b. kemampuan menanggapi komplain</p>	<p>maksimal.</p> <p>Proses pengolahan sampah di UPS Merdeka II belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini diakibatkan proses pemilahan yang menghabiskan banyak waktu. Seharusnya pemilahan ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Namun, kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih rendah. Sedangkan untuk UPS Sadewa proses pengolahan sampah ini sudah tidak berjalan lagi.</p> <p>UPS Merdeka II mampu meningkatkan cakupan pelayanan persampahan karena setiap harinya mereka mampu mengolah kurang lebih 20 gerobak sampah. Sebelumnya, ketika UPS Merdeka II ini belum ada, maka 20 gerobak sampah tersebut hanya akan diangkut ke TPA Cipayung. Namun hal ini tidak terjadi pada UPS Sadewa, akibat mesin pengolahan sampahnya rusak, maka sampah yang masuk tidak bisa diolah. Jadi fungsi UPS Sadewa ini tidak jauh berbeda dengan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).</p> <p>Kemampuan manajemen komplain oleh UPS Sadewa dan UPS Merdeka II belum baik karena mereka hanya pelaksana teknis dilapangan dan tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan keluhan dari masyarakat. Jadi, kedua UPS tersebut hanya mampu menyampaikan keluhan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu DKP Kota Depok.</p>	
--	--	--

<p>Kepemimpinan</p> <p>3. <i>Task-oriented</i></p> <p>a. kesesuaian perilaku pemimpin dengan etika dan nilai yang berlaku</p> <p>b. kemampuan menciptakan budaya organisasi yang mempertahankan nilai-nilai sebagai organisasi yang terus tumbuh dan berkembang</p> <p>c. kemampuan pemimpin dalam mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan</p> <p>4. <i>Relationship Oriented</i></p> <p>a. tercipta komunikasi dengan bawahan</p>	<p>Koordinator di UPS Sadewa dan UPS Merdeka II adalah pemimpin yang memiliki perilaku sesuai dengan etika dan nilai yang berlaku. Hal ini terjadi karena kedua koordinator tersebut disiplin terhadap anak buahnya. Selain itu juga patuh terhadap peraturan organisasi.</p> <p>Koordinator UPS Merdeka II mampu menciptakan budaya organisasi yang mempertahankan nilai-nilai sebagai organisasi yang terus tumbuh dan berkembang. Hal ini terlihat dari kedisiplinan petugas. Sedangkan untuk UPS Sadewa cenderung mampu karena ketegasan yang dimiliki oleh koordinator UPS Sadewa tersebut. Namun, terdapat kelemahan, yaitu kurangnya pengawasan karena koordinator UPS Sadewa ini memiliki pekerjaan lain. Jadi, fokusnya tidak hanya ke UPS Sadewa.</p> <p>Koordinator UPS Sadewa mampu mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara maksimal, yaitu petugas UPS. Hal ini terjadi karena mesin yang mereka miliki rusak sehingga sumber daya yang benar-benar dioptimalkan adalah petugas. Begitu pula dengan UPS Merdeka II, koordinator sudah memaksimalkan penggunaan sumber daya, yaitu mesin dan petugas. Namun, mesin yang mereka miliki memang memiliki keterbatasan, jadi pengolahan sampahnya belum maksimal.</p> <p>Koordinator UPS Sadewa dan UPS Merdeka II mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan bawahan karena hubungan mereka yang sudah dekat. Koordinator dan petugas di kedua UPS tersebut bertempat</p>	<p>Kepemimpinan di UPS Sadewa lebih cenderung mengarah ke model task oriented. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan yang cenderung baik pada indikator-indikator model kepemimpinan <i>task oriented</i> tersebut. model kepemimpinan ini mampu membuat petugas UPS Sadewa lebih disiplin dalam mengerjakan tugasnya. Terutama ketika mesin pengolahan sampah sudah tidak berfungsi lagi. Mereka tetap bekerja secara maksimal memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu menata sampah yang masuk agar tidak keluar hanggar sehingga dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Sedangkan model kepemimpinan di UPS Merdeka II adalah model gabungan dari model task oriented dengan model relationship oriented. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan-pernyataan baik pada setiap indikator kedua model tersebut. Hal ini terjadi karena Pak Irawan merupakan tipe orang yang disiplin namun mampu</p>
---	---	--

<p>b. terjalin kerja sama</p> <p>c. memberikan kesempatan bawahan untuk berkembang</p>	<p>tinggal di wilayah yang sama, jadi mereka sudah saling mengenal satu sama lain.</p> <p>Koordinator UPS Sadewa belum mampu menciptakan kerja sama yang baik dengan petugas karena dalam pengambilan keputusan kurang melibatkan petugas. Selain itu, petugas juga tidak memiliki inisiatif. Sedangkan di UPS Merdeka II, koordinatornya sudah mampu menjalin kerja sama yang baik karena keterlibatan petugas dalam pengambilan keputusan sudah sering dilakukan.</p> <p>Kesempatan petugas untuk berkembang melalui pelatihan belum ada di UPS Sadewa karena kegiatan ini memang jarang dilakukan oleh DKP Kota Depok. Sedangkan petugas di UPS Merdeka II pernah memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan.</p>	<p>menciptakan hubungan yang baik dengan bawahannya. Hubungan ini juga tercipta dari lingkungan tempat tinggal mereka yang berada dalam satu wilayah. Jadi, baik Pak Irawan maupun petugas UPS Merdeka II sudah mengenal satu sama lain sebelum mereka bekerja di UPS. Hal ini mampu membawa petugas UPS Merdeka II bekerja secara maksimal, walaupun pengolahan sampah belum mampu mereka kerjakan secara optimal karena keterbatasan mesin.</p>
<p>Finansial</p> <p>3. anggaran pembangunan dan pelaksanaan Unit Pengolahan Sampah (UPS)</p> <p>4. anggaran operasional Unit Pengolahan Sampah (UPS)</p>	<p>Pembangunan satu hanggar UPS ini membutuhkan dana sekitar 500 juta yang digunakan untuk berbagai item pekerjaan. besaran ini tidak jauh berbeda dengan besaran yang dianggarkan pada APBD Kota Depok tahun 2007, yaitu Rp 579.954.650,-. Lalu terdapat pula anggaran untuk pengadaan mesin yang mencapai Rp 349.725.000,-. Namun, mesin yang dibeli oleh DKP hanya berkisar 280 juta.</p> <p>Anggaran operasional UPS terdiri dari gaji dan solar. Besaran yang dianggarkan oleh pemerintah untuk operasional pada tahun 2009 adalah Rp 193.824.000,-. Pada tahun 2010 menurun jadi Rp 104.564.000,-. Kemudian naik lagi pada tahun 2011, yaitu Rp 189.098.500,-. Namun, informasi penggunaan dana tersebut tidak bisa</p>	

	diperoleh dari DKP.	
<p>Hasil</p> <p>1. <i>Product Outcomes</i></p> <p>a. terbangunnya Tempat Pengolahan Sampah</p> <p>b. kapasitas mesin pengolahan sampah</p> <p>c. kualitas hasil produk</p>	<p>Terbangunnya 3 UPS di Kecamatan Sukmajaya, yaitu UPS Merdeka I, UPS Merdeka II, dan UPS Sadewa. Namun UPS Merdeka I sudah tidak berfungsi lagi akibat penolakan dari masyarakat. Untuk UPS Sadewa berada di Kelurahan Mekarjaya, luas hanggar UPS ini $\pm 316 \text{ m}^2$ dan dilengkapi dengan fasilitas lain seperti kantor dan kamar mandi. Sedangkan UPS Merdeka II berada di Kelurahan Abadijaya, luas hanggar ini $\pm 466 \text{ m}^2$ dan dilengkapi pula oleh kantor dan kamar mandi.</p> <p>Mesin di UPS Sadewa memiliki tipe MC 100, namun mesin ini sudah tidak berfungsi lagi karena rusak dan belum dilakukan perbaikan oleh DKP Kota Depok. Sedangkan untuk mesin di UPS Merdeka II masih berfungsi dan memiliki kapasitas mengolah sampah sebesar 25-30 m^3 sampah setiap harinya. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah sampah yang masuk, yaitu 38-43 m^3 per hari. Keterbatasan kapasitas mesin ini membuat UPS Merdeka II belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>Persyaratan umum suatu tempat dijadikan pengolahan sampah menjadi kompos sudah terpenuhi oleh UPS Sadewa dan UPS Merdeka II. Namun kompos yang mereka hasilkan tersebut belum dilakukan uji kualitas. Selain itu, kompos tersebut juga belum jelas pendistribusiannya, serta manfaatnya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.</p>	

<p>d. penurunan volume sampah di TPA</p>	<p>Belum terjadi penurunan jumlah volume sampah yang masuk ke TPA Cipayung. hingga tahun 2011 saja, UPS Sadewa baru mampu mengolah sampah dibawah 15%. Sedangkan UPS Merdeka II hanya mampu 44%. Jadi masih banyak sampah yang menjadi residu sehingga akhirnya dibuang ke TPA.</p>	
<p>e. penciptaan lapangan pekerjaan baru</p>	<p>Keberadaan UPS Sadewa dan UPS Merdeka II mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, terutama untuk laki-laki. Namun peluangnya sangat sedikit karena satu UPS hanya membutuhkan 14 pekerja. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja laki-laki yang berjumlah 40.340. jika UPS yang sudah beroperasi ada 19, maka penyerapan tenaga kerja baru 0,66%.</p>	
<p>2. <i>Customer-focused Outcomes</i></p>		
<p>a. penilaian masyarakat</p>	<p>Penilaian masyarakat terhadap UPS Sadewa dan UPS Merdeka II belum baik karena masih ada hal-hal yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Seperti bau yang tidak sedap atau pengangkutan sampah yang mengganggu kenyamanan. Akan tetapi, masyarakat merasa UPS ini sudah memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat sekitar, walaupun belum memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kecamatan Sukmajaya karena kapasitasnya sangat terbatas</p>	

Sumber: Diolah oleh Peneliti

BAB VI

PENUTUP

Bab ini terdiri dari Simpulan dan Rekomendasi. Simpulan, menguraikan secara ringkas laporan penelitian yang telah dilakukan. Sementara rekomendasi, menguraikan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait untuk memperbaiki masalah pelayanan persampahan melalui Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kota Depok.

VI.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya, yaitu UPS Sadewa dan UPS Merdeka II, diperoleh kesimpulan bahwa kinerja dari kedua UPS tersebut masih buruk. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

1. Indikator proses operasional dan proses pelayanan masih menunjukkan kinerja yang buruk karena terdapat ketidaksesuaian tugas, terutama untuk UPS Sadewa, serta pengolahan sampah yang belum efektif dan efisien. Kemudian belum terjadi peningkatan cakupan pelayanan dan kemampuan UPS dalam menanggapi komplain belum optimal karena tidak memiliki wewenang yang kuat. Sedangkan untuk proses inovasi, UPS ini sudah bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun belum dianggap sebagai solusi yang tepat dalam pelayanan persampahan.
2. Dimensi hasil masih menunjukkan banyak kekurangan pada UPS Merdeka II dan UPS Sadewa. Seperti bangunan yang tidak memiliki fasilitas yang memadai, kapasitas mesin yang belum sebanding dengan jumlah sampah yang harus diolah, hasil produk yang belum bisa dirasakan oleh masyarakat dan kualitasnya belum teruji, kemudian belum mampu mengurangi volume sampah di TPA. Namun, indikator penciptaan lapangan kerja dari UPS ini sangat dirasakan oleh masyarakat, walaupun jumlahnya masih rendah dalam menyerap tenaga kerja, yaitu hanya 0,66%.

3. Pada dimensi finansial belum menunjukkan kemampuan UPS dalam pengelolaan keuangan karena dana operasional dipegang langsung oleh DKP Kota Depok. UPS hanya menerima gaji, serta solar untuk mesin yang diberikan setiap minggu. Sedangkan anggaran untuk pembangunan UPS sendiri juga belum optimal, seperti anggaran untuk pengadaan mesin yang mencapai Rp 349.725.000,-. Namun, mesin yang dibeli oleh DKP hanya berkisar 280 juta.

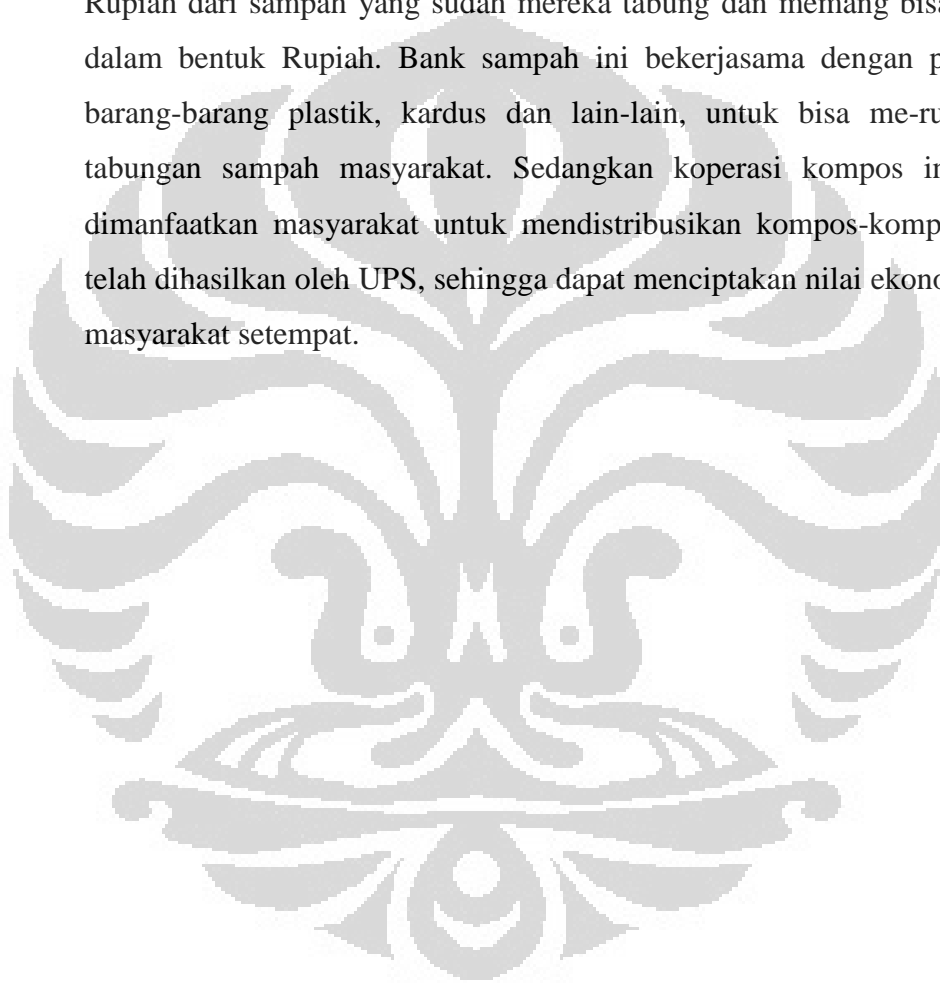
Namun, dimensi kepemimpinan di UPS Sadewa dan UPS Merdeka II sudah menunjukkan pemimpin mereka telah bekerja optimal dan mampu membawa petugas untuk tetap bekerja dengan optimal. Sebagian besar hal yang membuat kinerja UPS Sadewa dan UPS Merdeka II ini tidak maksimal berasal dari faktor eksternal, seperti jumlah sampah yang tidak sebanding dengan kemampuan kedua UPS tersebut dalam mengolah sampah.

VI.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka Peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya memperbaiki pelayanan persampahan melalui Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kota Depok. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penguatan program-program yang memberikan penyadaran bagi masyarakat, terutama mengenai pemilahan dan pengolahan sampah. Seperti program Depok Memilah dan Sosialisasi Komposting yang sudah dilakukan oleh DKP Kota Depok. Program-program ini jika telah efektif dilakukan maka akan membantu pekerjaan UPS, sehingga UPS bisa mengolah sampah lebih optimal, serta mampu menghasilkan kompos yang lebih berkualitas. Jika kesadaran masyarakat sudah tercipta, maka penambahan jumlah UPS di beberapa titik di Kota Depok tidak akan menemui hambatan, terutama penolakan dari masyarakat. Sehingga hal ini akan memberikan dampak pada penurunan jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

2. Membentuk rasa memiliki bagi masyarakat terhadap UPS diwilayahnya dengan cara pembentukan bank sampah dan koperasi kompos. Bank sampah ini merupakan suatu tempat untuk menabung sampah. Nasabah bank serta pengurus bank sampah ini berasal dari warga setempat. Pada bank sampah, masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Mereka juga mendapatkan sejenis nomor rekening dan buku tabungan. Pada buku tabungan mereka tertera nilai Rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung dan memang bisa ditarik dalam bentuk Rupiah. Bank sampah ini bekerjasama dengan pengepul barang-barang plastik, kardus dan lain-lain, untuk bisa me-rupiahkan tabungan sampah masyarakat. Sedangkan koperasi kompos ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendistribusikan kompos-kompos yang telah dihasilkan oleh UPS, sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat.



DAFTAR PUSTAKA

- Berman, Richard C. Kearny dan Evan M. *Public Sector Performance: Management, Motivation, and Measurement*. Amerika: Westvie Press, 1999.
- Brown, Mark Graham. *The Pocket Guide To The Baldrige Award Criteria*. New York: CRC Press, 2009.
- Bruijn, Hans De. *Managing Performance In The Public Sector*. New York: Routledge, 2007.
- Epstein, Paul D. *Using Performance Measurement in Local Government*. New Yor: New York National Civic, 1988.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Gaspaerzs, Vincent. *Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi, Balance ScoreCard dengan Sistem Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Halligan, John, Geert Bouckaert dan Wouter Van Dooren. *Performance Management in the Public Sector*. New York: Routledge, 2010.
- Humphreys, Peter C. *Improving Public Service Delivery*. Ireland: Institute of Public Administration, 1998.
- Irawan, Prasetya. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Depok: DIA FISIP UI, 2006.
- Kaplan, R. S. dan D. P. Norton. *The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in The Business Environment*. Boston: Harvard Business Scholl Press, 2001.
- Kearney, Richard C. dan Evan M. Berman. *Public Sector Performance: Management, Motivation, and Measurement*. Amerika: Westview Press, 1999.
- Malo, Manase dan Sri Trisnoningtas. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pusat Antar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, 2003.
- Malo, Manasse. *Materi Pokok Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Karunika, 1985.
- Mardiasmo. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM, 2006.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Neuman, W. Lawrence. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approach*. Boston: Pearson Education, Inc., 2003.
- Niven, Paul R. *Balanced Scorecard Step-by-step: Maximizing Performance and Maintaining Results*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2001.
- Nurmandi, Achmad. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PT Sinergi Visi Utama, 2010.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rivai, Veithzal dan Ahmad Fawzi Mohd. Basri. *Performance Appraisal: Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rogers, Stave. *Performance Management in Local Government*. London: Jesica Kindsley Publisher, 1990.
- Ruky, Achmad S. *Sistem Manajemen Kinerja* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Santoso, Gempur. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
- Shah, Anwar. *Public Service Delivery*. Washington DC: The World Bank, 2005.
- Skelcher, C. *Managing for Service Quality*. London: Longman, 1992.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Usman, Mustafa Edwin Nasution Hardius. *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Whittaker, James B. *The Government Performance and Result Act of 1993*. Virginia: Educational Service Institute, 1995.

Dokumen Daerah:

Bappeda Kota Depok, 2011. Depok Dalam Angka 2010.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 2006-2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok 2011-2016.

Rencana Strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok 2011-2016.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum.
Pembuatan Kompos. Tidak Diterbitkan. 2003.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*

Sumber Lainnya:

Anggi. (2011, Juni 15). *http://sinarpagibaru.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, Pengadaan Mesin UPS Depok Diduga Sarat KKN: http://sinarpagibaru.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=924

bappeda.depok.go.id. (t.thn.). *bappeda.depok.go.id*. Dipetik November 25, 2011, Sarana Persampahan: <http://bappeda.depok.go.id/?pg=sarana-persampahan.html>

bataviase.co.id. (2010, Februari 18). *bataviase.co.id*. Dipetik Oktober 11, 2011, Usang, Konsep Sampah di Depok: <http://bataviase.co.id/node/100766>

depdagri.go.id. (2010, Januari 28). *depdagri.go.id*. Dipetik Oktober 10, 2011, Daftar Daerah Otonom Baru Pembentukan Tahun 1999 - 2009: http://www.depdagri.go.id/media/filemanager/2010/03/05/d/o/dot_09.pdf

depok.go.id. (t.thn.). *depok.go.id*. Dipetik Oktober 11, 2011, Kondisi Demografi: <http://www.depok.go.id/profil-kota/demografi>

depok.go.id. (2008, November 11). *depok.go.id*. Dipetik Oktober 9, 2011, Sekilas Sejarah Terbentuknya Kota Depok: http://www.depok.go.id/v4/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=14

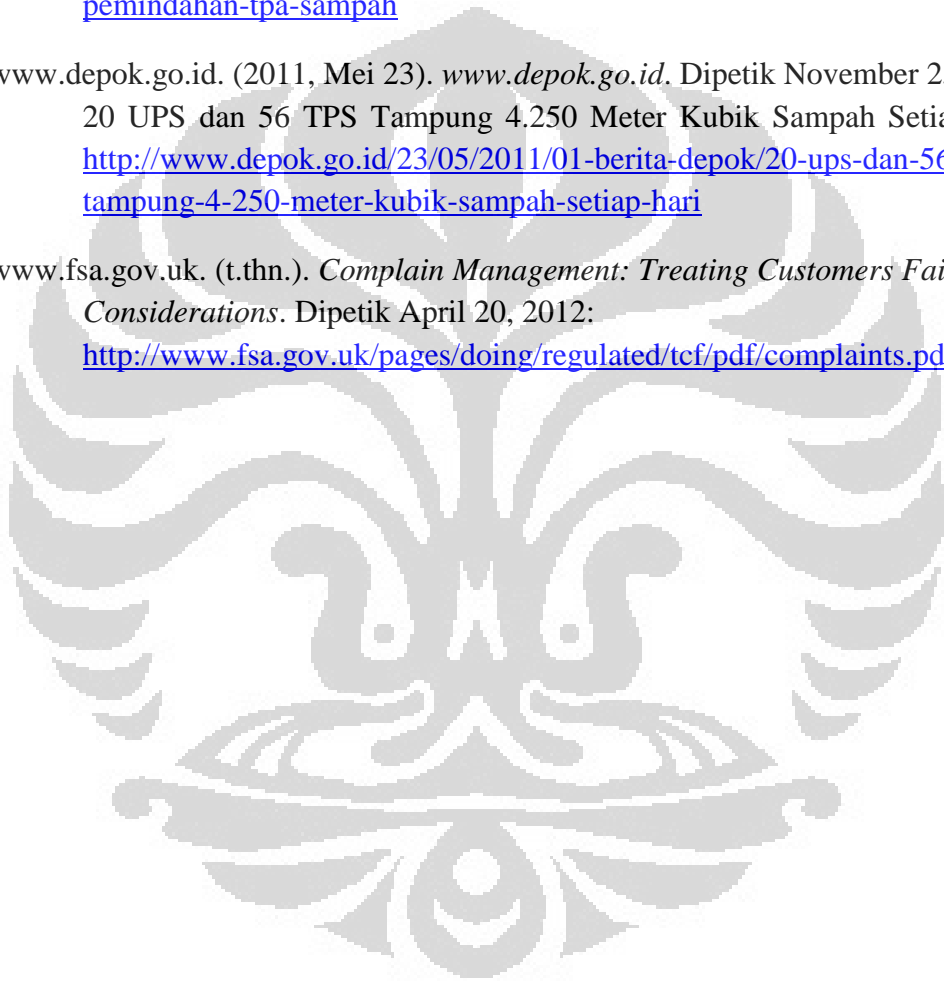
- depoklik.com. (2011, April 11). *depoklik.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, 2.483 m3 Sampah di Depok Tak Terangkut Setiap Harinya: <http://depoklik.com/2011/04/11/2-483-m3-sampah-di-depok-tak-terangkut-setiap-harinya.html>
- E. Kurniawan S.Si, M. (2010, April 21). *www.iec.co.id*. Dipetik Juni, 13, 2012, Transformasi Pengelolaan Sampah: <http://www.iec.co.id/artikel/transformasi-pengelolaan-sampah>
- matanews.com. (2008, November 20). *matanews.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, Warga Depok Tolak UPS: <http://matanews.com/2008/11/20/warga-depok-tolak-ups/>
- mediaindonesia.com. (2011, Februari 13). *mediaindonesia.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, Puluhan Miliar APBD Kebersihan Depok Terbuang Sia-Sia: <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/02/13/203151/38/5/Puluhan-Miliar-APBD-Kebersihan-Depok-Terbuang-Sia-Sia>
- metrotvnews.com. (2011, Juni 15). *metrotvnews.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, Pengelolaan Sampah di Kota Depok Belum Tertata: <http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/06/15/130245/Pengelolaan-Sampah-di-Kota-Depok-Belum-Tertata>
- Rajagukguk, K. (2011, Maret 28). *mediaindonesia.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, Depok Krisis Lahan TPA Sampah: <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/213451/38/5/Depok-Krisis-Lahan-TPA-Sampah>
- republika.co.id. (2008, November 20). *republika.co.id*. Dipetik Oktober 11, 2011, Minim Sosialisasi, Warga Tolak UPS: <http://republika.co.id:8080/koran/22/15245>
- republika.co.id. (2009, Februari 15). *republika.co.id*. Dipetik Oktober 11, 2011, Depok Hadapi Masalah Sampah Serius: <http://koran.republika.co.id/berita/31678>
- Virdhani, M. H. (2009, Juni 24). *http://news.okezone.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, Mesin UPS Rusak, Sampah Menumpuk di Depok: <http://news.okezone.com/read/2009/06/24/1/232587/mesin-ups-rusak-sampah-menumpuk-di-depok>
- Virdhani, M. (2008, Desember 29). *http://news.okezone.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, Walhi Utimatum Walikota Depok Soal Proyek UPS: <http://news.okezone.com/read/2008/12/29/1/177801/walhi-utimatum-walikota-depok-soal-proyek-ups>

Virdhani, M. (2008, November 21). *http://news.okezone.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, 5 Kelurahan di Depok Tolak Rencana Pembangunan UPS: <http://news.okezone.com/read/2008/11/21/1/166580/5-kelurahan-di-depok-tolak-rencana-pembangunan-ups>

Virdhani, M. (2011, Mei 5). *kbr68h.com*. Dipetik Oktober 11, 2011, DPRD Depok Desak Pemindahan TPA Sampah: <http://www.kbr68h.com/berita/daerah/5901-dprd-depok-desak-pemindahan-tpa-sampah>

www.depok.go.id. (2011, Mei 23). *www.depok.go.id*. Dipetik November 25, 2011, 20 UPS dan 56 TPS Tampung 4.250 Meter Kubik Sampah Setiap Hari: <http://www.depok.go.id/23/05/2011/01-berita-depok/20-ups-dan-56-tps-tampung-4-250-meter-kubik-sampah-setiap-hari>

www.fsa.gov.uk. (t.thn.). *Complain Management: Treating Customers Fairly Considerations*. Dipetik April 20, 2012: <http://www.fsa.gov.uk/pages/doing/regulated/tcf/pdf/complaints.pdf>



LAMPIRAN



Lampiran 1 Kuesioner Kepemimpinan



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

No. Kuesioner				
No. Responden				

KUESIONER

Saya adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UI yang sedang melakukan penelitian tentang *Kinerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok*. Saya menggunakan instrumen berupa kuesioner dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini. Oleh karena itu, Saya sangat mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara dapat menjawab kuesioner ini dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi apapun yang Bapak/Ibu/Saudara berikan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan dijaga kerahasiaannya.

I. Karakteristik Responden

1. Nama :
2. Usia : Tahun
3. Jenis Kelamin :
 1. Laki-laki
 2. Perempuan
4. Alamat :
5. Pendidikan :
 1. Tidak Sekolah
 2. Tidak Tamat SD atau sederajat
 3. Tamat SD atau sederajat
 4. Tidak Tamat SMP atau sederajat
 5. Tamat SMP atau sederajat

6. Tidak Tamat SMA atau sederajat
7. Tamat SMA atau sederajat
8. Diploma
9. S1
10. S2
11. S3

II. Kuesioner

Berilah tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan seperti keadaan yang sebenarnya dan sesuai pilihan Bapak/Ibu/Saudara.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

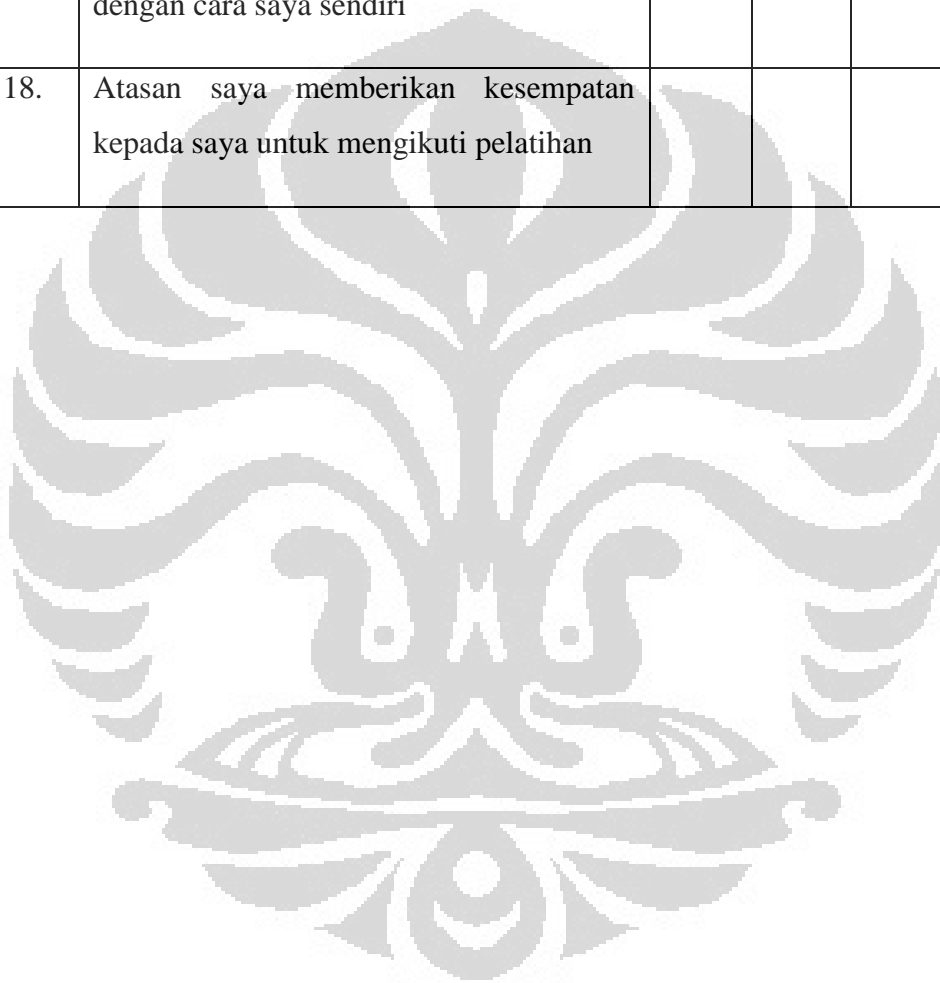
TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	TS	STS
1.	Atasan saya bertindak sesuai dengan peraturan organisasi				
2.	Atasan saya disiplin kepada semua bawahannya				
3.	Atasan saya memberikan sanksi kepada semua bawahan yang melakukan kesalahan				
4.	Atasan saya memberikan pujian kepada semua bawahan yang memiliki kinerja				

	baik				
5.	Atasan saya mengharapkan bawahan untuk mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan				
6.	Atasan saya selalu memperbaharui pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan				
7.	Atasan saya selalu mengawasi pekerjaan bawahannya				
8.	Saya telah melaksanakan pekerjaan dengan baik di Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini				
9.	Saya telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan deskripsi tugas saya				
10.	Atasan saya selalu menggunakan teknologi secara maksimal di Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini				
11.	Atasan saya mampu mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini secara maksimal				
12.	Atasan saya selalu memberi pengarahan dalam melaksanakan pekerjaan				
13.	Atasan saya selalu memberi teguran apabila saya melakukan kesalahan				
14.	Atasan saya sering berkonsultasi dengan bawahan dalam menyelesaikan masalah				

15.	Atasan saya selalu melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan				
16.	Atasan saya mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif				
17.	Atasan saya memberikan kesempatan kepada saya untuk mencapai suatu tugas dengan cara saya sendiri				
18.	Atasan saya memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan				



Lampiran 2 Pedoman Wawancara Mendalam



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

Pedoman Wawancara:

Finansial

1. Berapa biaya yang dianggarkan untuk membangun Unit Pengolahan Sampah (UPS)?
2. Berapa biaya yang dianggarkan untuk mengelola Unit Pengolahan Sampah (UPS)?
3. Berapa biaya yang dianggarkan untuk membangun Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya?
4. Berapa biaya yang dianggarkan untuk mengelola Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya?
5. Besaran biaya untuk Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya ini digunakan untuk alokasi apa saja?
6. Apakah biaya yang sudah dianggarkan sudah mencukupi untuk pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya?
7. Apakah biaya yang sudah dianggarkan sudah mencukupi untuk mengelola Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya?

Manajemen Proses

1. Bagaimana proses timbulnya ide pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kota Depok?
2. Apa peraturan dasar dari pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini?
3. Bagaimana tahapan pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS)?
4. Berapa lama tahapan dari perencanaan hingga Unit Pengolahan Sampah (UPS) ini beroperasi?
5. Bagaimana perencanaan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya?

6. Mengapa Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya dibangun di Jalan Sadewa, Jalan Merdeka I, dan Jalan Merdeka II?
7. Apa bentuk dukungan dari masyarakat Kecamatan Sukmajaya dalam pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS)?
8. Apa hambatan yang dialami dalam pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya?
9. Bagaimana sistem kerja Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya?
10. Bagaimana peran UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II dalam melayani masyarakat Kecamatan Sukmajaya?
11. Bagaimana peran UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II dalam mengurangi sampah di wilayah Kecamatan Sukmajaya?
12. Apakah ada komplain dari masyarakat Kecamatan Sukmajaya terhadap pelayanan dari UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II?
13. Bagaimana sikap dari stakeholder UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II dalam menanggapi komplain dari masyarakat?
14. Bagaimana mekanisme tanggung jawab pengelolaan Unit Pengolahan Sampah (UPS), khususnya UPS di Kecamatan Sukmajaya?

Hasil

1. Bagaimana kondisi Unit Pengolahan Sampah (UPS) di Kecamatan Sukmajaya?
2. Apakah kondisi UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II ini sudah sesuai dengan rencana awal?
3. Bagaimana hasil dari kinerja UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II?
4. Apakah kinerja UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II ini sudah sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat?
5. Apakah UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Kecamatan Sukmajaya?
6. Apakah masyarakat Kecamatan Sukmajaya sudah merasa puas dengan kinerja UPS Sadewa, UPS Merdeka I, dan UPS Merdeka II?

Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Kasie Pengolahan Sampah DKP Kota Depok

Informan : Bapak Burhanudin, Kasie pengolahan sampah DKP Kota Depok

Hari/tanggal : Senin, 5 Maret 2012

Waktu : 11.40-12.00

Keterangan : P (Peneliti)

I (Informan)

Hasil Wawancara

P: awal dari pembangunan UPS itu apa sih, Pak?

I: yang pertama itu yang jelas untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Artinya, memperpanjang umur TPA lah.. terus untuk memperluas cakupan pelayanan persampahan.

P: maksudnya memperluas cakupan pelayannya persampahan itu apa ya, Pak?

I: ya gini aja, misalkan 1 KK itu menghasilkan kurang lebih 10 liter sampah per hari, terus dibandingkan dengan jumlah truk yang ada, ini cuma bisa melayani 35% sampah yang ada. Sisanya ya masuk ke TPS resmi atau TPS liar. Yang kita layani kan cuma TPS resmi. Nah, dengan adanya UPS, sampah-sampah yang biasa dibuang ke TPS liar bisa dibuang ke UPS. Jadi, cakupan layanannya lebih luas kan. Ya walaupun pengurangan jumlah sampah ke TPA belum signifikan, tapi yang tadinya ga bisa terlayani ke TPA, karena ada UPS jadi ya bisa terlayani di sana (UPS). Suatu saat, kalau ini udah membudaya, harapannya ya nanti tidak ada lagi TPA. Ya entah berapa taun ke depan. Jadi gini, tiap-tiap kawasan, kan UPS ini dinamakan pengolahan sampah skala kawasan. Jadi harapannya nanti setiap kawasan itu mempunyai kemampuan untuk mengolah sampah itu sendiri, jadi harus ada partisipasi masyarakat kan. Jadi nanti sampah tidak ada yang keluar dari kawasan itu kan. Ya ke mana keluarnya? Ya ga ada, kan sudah habis diolah. Yang organik dibikin pupuk, yang an organik di daur ulang, yang residunya kan ga seberapa, ya idealnya cuma 5%. Ini kan bisa ditimbun dan sebagainya kan. Atau bisa aja residu ini dibakar dengan alat pembakaran khusus. Ini akan terjadi ke depan, ya entah berapa tahun lagi. Ya pokoknya nanti diharapkan setiap kawasan itu jangan sampai keluar sampah. Terus residu juga cuma 5%. Misalkan begini, tapi ini saya juga belum pernah membuktikan ya. Dari 10 truk yang biasa dibuang ke TPA, jadi setengah truk karena yang dibuang cuma residu. Kalau sudah canggih lagi, residu ini bisa dibakar dengan alat khusus, jadi bisa cuma 1% residunya.

P: jadi istilahnya, prinsip UPS ini 3R ya Pak?

I: 3R, betul. Jadi gini, kita kan ga hanya mengolah di hilir aja. Dari awalnya pun kita ingin menerapkan kultur. Dulu kan orang ke pasar cuma bawa 1 tas. Tapi sekarang kan ga, perginya ga bawa apa-apa, terus pulang bawa apa? Cabe diplastik kecil, bawang diplastik kecil, plastik kecil dimasukin ke plastik sedang, jadi dalam satu belanjaan itu, sudah berapa plasti kan? Jadi mereka itu sudah bawa sampah, dari kantong plastiknya aja. Nah kalo prinsip reduce kan mengurangi, ini yang paling sulit daripada R kedua sama ketiga. Takutnya nanti pabrik plastik ga laku, lagi. Ini kan hubungannya jadi mata rantai, kalau kita memaksa buat mengurangi penggunaan sampah an organik, di lain pihak ada pabriknya. Di pabrik ini kan ada tenaga kerja, kompleks kan jadinya. Jadi, kalau sampah ditangani pake 3R, ga cuma lingkungan hidup sama DKP aja, tapi semua, karena kan menyangkut tenaga kerja juga. Awalnya kan dari pusat cuma 2 departemen yang menanganai sampah, sekarang udah jadi 9 departemen karena efeknya banyak.

P: ini ada peraturan daerahnya ga sih, Pak, untuk pembangunan UPS?

I: (memanggil stafnya) peraturan dari kemendagri, perdanya UPS itu hafal. De? (staf menjawab) ada permendagri untuk pendamping, itu Permendagri No. 33 tahun 2010 tentang pengolahan sampah. (Pak Burhan menambahkan) jadi, kita belum ada perdanya, baru pake Permendagri itu aja.

P: terus kalau tahapan pembangunan UPS ini gimana ya, Pak?

I: paling awal ya cari tanah, nah ini tahap tersulit. Terus setelah itu, ada sosialisasi pertama. Abis itu ada lelang buat pembangunan.

P: lelangnya ini 1 perusahaan ngebangun semua UPS atau 1 perusahaan per UPS ya Pak?

I: ga, 1 perusahaan per UPS. Jadi per lokasi.

P: terus kalau Kecamatan Sukmajaya siapa yang bikin ya Pak?

I: oh kalau ini tanya ke sarpras aja. Kita kan user ya, kalau pengadaan ke sarpras aja.

P: di Kecamatan Sukmajaya sendiri kondisi UPS nya bagaimana sih Pak?

I: ada 3 (UPS) ya, ada sadewa, merdeka I, dan merdeka II. Mesinnya ada 2 di merdeka II sama sadewa. Jadi di merdeka I hanya hanggar aja, dijadiin gudang gitu.

P: keadaan mesinnya sekarang gimana, Pak?

I: merdeka II masih beroperasi kan sekarang, sadewa itu sering off mesinnya dengan alasan kapasitas sampah terlalu banyak melebihi kapasitas mesin, sehingga sering terjadi penumpukan sampah.

P: kan saya pernah ke sadewa ya Pak, ketemu pekerjanya, dia bilang kalau di sadewa cuma sampe di cacah aja sampahnya, terus bikin komposnya nanti di merdeka I. Sebenarnya merdeka I ini cuma jadi gudang, atau beroperasi untuk buat kompos sih Pak?

I: betul, merdeka I itu nantinya bakal terima cacahan sampah dari sadewa buat dijadiin kompos, istilahnya komposting. Seharusnya sih sudah beroperasi, jadi nanti bisa menerima cacahan sampah dari UPS lain juga.

P: terus yang di merdeka II sampai jadi kompos, Pak?

I: ya nantinya setengah dari merdeka II juga cacahannya bakal dibawa ke merdeka I.

P: berarti kan merdeka I belum beroperasi, terus cacahan dari sadewa dibawa kemana Pak?

I: ya dibuang ke TPA, sebagian mungkin ada yang ngambilin cacahannya. Pihak-pihak yang memerlukan biasanya ngambil dari situ.

P: itu komposnya dibawa kemana sih Pak?

I: nah itu masih ga terdeteksi mbak. Kita kan sistemnya masih open ya mbak, siapa yang mau ya tinggal ambil. Ini sih buat saat ini. nanti sih kalau udah komposnya berkualitas tinggi, ya tentu ada harganya ya. Pernah juga dulu, kaya instansi-instansi vertikal atau horizontal, kaya kalangan TNI suka ngambil kalau memerlukan kompos untuk tanaman yang sifatnya bukan untuk dimakan ya. Kalau untuk tanaman yang buahnya atau produknya dimakan, ya ga pakai dari kita dulu. Sebenarnya kualitasnya bukan ga bagus, tapi belum bagus lah, terutama untuk tanaman yang bisa dikonsumsi. Ini UI yang ngetest ya. Katanya terlalu banyak kadar timbalnya, logam. Tapi ini sebagian ya, ada juga yang bagus.

P: terus kalau komposnya tidak terlalu bagus dan ga ada yang ngambil, diapain, Pak?

I: dibuang ke TPA, dianggap residu.

P: terus yang bagus?

I: ya ada yang ngambil, ada yang ngehargaain juga.

P: tapi selama ini belum mematok harga ya Pak?

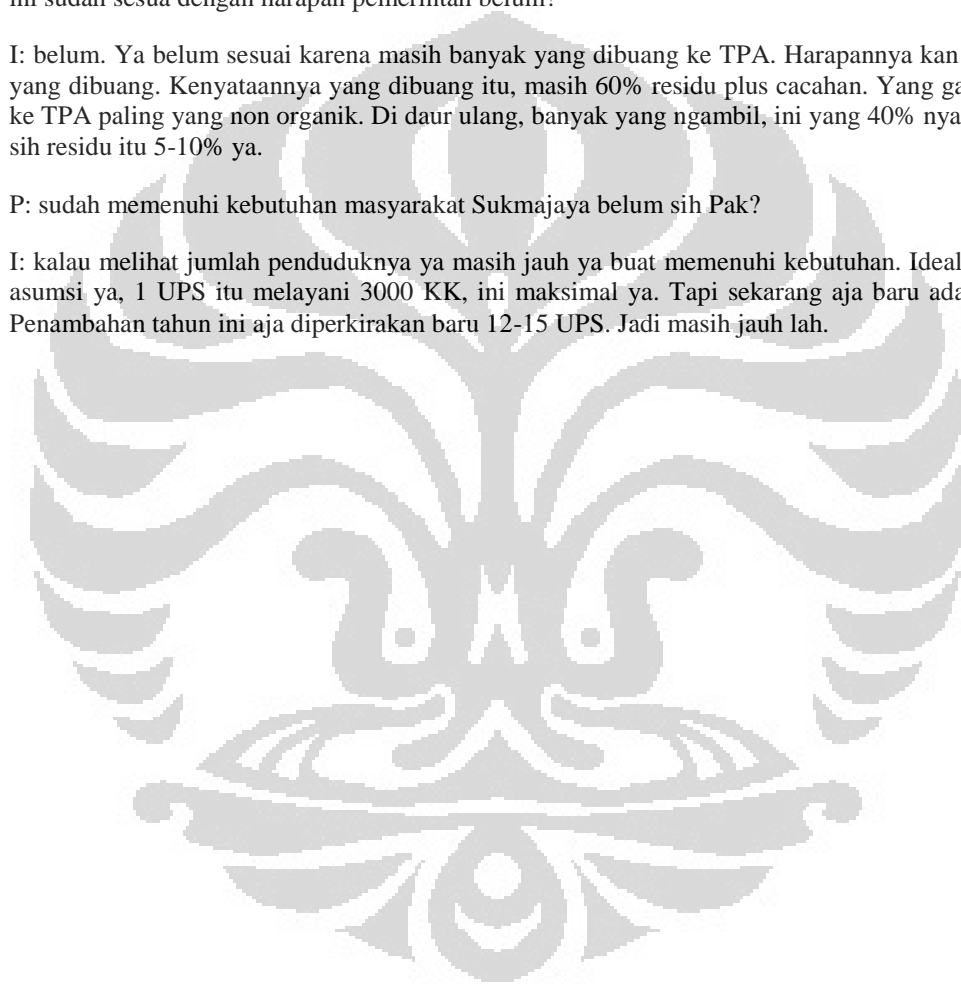
I: ga, paling ya ganti karung aja lah. Istilahnya biaya karung. Ya kalau UPS ini sudah bisa jalan bagus ya nantinya kan komposnya bisa dijual. Tapi kan ada juga sampah dari luar, kaya dari bekaasi. Jadi percuma juga kualitas sampahnya dari Depok sudah bagus, tapi dari luar ga. Jadi, keberhasilan UPS itu, selain ditentukan Depok sendiri, juga ditentukan oleh hubungan dari daerah-daerah sekitar.

P: tapi sampai sekarang nih, Pak. Kan di Kecamatan Sukmajaya ada 2, sadewa sama merdeka II, ini sudah sesuai dengan harapan pemerintah belum?

I: belum. Ya belum sesuai karena masih banyak yang dibuang ke TPA. Harapannya kan cuma 5% yang dibuang. Kenyataannya yang dibuang itu, masih 60% residu plus cacahan. Yang ga terbuang ke TPA paling yang non organik. Di daur ulang, banyak yang ngambil, ini yang 40% nya. Idealnya sih residu itu 5-10% ya.

P: sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Sukmajaya belum sih Pak?

I: kalau melihat jumlah penduduknya ya masih jauh ya buat memenuhi kebutuhan. Idealnya kalau asumsi ya, 1 UPS itu melayani 3000 KK, ini maksimal ya. Tapi sekarang aja baru ada 19 UPS. Penambahan tahun ini aja diperkirakan baru 12-15 UPS. Jadi masih jauh lah.



Lampiran 4 Transkrip Wawancara dengan Kasie Pengadaan Sarana Prasarana DKP Kota Depok

Informan : Bapak Moch. Isa, Kasie Pengadaan Sarana Prasarana DKP Kota Depok

Hari/tanggal : Selasa, 6 Maret 2012

Waktu : 10.46-11.03

Keterangan : P (Peneliti)

I (Informan)

Hasil Wawancara

P: proses timbulnya ide pembangunan UPS itu apa ya Pak?

I: awalnya ada UPS? Waduh itu panjang banget, Neng. Jadi UPS itu ada karena kita melihat dari timbunan sampah yang besar yang mana sebelumnya pengelolaan sampah selalu dari masyarakat ke TPA. TPA punya kapasitas yang terbatas, umur yang terbatas, sarananya juga terbatas. Sehingga kalau sampah ini selalu dibuang ke TPA, nanti TPA itu cepat penuh. Artinya, umurnya pendek, gitu. Kalau penuh, kemana lagi? Nyari lahan untuk dijadikan TPA itu tidak mudah, siapa orang, lahannya bisa dibebaskan untuk TPA. Atau siapa orang yang mau rumahnya didekati oleh TPA. Sehingga muncullah suatu program adanya UPS. UPS itu untuk mengolah sampah di sumber sampah. Sehingga semua sampah yang ada di sumber-sumber sampah itu, tidak semuanya harus diangkut ke TPA. Dampaknya jelas dong, umur TPA panjang. Karena TPA kan cuma masuk kolam terus ditutup, sanitary landfill ya. Itu yang mendasari awalnya kenapa UPS itu muncul programnya. Jadi tidak sebanding sampah yang dihasilkan dari masyarakat dengan TPA.

P: ini termasuk dalam RPJMD programnya walikota ya Pak?

I: iya, betul.

P: biayanya berapa ya, Pak?

I: jangan ke biaya dulu. Ini ke bagaimana caranya dulu supaya UPS bisa dibangun. Berarti kita bicara perangkatnya. Pertama, ada tersedia lahan. Lahan yang siap dibangun UPS, baik lahan dari masyarakat ataupun lahan yang statusnya fasos fasum (fasilitas sosial-fasilitas umum) artinya lahan punya negara. Kalau fasos fasum tidak ada, ya kita harus beli dari masyarakat yang lahannya bersedia dibebaskan oleh Pemda untuk dibangun UPS. Pertimbangan menentukan lahan itu, akses jalan ada, sumber sampah ada. Karena kan UPS ini fungsinya untuk mengolah sampah jadi pupuk. Baru setelah itu dibuat DED, kita buat perencanaannya, kita juga minta bantuan konsultan. Kurang lebih biayanya, tahun ini, menurut perkiraan dari perencana, mencapai 500 juta lah.

P: tahun ini ya Pak, kalau yang sudah berjalan kemarin, terutama untuk Sukmajaya?

I: Sukmajaya, ya kurang lebih 500 juta, itu dengan berbagai item pekerjaan ya. Ada nguruk, ada segala macem. Ga langsung dibangun gitu karena tanahnya belum tentu tanah siap pakai, belum tentu itu. Kadang ada tanahnya yang curam, jadi kita ada kegiatan pemerataannya dulu. Jadi 500 juta itu sudah include dari ngurusin tanah sampai jadi bangunan.

P: sudah sama mesin juga?

I: ga, mesin beda lagi. Mesin itu seperangkat itu kurang lebih 280 juta. Mesin itu ada banyak, ada 4 satu set itu.

P: ini lelangya Pak?

I: iya, lelang.

P: yang bangun juga lelang?

I: iya, lelang.

P: ini yang ngebuka lelang dari sini langsung, atau lewat Pemda?

I: iya, yang Sukmajaya dari sini. Tapi kalau yang baru sudah lewat Pemda, lewat LPSE.

P: terus ada sosialisasi segala macam ga untuk masyarakatnya?

I: ada.

P: dari sini?

I: ga, dari seksi pengolahan sampah. Jadi dulu ada sosialisasi UPS itu apa sih. Sama ajakan juga kepada masyarakat untuk membiasakan memilah sampah, mana organik mana yang an organik.

P: tapi, masyarakatnya sendiri waktu sosialisasi ada penolakan ga sih?

I: ya itu lah kalau programnya sampah. Yang program bukan sampah aja ada pro kontra.

P: tapi kok sampai akhirnya bisa dibangun, Pak?

I: ya itulah kemampuan kita, ada negosiasi. Biasanya negosiasinya jalan dibagusin, atau apalah gitu.

P: terus di Sukmajaya sendiri bentuk negosiasinya apa ya, Pak?

I: kebetulan saya belum disitu lah. Tapi kita lihat konkretnya aja lah, sekarang kan udah terbangun, jadi kan ada dukungan dari masyarakat. Kalau merdeka I sempetdipermasalahan sampai bangunan itu selesai. Sampai kepada proses pengadilan (PTUN), tapi kita menang. Cuma kan masyarakat megangnya omongan walikota ya, kita juga takut bentrok, jadi ya ga difungsikan.

P: terus berapa lama sih Pak tahapan pembangunan sampai beroperasi?

I: tahapannya itu kan di rencanakan, terus dilelang, abis itu dibangun, terus kita pasang mesinnya dan sarana lainnya. lamanya ya tergantung lelangnya, kadang-kadang kan lama. Kalau ngebangun sih 2-3 bulan bisa selesai.

P: ini semua perencanaan UPS sama semua?

I: sama.

P: terus kalau di Sukmajaya, kenapa penentuan lokasinya ada di sadewa, merdeka I, sama merdeka II, Pak?

I: yang pertama, karena wilayah itu padat penduduk, jadi sumber sampahnya tinggi. Yang kedua, pada saat itu kemungkinan besar hasil dari koordinasi dengan masyarakat. Ketiga, itu status tanahnya kan fasos-fasum.

P: bentuk dukungan dari masyarakat di Sukmajaya apa ya Pak?

I: harusnya sih ada, dari penentuan lahan aja harus dari dukungan masyarakat.

P: sosialisasi yang ngadain DKP langsung?

I: iya DKP. Jadi kita minta dijadwalkan oleh kelurahan untuk sosialisasi. Jadi biasanya kita, menentukan, terus kelurahan yang mengumpulkan warganya. Disana kita bicara mengenai UPS ini.

P: ada hambatan ga sih Pak waktu pembangunan?

I: banyak pasti. Nolak lah. Makanya kita dari jauh-jauh hari harus selalu sosialisasi. Sosialisasinya ini berkali-kali lho, dari sebelum dibangun aja berkali-kali kita.

P: untuk yang Sukmajaya kan sudah dari tahun 2009 ya, Pak, ini perannya sudah signifikan belum Pak untuk mengurangi sampah yang ke TPA?

I: ya itu larinya ke kebijakan ya. Kalau di merdeka I kan sudah ada keputusan pengadilan ya, kita menang. Tapi kita ga berani mengoperasikan karena kita juga ga mau benturan sama masyarakat. Jadi ya cari baiknya aja. Gedung itu tetap berfungsi, tapi bukan untuk mengolah sampah, tapi untuk menampung kompos, dari akhir tahun 2011. Karena begini, semua UPS ini kan semua sampahnya di olah jadi kompos, nah komposnya pada saat belum bisa digunakan baik ke masyarakat ataupun ke yang lain-lain, kan banyak tuh tiap hari. Jadi ditaruh di situ (merdeka I).

P: kalau sadewa dan merdeka II kan aktif ya mengolah sampah, itu berperan secara signifikan ga sih, Pak?

I: ya berperan lah. Kalau ga ada UPS, TPA ga ada setaun udah penuh. Ya walaupun ada UPS, tapi ga semua sampah bisa terolah kan, jadi ada yang diangkut juga ke TPA. Tapi kan armada kita terbatas, jadi ya ga semua juga keangkut. Sementara yang ga terangkut, di taruh dulu di UPS.

P: sampai sekarang, kondisi unitnya sendiri di Kecamatan Sukmajaya sendiri masih bagus ga sih, Pak?

I: masih, kan ada pemeliharaannya.

P: kondisi sekarang sudah sesuai dengan rencana awal belum sih, Pak?

I: ya sudah sesuai lah, kan ada perencanaannya. Sesuai dengan DED.

P: kan gini, Pak, dari sini sudah merencanakan, ada biayanya sekian, nah dari Pemda apakah ngasih sejumlah itu apa gimana Pak?

I: kan ada tender. Bisa aja perusahaannya nawar. Kan tawar-tawaran.

P: terus pengumuman pemenangnya yang menentukan dari sini apa dari Pemda juga?

I: disini nanti diumumkan lewat koran yang dulu, yang sekarang kewat LPSE.

Lampiran 5 Transkrip Wawancara dengan Koordinator UPS Merdeka II

Informan : Bapak Irawan, koordinator UPS Merdeka II

Hari/tanggal : Senin, 5 April 2012

Waktu : 10.42-10.53

Keterangan : P (Peneliti)

I (Informan)

Hasil Wawancara

P: saya kan ambilnya memang untuk daerah Kecamatan Sukmajaya saja. Nah, salah satunya kan ada UPS Merdeka I. Tapi itu sudah tidak berfungsi lagi, kenapa ya Pak?

I: Merdeka I ga fungsi karena ini, banyak masyarakat yang tidak mau deketan sama sampah. Tempat penampungan sampah, masyarakat ga mau. Maunya rumah mereka kondusif, tidak bau.

P: terus kalau yang disini (UPS merdeka II)?

I: yang disini? Nah ini, jadi lebih ke pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat intelektual justru mencemooh sampah itu. Masyarakat kaya gamau karena takut sakit. Masyarakat kaya, komplek ya, karena merasa ada wabah penyakit, gitu... Tapi kalau disini, ketika sampah ini memang bener-bener dari masyarakat, ya mereka merasa tidak boleh sembarangan. Jadi harus ada pengumpulan, harus ada pencacahan. Ya disini tadinya juga tempat penampungan sampah (TPS). Tapi ketika dibangun (UPS), ya mereka paham. Ya siapa lagi yang mau berketempatan, jangan terus-terusan menzolimi daerah sana (daerah TPA Cipayung), disana kan tempat pembuangan akhir.

P: tapi kenapa sih dibikinnya di Sadewa, Merdeka I, sama Merdeka II?

I: kalau kenapa ya karena ga beli, lahan kan ada.

P: oh.. Karena ini awalnya TPS ya Pak?

I: Iya. Simpel itu *mah*, karena disitu (UPS Merdeka II) tempatnya tadinya tempat pembuangan sampah, sehingga ya sekalian dijadikan.

P: sebelum dibangun UPS gini, bentuknya terbuka gitu aja ya Pak?

I: terbuka, sampah liar dilempar-lempar. Akhirnya dipager, ga boleh. Terus program pemerintah itu kan bilang kalau sampat itu ga boleh dibakar, harus diolah. Makanya ada mesin pencacah.

P: kalau di daerah sekitar Merdeka II ini, bentuk dukungan dari masyarakatnya apa ya Pak?

I: dukungan? Ya dukungannya mereka menerima berdiri, berjalan, berarti masyarakat masih mendukung. Tapi kalau itu sudah pencemaran, bau yang tidak sedap, ya nanti mereka tidak mendukung.

P: pekerjanya sendiri dari masyarakat ya?

I: iya. Masyarakat sekitar sini (UPS Merdeka II).

P: itu yang mengajukan dari mana ya Pak?

I: ya yang mengajukan dari bawah.

P: jadi, masyarakat yang melamar atau bagaimana Pak?

I: bukan, kan ini difasilitasi oleh pemerintah, ya mereka minta disiapkan tenaga kerja. supaya tidak jauh-jauh, ya akhirnya pekerjanya yang dekat aja sama lokasi yang diambil.

P: jadi ini pekerjanya dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) semua atau bagaimana ya Pak?

I: bukan, ya dari masyarakat sekitar.

P: tapi yang nyari LPM?

I: ga, yang nyari mah di akomodir dari tingkat RT/RW

P: pekerjanya ada berapa ya Pak kalau di Merdeka II?

I: termasuk sama koordinator 14. 12 tenaga kerja, 1 keamanan, 1 koordinator.

P: Kalau di Merdeka II sendiri, ada hambatannya ga sih Pak waktu pembangunan?

I: ga ada.

P: sistem kerjanya gimana ya Pak?

I: sistem kerjanya ya pagi-pagi ada gerobak yang datang, dipilah, digiling, diayak. Terus dipilah lagi untuk yang ga bisa diolah (residu). Jadi, dipilih mana yang bisa dijadiin kompos, mana yang jadi residu.

P: ini bikin komposnya disini sekalian?

I: iya

P: terus nanti hasilnya dibawa kemana Pak?

I: dibawa ke Merdeka I, yang rencananya pemerintah mau menyiapkan rumah kompos. Ini rencananya ada di Merdeka I. Sama paling diambil sama dinas.

P: tapi sampai sekarang disitu (Merdeka I) sudah jalan?

I: belum. Tapi kalau di masing-masing UPS-nya sudah ada komposnya.

P: jadi, komposnya itu dibawa ke Merdeka I, terus dari sana dibawa kemana lagi?

I: nah itu ke dinas deh itu. Ini nanyanya ke dinas (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) aja.

P: setiap hari bisa berapa gerobak, Pak?

I: 35 gerobak, ini sampah yang diatur. Terus yang ditumpuk didepan (UPS) bisa 2 gerobak. Terus ada germo (gerobak motor), yang ngambilin sampah dipinggir-pinggir jalan, ini bisa sampe 3 germo tiap harinya. Tapi kalau germo datengnya siang, sekitar jam 2.

P: terus ini semua bisa terolah dalam 1 hari apa gimana Pak?

I: oh.. ga. Semuanya ga bisa terolah, dari mesin yang ada tidak memadai.

P: kira-kira berapa persen?

I: ya kalau persentasenya *mah* masih dibawah 50%. Hanya UPS ini kan berdiri untuk mengurangi debit sampah yang ada di TPA, sehingga tidak membludak. Makanya dibangunlah UPS. Kalau untuk puas sama terolah semua ya ga mungkin. Karena, satu, mesin UPS-nya harus diliat.

P: terus untuk Merdeka II ini sendiri sangat berperan ga sih Pak untuk mengurangi sampah?

I: yang berperan itu RT/RW. Jadi gerobak-gerobak ini ada di masing-masing RT/RW, baru dibawa ke UPS.

P: cakupannya RT?RW mana saja ya Pak untuk Merdeka II ini?

I: ada RW 1, RW 28, RW, 21, RW 29, RW 6, RW 5, RW 4, RW 3, RW 8, RW 26. Ini banyak RW yang jauh dari sini (Merdeka II), jadi susah payah juga. Harusnya kan pemerintah kalau mau bikin gini cari tempat yang ada ditengah-tengah, jadi ga jauh ke semua tempat. Tapi ya gimana lagi.

P: pernah ada komplain ga Pak dari masyarakat:

I: ga pernah. Adanya ya paling di RT/RW.

P: terus mekanisme tanggung jawab dari Bapak ke dinas gimana ya Pak?

I: ya paling itu, bikin laporan tiap bulan. Isinya itu ada jumlah gerobak selama satu bulan. Terus berapa kilo, berapa kubik residu. Ada juga berapa kilo kompos.

P: untuk kondisi UPS Merdeka II sendiri saat ini gimana ya Pak:

I: ya seperti yang bisa kamu liat, gitu-gitu aja. Kalau mesinnya yan sudah beberapa kali ganti. Misal kan pisaunya karena udah lama, jadi ga tajem lagi. Ya harus diganti atau di *service*.

P: kinerja dari UPS Merdeka II sendiri udah sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat belum ya, Pak?

I: ya udah lumayan. Intinya bisa mengurangi jumlah sampah ke TPA lah. Kalau biasanya tiap hari 4 truk sampah dibuang ke TPA, sekarang dari daerah sini (Merdeka II) aja cuma 4 truk dalam seminggu dibawa ke TPA-nya.

P: terus, UPS Merdeka II ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar belum sih, Pak?

I: ya belum. Gini aja, jumlah RW di sekitar sini aja banyak, ga semuanya (sampah) bisa masukke UPS. Jadi ya tetep aja ada penampungan-penampungan sampah liar.

P: dari masyarakat sendiri, apakah sudah puas dengan kinerja UPS Merdeka II, Pak?

I: ya belum juga. Karena kapasitas UPS ini kan emang terbatas, ga sesuai sama jumlah penduduk. Buat tahun ini aja rencananya cuma ada penambahan 15 unit UPS.

P: oh iya, Pak. Untuk operasionalnya, UPS Merdeka II ini butuh biaya berapa ya?

I: kita paling Cuma butuh solar. Kira-kira sehari itu pake 20 liter. Ya tinggal di kaliin aja tuh sama harganya sampe sebulan.

P: terus dapetnya cukup ga sih, Pak?

I: ya di cukup-cukupin. Yang kurang sih paling gaji pekerja. Di bawah UMR gaji mereka, Cuma 750 ribu. Diitung-itung cuma 28.000 sehari. Udah gitu sama sekali ga dapet tunjangan kesehatan. Padahal mereka tiap hari kerjanya bareng sampah. Padahal kan kesejahteraan mereka juga perlu diperhatiin. Mereka *mah* kalau ada kerjaan lain, ya mending kerja yang lain.

Lampiran 6 Transkrip Wawancara dengan Koordinator UPS Sadewa

Informan : Bapak Slamet Riyanto, Koordinator UPS Sadewa

Hari/tanggal : Selasa, 6 Maret 2012

Waktu : 12.12-12.32

Keterangan : P (Peneliti)

I (Informan)

Hasil Wawancara

P: Selamat siang, Pak. Maaf ya jadi mengganggu.

I: oh, ga apa-apa kok. Kita ke sana aja ya, disini kurang enak tempatnya.

P: iya, pak.

I: maaf ya, ini tempatnya adanya kaya gini.

P: iya, pak, ga apa-apa kok. Langsung mulai aja ya Pak, ini dengan Pak Slamet kan ya?

I: iya, Slamet.

P: ini, Pak, saya mau tanya tentan UPS.

I: he eh.

P: kenapa sih dibangunnya di Sadewa sini?

I: oh itu, jadi begini ya mbak. Awalnya, dulunya, sebelum ada UPS ini, adanya TPS. Jadi seluruh daerah Sadewa, eh, seluruh Depok Tengah II ini, khususnya untuk perumahan, memang buangnya kemari. Itu awalnya ya, jadi dari tembok ini (sambil menunjuk bangunan di dekat tempat wawancara) sampai jembatan sana, itu tempat pembuangan, dari tahun 1978 lah ya. Saya kan disini dari tahun 1979.

P: berarti gereja itu tadinya belum ada?

I: iya, tadinya tempat sampah. Sampai pinggir kali sana, gitu. Luas memang tempat pembuangannya kita, gitu. Awalnya, awalnya memang kita, eeee, TPS ini tadi memang.

P: sebelum ada UPS.

I: iya, terus ada UPS, program dari Pak Nurmahmudi, dibangunlah UPS, untuk menuntaskan sampah se-Kota Depok., khususnya untuk wilayah di kecamatan, apa, Sukmajaya. Jadi kita nanganin khusus untuk Kelurahan Mekarjaya aja. Jadi memang khusus Kelurahan Mekarjaya aja kita nanganin sampah.

P: berapa RW, Pak?

I: dari 22 RW.

P: 22 RW?

I: he eh, dari 22 RW kita menangani sampah.

P: kan ini kan ya Pak

I: he eh

P: banyak kelurahan nih ya Pak di Sukmajaya

I: iya.

P: tapi, UPS nya cuma ada di 2 kelurahan.

I: iya, memang cuma ada di Abadijaya sama di kelurahan Mekarjaya aja yang ada UPS.

P: terus kelurahan lain?

I: ga ada, ga ada.

P: terus buangnya ke mana?

I: kalau untuk mereka, kita kurang tahu persis ya, Mbak. Paling kalau untuk Abadi, udah dibuang ke sana ya, apa, merdeka II ya. Tadinya kan ada 3, merdeka I, merdeka II, sama sadewa. Merdeka I di tutup, karena dulu dia kapasitas sampahnya melebihi dari volume. Akhirnya ditutup difungsikan jadi rumah kompos, gitu kan. Terus akhirnya rumah kompos ga berjalan, difungsi alihkan lagi menjadi workshop. Itu akhirnya ditutup. Jadi yang masih berjalan ini untuk wilayah Kecamatan Sukmajaya ini ya kita (UPS Sadewa) sama merdeka II. Yang lainnya emang belum ada.

P: terus yang lain buangnya kemana?

I: ada TPS, seperti di Cimanuk itu, mereka di samping kelurahan apa ya? Tirtajaya kalau ga salah. Ya pokoknya di Cimanuk lah, itu khusus disamping kelurahan situ ada TPS itu. Tapi tidak difungsikan untuk menjadi UPS.

P: jadi, bentuk dukungan apa sih Pak dari masyarakat sekitar sini?

I: ehm... sebenarnya sih, tadinya ya Mbak, awalnya memang kita tadinya kurang mendukung ya karena kan dari dua warga sini, dari Nakula sama Sadewa tadinya memang menolak. Tapi dengan adanya program UPS ini dari Pak Nurmahmudi ini untuk menuntaskan masalah sampah, juga untuk merekrut karyawan, untuk dipekerjakan dengan iming-imingnya ada gaji. Ya akhirnya membantu lah gitu untuk mengatasi masalah pengangguran. Jadi warga sekitar sini diambil. Jadi Alhamdulillah warga akhirnya ga menolak. Dan juga didukung, itu siapa, RT, RW, sama lurah. Iya gitu, awalnya.

P: ini pernah ada sosialisasi ga Pak?

I: dari?

P: DKP.

I: ya memang kita terus terang aja kita itu ada dibawah naungan dinas kebersihan. Ya seperti, proses sosialisasinya seperti dari segi keuangan, kita hanya mendapatkan gaji aja, sebesar 750 ribu per karyawan, per pekerja.

P: terus kalau untuk sosialisasinya, kerja sama dengan kelurahan ga sih? Kaya ngumpulin masyarakat, mengundang masyarakat, terus ngejelasi kalau disini itu mau dibangun UPS.

I: awalnya memang ada kaya gitu.

P: itu Bapak ikut ga waktu sosialisasi?

I: ya waktu itu kan belum, saya masih belum jadi koordinator ya. Masih jadi pekerja biasa. Eee, saya dulu masuk kemari karena diambil sama RW saya, gitu. Jadi dari Sadewa diambil berapa orang, dari nakula berapa orang, gitu. Jadi total keseluruhan semua ini, pekerja itu ada 14 orang. Jadi memang sebagian ini dari warga. Warga ya, warga setempat.

P: tapi Pak, warga pas mau dibangun UPS, tau semua ya?

I: tau tau.

P: ada hambatannya ga sih Pak?

I: oh, ga ada. Hanya permasalahannya dulu cuma sampah aja ya yang sampai mebludak sampai pinggir jembatan, sampai pinggir-pinggir jalan.

P: sebelum ada UPS ya Pak?

I: sudah, sudah berjalan UPS. Tapi kan koordinatonya buka orang sini, ga asli. Ya akhirnya mungkin karena kita ga tau dia peduli ga nya, digantikan lagi, tapi koordinator pertama sama kedua sama aja. Nah, ketiganya saya. Saya ditunjuk dari warga, siapa nih yang mau, terus pada nunjuk saya. Ya sudah, saya coba. Saya kan juga warga asli sini, makanya itu saya ditunjuk. Ini sekitar tahun 2009, sudah 3 tahun. Mulai bulan September saya jadi koordinator.

P: jadi, sudah dari tahun 2009 ya dibangun?

I: udah udah. Kita kan bangun ini, mulai ini digunakan jadi UPS itu bulan Juni.

P: tahun 2009?

I: iya, 2009

P: itu Bapak langsung yang jadi koordinator?

I: belum. Ada orang lain.

P: oh. Terus ini past awal-awal walaupun udah berfungsi, tapi sampah masih mebludak?

I: iya

P: terus akhirnya diprotes masyarakat?

I: iya, diprotes sama warga.

P: kalau sekarang gimana Pak?

I: Alhamdulillah, sudah 3 tahun ini tidak pernah ada pemebludakan, paling cuma sampe depan pintu gerbang. Karena itupun kita ada pembuangan dari wilayah abadi yang buang kemari. Ini kan karena ada penutupan dari Merdeka I. Jadi sebagian, dia itu pembuangannya dibagi dua. Yg satu itu kemari, ada 13 gerobak. 10 gerobak buang kesana, ke Merdeka II.

P: terus kalau disini ada hambatannya ga Pak waktu pembangunan UPS?

I: ga ada ga ada, kita ga ada kendala untuk pembangunan ini. Ini malah ada dukungan, soalnya kan ngambil karyawan dari warga sini. Ya kita merasa terbantulah, kan mengurangi pengangguran. Ini kan rata-rata karyawannya sudah berkeluarga.

P: sistem kerjanya gimana, Pak?

I: sistem kerjanya kita, ya maaf ya mbak, kalau dari UMP ya kita memang masih dibawah standar dan itu kita juga ga bisa menolak karena memang itu udah dari sananya. Dan kita juga ga mendapatkan fasilitas yang lain selain gaji. Apa itu askes, apa itu jamsostek, ga ada. Kita cuma dapet gaji, sama subsidi BBM aja, apa itu, solar untuk mesin.

P: perbulan itu mengirim laporan ga sih, Pak?

I: Apanya?

P: ngirim laporan ya tiap bulan ke DKP?

I: tiap bulan kita ga ada ya, cuma laporan tentang volume sampah. Sama paling absen-absen perminggu lah.

P: proses pengerjaannya, misalnya sampah masuk, diapain diapain dulu sih, Pak?

I: oh iya, karena berhubung mesin kita mati, biasanya kita jam 8 itu masukin gerobak dulu, itu masuknya dua dua dulu.

P: itu bisa sampai berapa gerobak Pak sehari?

I: itu sehari, kalau mesin ini bisa berjalan, itu bisa sampai 25-30 gerobak, Mbak. Karena tuntutan dari mereka itu kita harus menuntaskan 30 gerobak, karena dibuang debit sampah itu ke TPA itu harus mencapai 30 m3 perhari. Lebih dari kapasitas itu, ya itu DKP yang tanggung jawab. Tapi kalo disini sih kita biasanya nerima 42 gerobak. Itu mereka sekali buang bisa 2-3 kali. Tapi biar ga membludak, eee, akhirnya saya bikin peraturan tuh, maksimal satu gerobak itu dua kali buang.

P: jadi maksudnya, sampah yang dibuang ke TPA itu tidak boleh lebih dari 30 m3 perhari?

I: iya, bener.

P: terus disini mampu, Pak?

I: ga ga, sekarang ini kita masih lebih dari 30 m3, Mbak. Soalnya kan masih banyak sisa (residu). Sekarang itu total gerobak sudah mencapai hampir 42 gerobak.

P: tiap hari?

I: iya, tiap hari. Tapi sekarang kita bagi dua sistemnya, Mbak. Setiap hari sebelum kita bikin sistem buang-libur-buang-libur, itu bisa mencapai 80 gerobak karena 2x buang mereka (masyarakat). Kan ada 42, kalo 2x kan mencapai 84. Akhirnya saya bagi jadi 2 pembuangan. Setiap hari senin, itu ada kelompok A, kelompok B libur, nanti selasa kelompok B buang, kelompok A libur.

P: terus yang libur itu ga buang ya, Pak?

I: iya, ga buang.

P: terus gimana?

I: ya sementara mereka ditahan dulu. Dikumpulkan, mungkin ya taro dimana ya sama petugas sampahnya, nah besoknya pas jadwal mereka buang ya baru mereka buang. Jadi sesuai jadwal. Ini juga kita udah dapet persetujuan dari DKP kan sama pengurus-pengurus RW, gitu. Karena bukan apa-apa, karena kan kita pembuangan cuma ada disini aja, kalau mereka ga mau kita atur, ya terserah mereka mau buang kemana, tapi kalau mereka mau saya atur, ya monggo mereka buang kesini. Dengan catatan, sehari harus 2 gerobak.

P: sampai sekarang, yang mampu diolah berapa persen?

I: sementara kita itu kan ga ngegiling karena mesin itu pada rusak. Mengalami kerusakan.

P: kalau biasanya Pak?

I: oh, kalau biasanya, dari 30 gerobak itu yang bisa diolah ya lebih ya dari 30 kubik ya. Ya kan 1 gerobak aja udah lebih dari tronton ya, 1 tronton itu. Itu sebelum diolah ya. Kalau persennya, berapa persen ya? Emmmm..

P: lebih dari setengah ga Pak?

I: ya kalau diolah, dicacah itu bisa mencapai setengah sehari. Dulu pas kita masih berjalan jadi pupuk itu ya kita ngolah jadi pupuk, residunya kita buang. Jadi cuma hasil cacahannya aja. Nah seperti mainan apa kita kumpulkan.

P: ada pengepulnya gitu ya Pak?

I: ha ah, kadang ada dari orang-orang dinas juga.

P: terus sekarang ini ga ngolah jadi pupuk lagi ya?

I: sementara, karena pupuk pun udah ga berjalan, ya paling kita cuma ngegiling aja. Itu kalau mesinnya jalan ya.

P: terus hasil gilingannya dibawa ke mana Pak?

I: ya sementara diangkut paling Mbak.

P: ke TPA

I: iya, sementara gitu. Jadi untuk mengurangi debit sampah yang macem kaya organik itu, ya, kan sampah organik itu bisa numpuk-numpuk terus, tapi kan setelah dicacah itu bisa jadi mepes. Jadi hanya untuk mengurangi itu aja sebenarnya.

P: sejak kapan ini ga ngolah jadi pupuk lagi Pak?

I: ini kita sudah hampir, eeee, sebelum atasan saya ganti ya, Pak Abra. Hampir 4 bulan lah mesinnya mati. Sampai sekarang belum ada kejelasannya kapan mesin mau diperbaiki atau bagaimana.

P: tapi sudah mengajukan?

I: udah udah. Karena kita kan ada pihak ketiga, Mbak. Untuk perawatan dan pengadaan mesin ini dilimpahkan ke pihak ketiga, namanya PT Cepakas namanya, dibawah pimpinan Bapak Singgih. Tadinya sebelum dipegang oleh pihak swasta, itu memang teknisinya dari orang kita, jadi orang dinas.

P: sampai sekarang belum diperbaiki?

I: belum. Sampai sekarang. Kita juga gatau kenapa alasannya. Ini atasan saya yang baru, Pak Burhanudin namanya, saya sudah ajukan, tolong jika bapak ingin kami jalan lagi, ini kerja lagi, hidupan mesin. Tapi sampai sekarang belum ada. Ya akhirnya, kita cuma bisa ngatur sampah aja tiap hari.

P: kalau ngegiling itu masih bisa?

I: masih. Sebenarnya dengan menggiling itu bisa mengurangi debit juga. Sisa-sisa sampah yang ga digiling juga paling berapa persen.

P: jadi yang ga jalan lagi itu pupuknya ya Pak?

I: he eh, pupuknya udah ga berjalan.

P: terus dengan adanya UPS ini ya Pak, signifikan ga sih Pak mengurangi sampah di lingkungan sini?

I: sebetulnya sih ya, namanya juga sampah, tiap hari kan buang. Gimana ya, ya ga terlalu sih ya. Dari segi pengangkutan aja kita kurang, kalo ini mengurangi kan ya tiap hari ya diangkut, untuk mengurangi sampah ya. Ini kan ada aturannya, ada jadwalnya, seminggu itu berapa kali kita diangkut. Kalau ga diangkut ya otomatis membludak, kan tiap hari membuang.

P: terus sebelum ada UPS itu diangkut ke TPA bisa berapa kali, Pak? Ada bedanya ga setelah ada UPS?

I: ya tergantung dari penjadwalan sih ya Mbak. Jadwalnya itu kita seminggu 3x pengangkutan. Hari senin, selasa, sama hari kamis. Kalo kamis ga diangkut, ya paling jumat. Jumat ga bisa ya sabtu. Makanya itu, kalau ga diangkut ya ini bakalan numpuk terus.

P: ini kan seminggu 3x ya Pak diangkut, terus kalau ga diangkut, ditaro didalem aja?

I: iya, ya udah sampai membludak pun ya kita akali. Kita coba pake keranjang atau bagaimana lah. Hanggar kita kan kecil. Ini kan cuma 200 meter, Mbak. Panjangnya kesana, hanggar kita ini paling kecil, dibandingkan hanggar UPS-UPS yang lain. Sedangkan debitnya ini hampir sama dengan debit sampah di Jalan Jawa.

P: di Jalan Jawa gede banget sih ya UPSnya.

I: Nah, itu dia. Itu sampahnya hampir sama. Debit sampahnya hampir sama, 80 gerobak perhari dia. Dia juga sama sistemnya kaya saya dibagi dua. Tapi kan hanggarnya besar, dia punya tempat lahan diluar. Jadi ya wajar kalo dia keliatan lebih bersih. Kalau kita kan numpuk.

P: terus ada keluhan gitu ga sih Pak dari masyarakat?

I: ga ada sih, ya paling kalau ga diangkut ajalah. Karena kan pasti akan menimbulkan bau.

P: tapi ga sampai demo-demo gitu kan?

I: ga ga sampai kaya gitu. Paling kalau ga diangkut sama sekali, ya baru.

P: tapi komplainnya ke Bapak langsung apa gimana?

I: biasanya komplain memang ke saya. Terus ya saya biasanya ngadi ke kepala bagian yang pengangkutan, Pak Bambang. Tapi ya sebelumnya kita ngomong dulu ke atasan kita. Kita bilang aja ini warga sadewa pada komplain, terus disuruh bilang aja ke Pak Bambang. Atau kita bisa juga hubungi korcamnya (koordinator kecamatan) yang menangani pengangkutan sampah.

P: terus tanggung jawab dari UPS Sadewa itu apa sih Pak?

I: tanggung jawab dari kita itu ya masalah sampah ini. Sebenarnya, fungsi UPS ini kan bukan menangani sampah, tapi kan mengolah. Tapi berhubung mesin kita mati, ya udah, ga bisa difungsikan.

P: tapi adanya UPS ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat belum sih Pak?

I: kalau pas kita bikin pupuk ya banyak, waktu kita olah jadi pupuk, itu banyak warga yang pada beli. Sampah juga banyak yang diolah, jadi kan mengurangi sampah juga di lingkungan sini. Tapi sekarang kan udah ga bisa lagi, ya udah gini gini aja.

P: terus dulu pupuknya dijual berapa Pak?

I: eeee, kita sih ngirim dulu ya ke dinas, sama taro ke rumah kompos ya di daerah Kecamatan Cilodong. Itu kita bisa ngirim sampai 700 karung. Kalo untuk warga ya tergantung permintaan ya.

P: masyarakat disini udah puas belum sih Pak sama UPS?

I: kalo saya lihat sih masih belum, karena dari segi pengangkutan sendiri, ya masih ngacak. Kadang ga sesuai jadwal, itu aja. Belum, belum ada kepuasan.

P: kalau biaya operasional sendiri bisa habis berapa ya Pak?

I: kita ga ada mbak, karena kita ga dikasih dana gitu. Kalo untuk petugas gerobak ya hanya sukarela dari warga. Paling cuma solar, tapi itu dikasihnya solar langsung, bukan uang. Perminggu jatahnya.

P: kurang ga sih Pak?

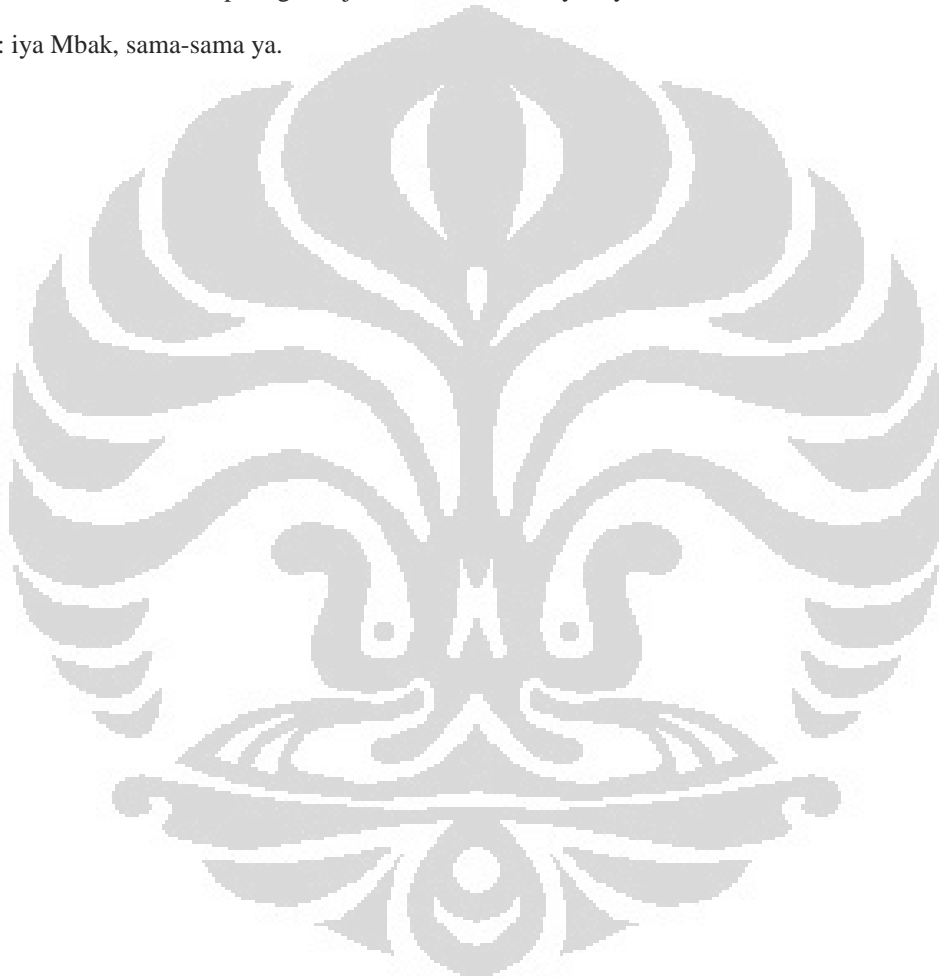
I: ya kurang, Mbak. Jatahnya cuma 144 liter.

P: terus kalau kurang gimana, Pak?

I: ya kalau kurang, ya udah berhenti. Karena ga ada penambahan lagi, jadi ya harus nunggu minggu besoknya lagi.

P: oke. Udah sih Pak, paling ini aja. Terima kasih banyak, ya.

I: iya Mbak, sama-sama ya.



Lampiran 7 Transkrip Wawancara dengan Sekertaris RW 18 Kelurahan Abadijaya

Informan : Bapak Soegijanto, Sekertaris RW 18 Kelurahan Abadijaya

Hari/tanggal : Jumat, 9 Maret 2012

Waktu : 10.55-11.14

Keterangan : P (Peneliti)

I (Informan)

Hasil Wawancara

P: ini Pak Sugiyanto, ya?

I: iya mbak, mari masuk (menyuruh peneliti untuk masuk ke rumahnya).

P: bapak ini sekertaris RW, ya?

I: iya, betul

P: RW berapa ya ini, Pak?

I: RW 18. Kelurahannya udah tau kan (sambil tertawa)?

P: (tertawa) iya, Mekarjaya. Pertama, Pak...

I: he eh

P: pernah ada sosialisasi ga, Pak dari dinas kebersihan sebelum dibangun UPS ini?

I: saya sendiri kan datangnya, eeee, saya pindahan. Jadi kalo sosialisasi dari UPS, saya ga tahu ya. Saya datang itu tahu-tahu udah ada.

P: oh gitu..

I: jadi ceritanya, ini saya dengar dari orang-orang sini. Dulu itu, emang ini tempat pembuangan sampah. Memang dulu, jadi dari dulu itu udah tempat pembuangan sampah. Terus entah bagaimana, karena mungkin ini fasum atau apa. Tapi denger-denger sih ada yang jual tanah juga ya. Jual tanah buat jadi UPS. Jadi memang pertama itu udah tempat sampah.

P: oh.. terus, kalo masyarakat disini suka komplain ga sih Pak?

I: eeee, sebenarnya kalo komplain ya ada, ya. Saya sendiri juga pada waktu ada program kota bersih, yang ngomong itu dokter siapa ya? Eh sebentar, ini ada bukunya (mengambil buku di rak), nah ini bukunya (menyerahkan buku ke Peneliti). Dia itu mau buat suatu konsep kota bersih. Jadi kota bersih Depok itu harus begini. Nah ini waktu itu pertemuannya di puskesmas sini, di Kecamatan. Saya waktu itu paling pertama angkat tangan, saya bilang, "konsep dokter bagus, cuma kalo kena di RW saya, ga bakalan bisa". Dia bingung, terus saya jelasin "karena begini, Dok, tempat saya itu dari hampir semua RW di Kelurahan Mekarjaya itu buangnya ke sini (UPS Sadewa). Saya sih emang ga, saya RW 18, tempatnya di RW 19, tapi kan tiap hari yang lalu lalang itu lewat sini semua. Ya sovelnya, truknya, gerobaknya." Terus dokter bilang, "wah, ini perlu saya catat nih, Pak." Saya bilang aja "tolong sampaikan, bagaimana kita mau kota bersih, orang tempatnya aja sampai di tengah jalan." Ya kan? Untungnya, kita masih ada tempat pengolahan sampah, UPS ini. sovelnya segitu besar, maju mundur, nah kalo itu (UPS) ditutup, gimana caranya, kan repot. Nah, kenapa saya peduli, memang waktu itu ada dua UPS, satu lagi di Merdeka

sana. Tapi kenapa jadinya semua dibuang ke tempat saya semua. Kedua, baunya pun seperti itu. Cuma, kami tidak ingin itu (UPS) ditutup. Karena kan banyak mempekerjakan warga sini. Andaikata ada lagi tempat satu, ya, jadi tidak semuanya itu masuk kesini. Bahkan dijadwal pun, masih aja kelabakan itu Pak Slamet. Ditempat saya ini, ya, di RW 18, Selasa Kamis ga diambil. Jadi Selasa-Kamis-Minggu itu ga diambil. Itu aja masih kelabakan. Kita sih masih bagus dekat sama UPS, coba RW 10, RW 6, RW8, kan itu jauh-jauh tempatnya. Bisa bayangin ga, bawa gerobak sampai sini? Yang jelas sih komplain kita paling itu aja, tapi ga sampai minta itu ditutup. Karena ya banyak mempekerjakan warga sekitar, istilahnya, apa, mengangkat yang tadinya ga ada pekerjaan, jadi ada pekerjaan. Cuma, tolong kalo bisa, cari tempat lagi satu. Paling tidak, perbatasannya itu ya sana, sana, kalo sini, ya sini. Jadi waktu rapat dinas sama Pak Camat, saya hantam lagi tuh disitu, terus 2 minggu yang lalu juga ada Pak Lurah kesini, ngontrol sini. Saya jadi dekat sama Lurah, gara-gara sampah ini (tertawa). Jadi ya itu, komplain kita sebatas itu.

P: dari masyarakat juga komplainnya seperti itu, Pak?

I: iya, seperti itu. Sama, cuma kan kita, eee, apa, itu tadi ada suaminya yang kerja disitu, ada anaknya, ada ponakannya, ada siapa, jadi, apa, tarik ulur gitu lah ya. Alangkah baiknya kalo ada tempat lain lagi, komplainnya cuma itu. Liat itu yang di merdeka, bangunannya kan sayang, terus tempatnya juga ga dalam lingkungan rumah, yang disini sih udah bagus dibangun, dulu, pada ga berani lewat situ, yang namanya ulet itu, pada jalan ditengah-tengah jalan situ, laler ijo juga, banyak banget. Sampe masuk-masuk ke rumah warga juga.

P: itu maksudnya sebelum jadi UPS ya Pak?

I: iya, betul. Disini juga agak ketatlah jadi enak kitanya, dan saya kadang-kadang ikut marahin juga, pokoknya sovel boleh lewat sini, tapi bannya disikat. Dicuci, kalo ga, bekasnya kan nyecer dijalan, bau.

P: kalau dukungan masyarakat waktu pembangunan itu ada ga ya Pak?

I: eee, oke-oke aja. Karena ya itu, menyerap tenaga kerja tadi. Intinya itu karena kan ini pensiunan, terus notabene untuk melanjutkan kuliah, kan tidak sampai. Ya sebatas SMA, persaingan banyak, kalo mau kerja ditempat yang lain, kan susah.

P: tapi ada UPS ini menyelesaikan masalah sampah disekitar sini ga sih Pak?

I: kalo masalah sampah disini, ya kita sih selesai.

P: oke. Tapi, Pak, tadi kan Selasa-Kamis-Minggu sampah kan ga diangkat, terus ditaro dimana?

I: tetep, jadi dengan Selasa-Kamis-Minggu itu, kita masih bisa toleransi 1 tong lah. Kaya tadi kan baru diangkat, kemaren kan ga diambil, kalo penuh ya itu urusan dia.

P: dia ini siapa ya Pak?

I: ya petugas gerobak. Jadi, eee, dengan adanya dijadwal, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa, sampah kan numpuk, terus ditumpuk lagi, terus gimana? Ya satu-satunya jalan ya harus cari tempat lagi.

P: terus, Pak. Kan ada sampah disetiap rumah tangga, itu tiap hari selalu diangkat?

I: selalu, selama tidak Selasa-Kamis-Minggu itu. Kalo Minggu kan emang libur ya. Kenapa dibuat Selasa, Kamis itu tidak diambil, ya penjadwalan tadi itu.

P: oh jadi misalkan Bapak punya tong sampah, terus sampahnya udah numpuk, tapi baru Selasa jadi ga diambil?

I: iya gitu. Baru rabunya diambil. Terus si tukang sampahnya dibayar pake iuran warga

P: berapa sih Pak iurannya?

I: 1 orang itu kalo dari RW sekitar 200, buat 1 orang. Cuma terlepas dari itu, itu rejeki dia. Kan beras dapet dari rumah tangga. Terus ada pengambilan-pengambilan yang lain, ya dapet lagi dari rumah tangga. Itu sih rejeki dia.

P: terus peran dari UPS Sadewa ini signifikan ga sih Pak untuk lingkungan sini?

I: sampahnya?

P: iya, jadi sebelum sama sesudah itu kerasa banget ga Pak dampaknya?

I: dampaknya sih hampir sama. Cuma dulu itu pengangkutannya ga terjadwal, jadi kacau gitu ya, wah numpuk. Terus belum ada atap, lalat sama ulet, aduh, banyak mbak. Dengan adanya ini kan jadi lebih teratur, gitu ya. Ya walaupun dalam hal pengangkutan, ya, baunya sih ga enak. Apalagi kalo ujan. Kita ini, eee, ini kan lingkungan kita, komplain ke kita, cuman meledak (sampahnya) ya mau gimana lagi, kemaren aja waktu saya ketemu camat, lurah, dokter ini yang mau bikin kota bersih, saya bilang itu. Sama tolonglah carikan tempat, dibatesi, apalagi yang disana kan udah ada tempatnya. Dulu kan pas yang merdeka sana jalan, disini ga pernah terjadi pembludakan.

P: masyarakat sini bisa dibilang puas ga sih Pak?

I: (tertawa) kalo puas itu ya yang jelas sih terpenuhi ya. Ya bisa dibilang puas lah ya karena kebutuhan warga sini terpenuhi. Paling ya baunya aja. Sama pengangkutan yang truknya lalu lalang. Sampah ini kan masalahnya kompleks ya, ya kan. Tolong deh, dibuatkan satu tempat lagi selain sini. Kalo kita demo-demo kok rasanya gimana ya, nanti dulu lah. Kalo perlu kita bicara, bicara ini aja. Saya udah ke camat, udah ke lurah.

P: oke.. ya udah sih, Pak, paling ini aja.

I: oh iya, iya. He eh.

P: makasih banyak ya Pak.

Lampiran 8 Transkrip Wawancara dengan Masyarakat RT 03/RW 21 Kelurahan Abadijaya

Informan : Bapak Waluyo, Masyarakat RT 03/RW 21 Kelurahan Abadijaya

Hari/tanggal : Senin, 12 Maret 2012

Waktu : 12.05-12.22

Keterangan : P (Peneliti)

I (Informan)

Hasil Wawancara

P: dengan Pak Waluyo, ya? Maaf Pak, alamat rumahnya dimana ya?

I: di RT 03 RW 21

P: masih Abadijaya ya?

I: iya

P: begini Pak, awalnya itu dilingkungan Bapak, waktu tau mau dibangun UPS ada penolakan ga?

I: begini, saya kan dulu juga ikut, waktu mau dibangun, warga sih kalau dibilang keberatan, ya memang keberatan. Tapi akhirnya kita sepakat, boleh dibangun dengan catatan lingkungan kita harus diperhatiin. Antara lain got ini, air kan dari atas kemari kan masuknya ke pembuangan air, jadi masuk kesana semua (sambil menunjuk got dekat tempat wawancara). Warga minta ada saluran air yang lancar, jadi dengan adanya gedung ini, otomatis tadinya air kesini semua, kalo ada saluran air yang lain, kan jadi kebagi dua. Kedua, yang penting jangan sampai mengganggu orang, istilahnya, ya kaya bau. Bau itu kan otomatis, namanya juga sampah. Waktu itu janjinya sih ga bakalan bau, jadi katanya nanti bau itu kan bisa dipakein kimia ya, diobatin gitu. Terus bising juga ga. Tapi sampai sekarang saluran aja ga bener. Tetep aja banjir. Daerah dia nih terutama (menunjuk salah satu warga yang berada ditempat wawancara). Ya itu sih tuntutan warga ya, satu jangan sampai bau, sampai membludak gitu, jangan sampai keluar sampahnya. Tapi ya tuntutan utama yang diminta warga itu, belum ada realisasinya.

P: yang saluran air itu?

I: iya, yang saluran air. Dari sini cuma ngandelin ini (menunjuk got yang berada dekat dengan tempat wawancara), padahal ini keadaannya begini. Terus daerah sini rendah kan, pasti air kemari semua, disana (tempat yang lebih rendah) pasti banjir. Kalo ujan ya banjir terus. Dulu janjinya kesono nembus,.

P: terus ga protes lagi, Pak?

I: udah, udah berapa kali protes. Kalo ditanya bahkan dari dinas ga ada yang dateng. Katanya masih dalam proses, terus alasan lain lagi katanya itu kerjaan PU.

P: protesnya kemana, Pak?

I: ke kecamatan, orang kecamatan kan sering kesini, terus bilang "ini sedang diproses, Pak, ini sudah masuk, sekarang sedang diproses", tapi realisasinya sampai sekarang belum ada kan? Ya akhirnya gini, yang penting warga sih jangan sampai bau menyengat, jangan sampai keluar dari gedung, kan nanti efeknya ke kesehatan warga sini. Lingkungan kan jadi ga sehat, gitu. Ya kalau mau menanggapi masalah saluran, walaupun gatau kapan, tapi ya tetep harus ada titik-titik yang menjurus kesitulah kira-kira.

P: jadi yang belum terealisasi cuma saluran aja?

I: iya. Saluran air sampai sekarang belum ada. Got yang ini kan kecil, cuma dari bengkel itu (menunjuk bengkel dekat dengan tempat wawancara) belok kanan, ya jelas ga muat. Kadang-kadang jalan itu, jalan yang samping bengkel motor itu udah kaya sungai. Kalo anak balita jatuh disitu, udah ga bakalan bisa bangun. Ya dibawa arus. Ya ga muluk-muluk sih kalo warga sini, mintanya ya lingkungan kita diperhatiin.

P: berarti sebelum dibangun ada sosialisasi gitu ya Pak dari kelurahan?

I: ga ada tuh. Tau-tau udah mau bangun aja. Ya saya mah cuma warga, masyarakat kecil. Mungkin udah, ditingkat RT/RW barangkali. Tapi ga ada yang ke masyarakat. Kita mah taunya udah mau dibangun aja gitu. Mungkin pilih-pilihan kali, kaya tokoh masyarakat, yang tertentu aja. Mungkin ada ya, tapi kan kalo kaya saya ya mana mungkin diundang. Terus dulu ada yang bilang mesinnya mau ditaro didalem gitu, jadi dibikin lubang jadi ga ngeluarin bising.

P: tapi ada ini ga sih Pak, ada peran serta dari masyarakat waktu ini udah berjalan?

I: peran dalam apa tuh?

P: ya maksudnya ada dukungannya dari masyarakat waktu ini udah jalan.

I: buat sampah ini kan ya? Bentuk dukungannya ya ga ada, cuman ya namanya masyarakat, rakyat kecil, apapun yang akan di kerjakan oleh Pemda, istilahnya kita ngikutin, yang penting jangan sampai menyengsarakan banget. Cuma itu doang. Kalo dukungan ya ga ada, siapa sih yang mau dideketin sampah? Ga ada yang mau, satupun ga ada. Saya sendiri pribadi nih, jelas ga dukung, tapi emang karena itu udah diprogram, ya barangkali, apa namanya, tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa orang itu udah sepakat, ya mau ga mau. Cuman kita minta supaya jangan mengganggu banget. Tapi semenjak ada gedung ini, kebanjiran tambah parah. Bisa sampe setengah meter masuk.

P: tapi ini udah memenuhi kebutuhan masyarakat belum sih, Pak?

I: ya ada pro ada kontra, ya memang ada kegunaannya, tapi ya cukup mengganggu. Apalagi pas diangkut tuh, bau banget. Kita kan jadi ngerasa gimana ya, ya ampun... deket sama UPS ini bau banget. Kan sampah udah numpuk beberapa hari, begitu diangkut kan uap baunya keluar. Itu sampe jauh baunya, sampe ratusan meter kesono baunya. Ya kalo bisa ini pindah aja deh. Tapi kalo bau itu sih ga setiap saat, ini aja ga bau kan? Coba kalo Mbak kesini pas diangkat, hoo, bau banget. Yang rutin itu kalo musim ujan, semenjak ada gedung ini, air kan kalo mentok ke gedung, larinya kemari, tadinya mencar. Tadinya ada dua arah lah. Sekarang kemari semua, jadi ya makin banjir. Ya enaknyah sih kalo mau buang sampah ga perlu jauh-jauh.

P: tapi Bapak sendiri pernah ngadu ga sih ke sini (UPS) langsung, atau ke RT atau RW?

I: kalo ngadu, bagi saya udah sering, orang sini kan dipake buat nongkrong orang-orang kecamatan, ada dari kelurahan, jadi ya sering ngadu sih. Tapi ya kenyataannya kalo orang-orang ditanya ya itu tadi jawaban saya kan, masalah air, katanya itu kerjaan PU. Kalo kaya saya kan sebagai masyarakat kan ga tau, mau PU kek, mau DKP kek, pokoknya yang penting kita masyarakat itu kalo ada kegiatan disini terus buat umum, ya jangan merugikan lingkungan setempat. Gitu doang, kalo saya prinsipnya gitu doang. Ini aja yang saluran air udah dari gedung dibangun, udah 3 tahun kalo ga salah, ga diurus-urus juga.

P: tapi balik lagi nih, Pak, udah memenuhi kebutuhan masyarakat belum sih? Kaya sebelum ada ini atau, eh, sesudah ada ini sampah udah lebih terkoordinir.

I: ya kalo itu emang ada. Dulu waktu belum ada ini, sampah udah ga beraturan, bahkan ada yang ditaro dijalan. Setelah ada ini agak mendingan. Ya itu saya emang akui, jadi ada tempat penampungan yang ini, agak mending. Kalo dulu emang berantakan. Bahkan saya juga suka kesel, suka saya marahin warga yang buang seenaknya. Kan dulu sebelum dibangun, ini pembuangan sampah juga, sampah itu bahkan sampe nutupin jalan. Padahal udah dipager page bambu juga, tapi

masih tetep aja diluar pager. Ya emang manfaatnya ya itu, yang tadinya sampah berserakan, sekarang udah beraturan, karena ada yang ngatur, ada yang ngoordinir.

P: tapi bapak sendiri sebagai masyarakat, udah puas belum?

I: ya kalo puas ya ga lah, siapa juga yang mau deket sama sampah. Ya jelas ga puas. Kan kalo memang udah ditetapkan begitu, ya mau ga mau. Apa bisa orang-orang kaya saya, yang rakyat kecil didenger suaranya. Ga ada. Ya banyak kan program pemerintah yang bertentangan sama masyarakat, tapi kita kan cuma rakyat kecil, ya ga bisa apa-apa. Kalo boleh ya mending kaya model di Jawa Tengah, disana ada di wilayah Bantul, itu ada bank sampah, nah kalo kaya gitu kan bagus. Soalnya yang suka ngopi disini cerita, dia kan orang bantul, dia cerita “istri saya tabungan bank sampahnya udah 300 ribu” saya nanya kan “maksudnya bank sampah gimana”, “gini, Pak, kalo orang buang sampah sekarang ini kan dibayar, jadi kalo kita masuk ke TPS, buang itu nanti dikilo berapa beratnya, itu ada harganya, nanti tau-tau ada rekening bank sampahnya. Kalo mau diambil tiap bulan ya bisa kalo ga ya ga apa-apa, tau-tau udah segini aja tabungannya”. Jadi katanya kan dibagi dua tuh sampahnya, apa itu namanya?

P: organik sama an organik ya?

I: iya, jadi yang plastik-plastik gitu ada yang dijual 750 ada yang 500. Jadi dirumah-rumah udah ga ada sampah berserakan. Bahkan kalo umpamanya sampah orang ga dibuang, kita minta. Jadinya kita malah berterima kasih sama yang ngasih sampah. Jadi enak. Coba diterapin disini yang kaya gitu, kalau kaya gini kan saya setuju. Kalo ini kan bau doang, apalagi kalo sampah udah numpuk ga diangkut-angkut sampai keluar pintu, nyesek liatnya. Apalagi kemarin kan bocor, airnya itu masuk terus keluar, itu bau banget. Sampai radiusnya bisa 200-300 meter.

Lampiran 9 Transkrip Wawancara dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Depok

Informan : Ibu Enthy Sukarti, Ketua Komisi C DPRD Kota Depok

Hari/tanggal : Senin, 2 April 2012

Waktu : 11.49-11.04

Keterangan : P (Peneliti)

I (Informan)

Hasil Wawancara

P: Maaf, Nama lengkapnya siapa ya, Bu?

I: Hajah Enthy (mengeja) Sukarti. Ga punya kartu nama nih, dari awal jadi anggota dewan ga pernah punya kartu nama.

P: (tertawa) iya gini Bu, saya kan skripsi tentang kinerja UPS, khususnya yang di Sukmajaya. Nah, mau mau nanya-nanya sih Bu gimana proses awal sampai ada pembangunan UPS ini?

I: UPS itu sebetulnya adalah program RPJMD Walikota, waktu itu Pak Nurmahmudi, 2005/2010 ya? Dan sudah tertuang di RPJMD.

P: sebenarnya ide bikin UPS ini apakah ada studi banding dari kota lain atau gimana sih Bu?

I: awalnya kan kita emang belum tau ya karena saya sendiri kan baru 2009 smpai 2014. Tapi saya rasa program ini sangat bagus, tapi ya tetap ada kendalanya.

P: tapi ide, eee, konsep UPS ini sebenarnya meniru atau memang gagasan sendiri dari Depok?

I: kalau untuk kajian sih kita ga ada.

P: oh.. terus emng idenya dari mana sih, Bu?

I: idenya sih dari apa namanya, ya dari fenomena sampah di Kota Depok, sama dari kemauan Pak Wali ya, waktu kepemimpinannya yang pertama. Faktanya dulu pas perencanaan 2005/2010 itu kan sampah banyak, tapi yang terangkut paling cuma 50% ke TPA Cipayung. Terus Pak Wali itu kepengen sampah-sampah yang ga terangkut itu dapat diolah dimasing-masing sumber sampah. Maka lahirlah program UPS. UPS ini kan ada 3 tujuan, satu, mengolah sampah, kedua itu buat merekrut tenaga-tenaga kerja dengan standar UMR, yang ketiga ada kompos hasil produknya. Nah, tetapi karena ini, eee, pengolahan dai sumber sampah ini belum bisa maksimum karena , eee, jadi kan UPS itu banyak problem sengketanya di lahan. Bukan di program UPS itu sendiri, ya karena kan UPS ini berhubungan sama jalan akses masuk, berhubungan dengan luas tanah, tanah kan satu UPS itu minimum itu dia harus 500 m2, karena standar mesinnya itu dia butuh hanggar seluas 500 m2 diluar parkir. Nah, mencari tanah seluas 500 m2 untuk UPS itu ga semua masyarakat berkenan tanahnya dibuat UPS, makanya program UPS ini agak tersendat. Bukan programnya, tapi penempatan mesin-mesin disetiap UPS-nya ini yang mengalami hambatan. Sebenarnya kan tujuan dari UPS ini kan bagus. Ketika hampir separuh sampah di Depok yang ga terangkut di TPA Cipayung, maka program Pak Wali ini diselesaikan disumber-sumber sampah dalam hal ini dibangun disetiap kelurahan atau kecamatan.tapi kan baru berapa unit sih yang efektif, kan kapasitas mesin UPS itu 30 m3 perhari, nah kan sampah di Depok itu sekitar 3000 m3 perhari, setengah yang ga keangkut kan berarti 1500 m3, kalo mesin itu kapasitasnya 30 m3 berarti kan 50an UPS baru bisa efektif. Terus kan nanti sampah itu bakal jadi kompos, tapi memang pemanfaatan kompos dari persampahan itu belum efektif karena kan, eee, pemerintah itu perlu membangun semacam koperasi buat kompos ini, jadi nanti dikelola oleh masyarakat. Jadi biar

kompos ini juga jelas kemana, karena kan nanti semakin kita banyak bangun UPS berarti kan semakin banyak pupuknya. Tapi kan masyarakat kita belum sepenuhnya menyadari keuntungan adanya UPS ini. Padahal UPS ini bisa menyerap tenaga kerja, terus tingkat ke-bau-an juga ga begitu bau. Sampah itu kan akan bau kalau dia mendem selama 1x24 jam, jadi keluar aroma-aroma yang ga enak. Tapi kan kalo di UPS, sampah dateng bisa langsung diolah. Jadi aromanya ga sebau kalo di TPS-TPS dipinggir-pinggir jalan. Tapi ya gitu, begitu dengar pemerintah mau bangun program UPS, masyarakat langsung menolak. Jadi kan kita akhirnya terhambat, di akses jalan, di pembebasan lahan. Emang yang paling sulit itu menyadarkan kesadaran masyarakat ya karena kan untuk mengatasi sampah ini kan ga cuma tanggung jawab pemerintah saja, tapi semua komponen.

P: oh.. terus dasar peraturan pembangunan UPS ini ada ga sih Bu?

I: ya RPJMD tadi. Pas awal itu kan rencananya mau bikin 60 UPS. Tetapi kenyataannya ya banyak kendala dan hambatan, kaya penolakan masyarakat tadi. Alasannya karena bau, padahal kan itu produk sampah mereka sendiri, jangan semuanya ke TPA, masa cuma disana aja yang harus kebauan. Ya jangan egoislah.

P: tapi kalo untuk tahapan pembangunannya sendiri berapa sih, Bu?

I: emmm, yang jelas sih cari lahan dulu. Kalo mau lebih enak ya ke DKP aja, Mbak, ya..

P: iya, Bu. Terus peran dewan sendiri untuk UPS ini apa sih, Bu?

I: ya untuk penganggaran, yang kedua itu pembangunannya, melihat targetnya sudah sesuai apa belum. Sama pengadaannya. Ya sebenarnya kita hanya pengawasan saja. Kalau pelaksanaannya kan ada di DKP.

P: nah, selama dewan ini mengawasi, ada ga sih Bu penyimpangan-penyimpangan?

I: ya itu sih kita ga berhak menilai. Itu kan ada di BPK. Dewan sih ga masuk ke ranah itu.

P: waktu awal pembangunan UPS ini semua dewan setuju atau ada pro-kontra juga Bu?

I: saya sih kurang tau ya, Mbak. Tapi ya namanya pro-kontra sih saya yakin ada. Ya kita sih paling menyoroti kenapa sih ada yang ga jalan.

P: sejauh ini, keefektifan UPS ini menurut penilaian dewan sudah efektif belum sih Bu?

I: kalau keseluruhan dewan ya saya ga tahu, tapi saya probadi saya sangat apresiasi lah untuk program UPS ini. karena kalau mau bikin biogas itu, kita sampahnya kurang. Volume sampahnya. Tapi disisi lain kita juga ga bisa mengolah keseluruhan jumlah sampah, yang terangkut kan masih 50%. Ya kerja keraslah pemerintah.

P: perencanaan kan sudah dari 2005/2010, sampai sekarang kan sudah 5 tahunan, ini apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah?

I: belum. Belum optimal dan maksimal. Perlu pembenahan lah. Karena begini, di UPS ini sudah terolah jadi kompos, ini sudah sering jadi pertanyaan saya ketika saya ketemu dinas, kompos ini dijual kualitasnya kurang bagus, dibagikan ke masyarakat Depok overload, kelebihan. Jadi jangan sampai, ada sampah baru, yaitu sampah kompos. Kita kan harus cari solusinya.

P: terus selama ini emang komposnya kemana sih, Bu?

I: yang saya tahu itu selama ini kerja sama dengan Dinas Pertanian. Oh iya, pernah ada kasus waktu 2009 apa 2010 gitu. Jadi ada lahan milik masyarakat dijadikan UPS, nah masalahnya muncul ketika masyarakat ini mau memakai lahan tersebut, ya kan? Makanya sekarang kita mengatur kalau tanah buat UPS itu harus menjadi aset negara.

P: kalau anggaran itu yang menentukan siapa ya Bu?

I: yang menentukan DPRD, badan anggaran, dan pemerintah kota. Tapi yang mengajukan ya dari dinas-dinas terkait.

P: oh gitu.. kalau operasionalnya dari APBD. Bu?

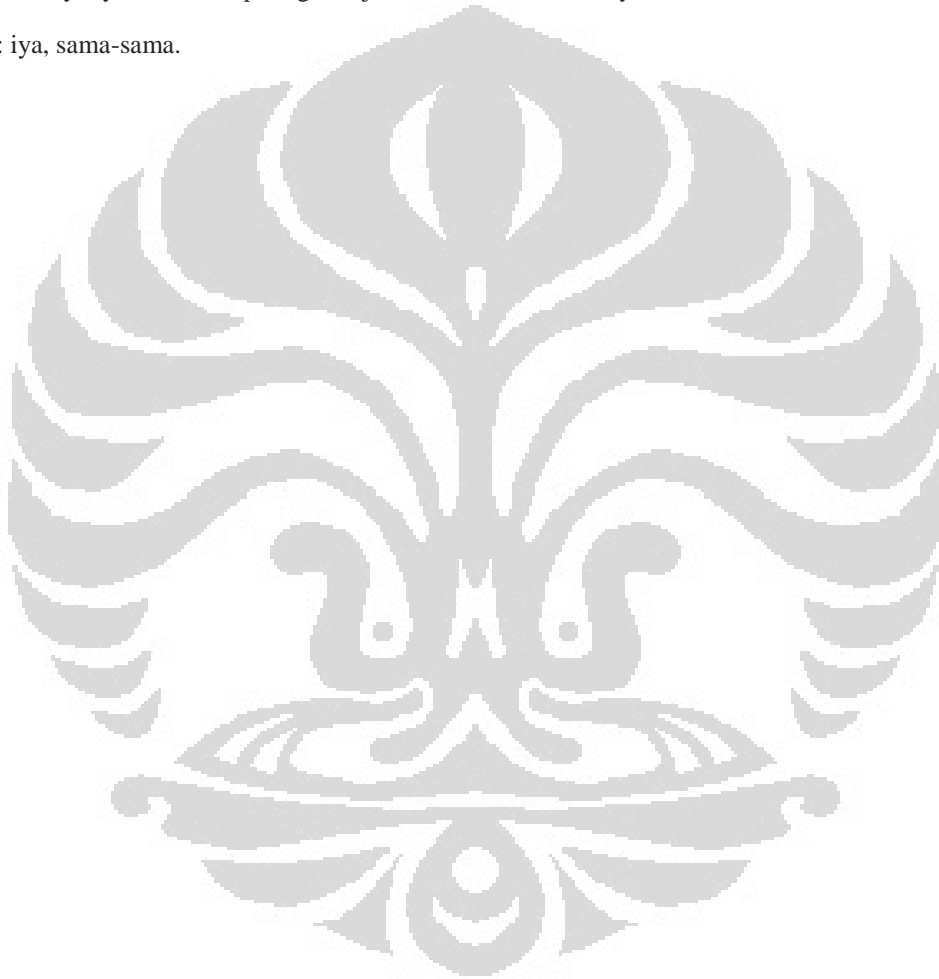
I: iya, dari APBD

P: dialokasikan berapa sih Bu untuk setiap UPS?

I: wah saya ga terlalu tau. Paling ya tenaga kerja sama solar. Harapannya sih kedepan, kami, dinas, dan pemerintah kota, membuat UPS ini mandiri dan dikelola oleh masyarakat secara swadaya jadi tidak membebeani APBD lagi.

P: oh, iya iya. Ya udah, paling ini aja sih Bu. Terima kasih ya.

I: iya, sama-sama.



Lampiran 10 Transkrip Wawancara dengan Wartawan Harian Jurnal Depok

Informan : Bapak Apik Yudha, Wartawan Harian Jurnal Depok

Hari/tanggal : Senin, 2 April 2012

Waktu : 11.49-11.04

Keterangan : P (Peneliti)

I (Informan)

Hasil Wawancara

P: maaf, Pak Apik?

I: iya, sini aja.

P: iya, Pak. Kita mulai saja kali ya. Maaf, bapak nama lengkapnya siapa, ya?

I: Apik Yudha.

P: Bapak pernah meliput UPS yang mana di Sukmajaya?

I: dua-duanya, di merdeka itu. Di merdeka kan?

P: he eh. Merdeka I dan Merdeka II, kalo yang sadewa ga ya?

I: sadewa, eee, pernah sih. Tapi yang disorotin sih yang dua itu doang.

P: oh.. kenapa disorotin, Pak?

I: kalo yang Merdeka I, statusnya ditolak sama warga. Kalo yang Merdeka II katanya denger-denger ada pungli.

P: oh, ada pungli?

I: iya, ada pungli, jadi pengelola UPS Merdeka II itu, minta bayaran ke tukang sampah yang dirumah-rumah.

P: oh, itu baru dugaan, atau sudah ada bukti?

I: dugaan. Tapi kalo ditanya ke tukang sampahnya, ya emang dia bilang, ngakuin, kalo ada pungutan.

P: padahal seharusnya tidak ada?

I: seharusnya ya gratis, karena itu kan program pemerintah, buat nanggulangi sampah di Depok.

P: itu petugasnya, petugas yang ngelola sampahnya, atau langsung koordinatornya tau juga?

I: koordinator. Kan di tiap UPS ada koordinator, jadi ya dia yang berkuasa penuh.

P: oh.. ini hampir semua petugas sampahnya dimintain?

I: iya.

P: berapa, Pak?

I: sebulan itu sekitar 100-300 lah satu gerobaknya.

P: oh gitu. Petugas sampahnya ga ngadu ke DKP atau semacamnya?

I: ga lah, percuma juga kan. Diem aja jadinya. Karena kan dibelakangnya masih ada TPS, jadi ya bisa buang kesitu.

P: ada tindakan dari DKP ga sih Pak?

I: ya paling disikapi sama dia.

P: tapi sampai sekarang masih?

I: masih. Masih jalan. Buktinya aja mereka masih banyak yang buang ke TPS.

P: kalo Merdeka I nih Pak, kan itu ditolak ya..

I: iya ditolak warga karena bau.

P: kalo kronologisnya Bapak tahu?

I: itu, eeem, sekitar tahun 2010 kalo ga salah. Itu ditolak warga, tapi itu kan sekarang udah ga aktif. Ga aktif karena dialihin jadi rumah kompos. Dideket situ kan ada perumahan taman cipayung kalo ga salah.

P: tapi pernah wawancara ke masyarakat sekitar situ ga sih, kenapa menolak?

I: ya itu, bau. Menyengan banget. Ya namanya juga sampah, kalo ditumpuk gitu aja kan bau, kecuali langsung diolah. Tapi kan itu mesinnya 2 bulan mati, 2 bulan mati. Per 2 bulan. Padahal kalo menurut itungannya, itu kuat sampai 5 tahun. Kalo spec-nya sesuai ya. Mesin-mesin aja second semua.

P: itu beneran mesinnya second? Hampir semua UPS?

I: he eh.

P: tapi kan ada pengadaan?

I: ya itu pengadaan, kan namanya pengadaan kan bisa dimainin. Kalo pengadaan itu kan dilempar ke pihak ke-3, DKP kan tahunya ya pokoknya dana segini, terus bilang pengen beli mesin sampah yang spec-nya kaya gini, udah. Terserah itu mau baru mau ga ya ga tahu. ya tinggal pihak ketiganya bagaimana.

P: tapi yang mainin itu pihak ketiganya ya Pak, tidak ada pemerintahnya?

I: ya ada permainan pasti. Disitu memang ada indikasi permainan karena mesin aja mati terus tiap 2 bulan. Dan nunggu service-nya lama, sampai 6 bulan.

P: oh. Itu nyervisnya pihak ketiga apa pemerintah sih?

I: pemerinthnya lah.

P: tapi kok harus nunggu sampai 6 bulan?

I: ya memang begitu prosedurnya, biaya perawatan kaya gitu kan mahal. Ada tiap tahun dikucurin dana perawatan.

P: terus berarti kalo yang Merdeka I itu sudah pernah beroperasi ya sebelum ditutup?

I: sudah, sekitar 1,5 tahun. Sempet jebol, lho.

P: kenapa?

I: jebol temboknya, jebol. Dindingnya itu jebol. Sekarang bagus karena diperbaiki.

P: kalo yang Merdeka II sama Sadewa belum pernahya Pak?

I: belum, cuma kendala mesin aja. Merdeka II itu juga ga punya mesin.

P: terus itu mesin siapa?

I: mesin Merdeka I dilempar disana.

P: terus yang sebelumnya pake apa dong?

I: nah dia punya mesin, tapi rusak. Itu mesin dari mana? Dari Merdeka I. Kaanya mesinnya lagi di service. Katanya sih udah hampir 6 bulan, nah 6 bulan itu tinggal 1 bulan lagi, kita tunggu aja.

P: balik lagi ke Merdeka I Pak, itu sempat di PTUN kan, ya?

I: iya, kalah.

P: masyarakat yang kalah, kan?

I: oh, ga, masyarakat menang.

P: oh gitu, soalnya saya ke DKP, katanya DKP yang menang.

I: kalo menang, mana suratnya. Minta aja.

P: kalo di Merdeka I, kenapa ya bisa benar-benar di bangun, padahal udah ada penolakan?

I: kan itu program pemerintah, programnya Nur Mahmudi. Mau ga mau kan. Nur mahmudi udah kasih perintah, ya sudah. Dia kan ga mau tahu dampaknya ke masyarakat itu apa. Akhirnya kan itu dijadikan rumah kompos, buat ngehindarin konflik.

P: bapak warga Depok?

I: he eh.

P: menurut Bapak sendiri ini efektif ga sih?

I: kalo sesuai rencana dan terlaksana dengan baik, ya efektif. Kan menang niatnya buat ngurangin sampah ke TPA Cipayung. 2 tahun lagi juga dia penuh tuh. Tapi kan sekarang kenyataannya ga gitu.

P: sebenarnya, penyebab kenapa itu akhirnya ga sesuai rencana apa sih?

I: ya gitulah, banyak permainan-permainan, anggaran segini, terus proses tendernya juga udah bermasalah. Pelaksanaannya juga bermasalah.

P: kalo untuk bangunan sendiri Pak?

I: ga ada masalah sih.

P: berarti cuma mesin aja ya?

I: iya.

P: tapi menurut Bapak, peran UPS Merdeka II sama UPS Sadewa ini menurut pengamatan Bapak, sudah memenuhi kebutuhan masyarakat situ belum sih?

I: ya belum. Kan kebutuhan doi Sukmajaya itu ada berapa kelurahan? Berapa RW, berapa RT. Ya jelas kurang lah. Kaya di Merdeka II, ada limpahan sebagian dari UPS Merdeka I. Sebagiannya lagi ke sadewa.

P: sebenarnya awalnya apa sih yang mendasar sampai jadi UPS?

I: ya awalnya itu, untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Terus masuk ke RPJMD, kalo ga masuk mana mungkin jalan.

P: kalo tahapannya sendiri Bapak mengetahui tidak ya?

I: ga sih.

P: kalo di sadewa ada masalah gas ih, Pak?

I: paling masalah overload. Ini sih masalah hampir semua UPS. Apalagi kan sadewa ini dapet limpahan dari Merdeka I. Sama paling masalah mesin, ini buat semua UPS ya. Hampir 2 jam sekali itu mesin mati. Tanya aja, tiap 2 jam bisa aja mereka istirahat. Coba bayangin berapa waktu yang kebuang. Jadi kan sampah ga kegiling, numpuk kan. Padahal sampah dateng terus. Mesinnya kan juga harusnya ada mesin pemilah, milahin organik sama an organik. Kalo mau sistemnya bagus ya, ya jangan semuanya digiling jadi satu.

P: oke. Ya paling ini aja sih, Pak.

I: oh iya.

P: makasih banyak, ya Pak.

I: iya, sama-sama

Lampiran 11 Dokumentasi Studi Lapangan



Fasilitas Kantor Administrasi di UPS
Sadewa



Fasilitas Kantor Administrasi di UPS
Merdeka II



Fasilitas Kamar Mandi di UPS
Merdeka II



Kompos yang dihasilkan UPS Sadewa



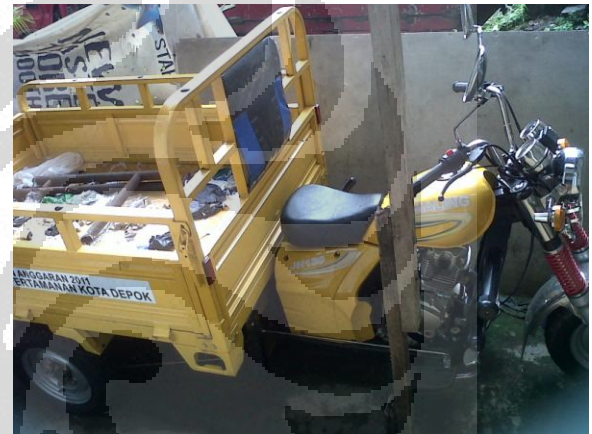
Sampah An-organik yang dikumpulkan di UPS Merdeka II



Fasilitas Gerobak Sampah



Fasilitas Truk Sampah



Fasilitas Gerobak Motor Sampah



Tumpukan Sampah di UPS Sadewa



Tumpukan Sampah di UPS Merdeka II